



Katalog BPS: 9502002

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

2010-2014



BADAN PUSAT STATISTIK

NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN

2010-2014



NERACA ARUS DANA INDONESIA TAHUNAN 2010-2014

ISSN: 0854-6967

No. Publikasi: 07230.1502

Katalog BPS: 9502002

Ukuran Buku: 21,5 x 28,5 cm

Jumlah Halaman: liv + 128 Halaman/*Pages*

Naskah:

Subdirektorat Neraca Modal dan Luar Negeri

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia 2010-2014 adalah publikasi yang menyajikan gambaran serta informasi mengenai data investasi di Indonesia selama periode tersebut. Data yang disajikan mencakup informasi mengenai perkembangan investasi non finansial dan investasi finansial tahunan dalam berbagai kategori transaksi finansial yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (sektor institusi). Sektor institusi dalam publikasi ini terdiri dari: Bank Sentral, Perbankan, Bukan Bank, Rumah Tangga, Pemerintah, Perusahaan Pemerintah dan Perusahaan Swasta Non-Finansial, serta Luar Negeri. Khusus untuk sektor Bukan Bank yang terdiri dari Pegadaian, Dana Pensiun, Asuransi, dan Perusahaan Pembiayaan, ulasan dan tabel NAD-nya disajikan tersendiri dalam publikasi ini.

Publikasi ini merupakan kelanjutan dari publikasi-publikasi NAD Tahunan sebelumnya yang disajikan secara rutin oleh Badan Pusat Statistik. Sajian yang ditampilkan pada publikasi ini masih mengikuti format publikasi NAD tahun sebelumnya baik dari segi pembagian sektor institusi maupun kategori transaksi finansialnya. Namun, beberapa angka yang disajikan dalam publikasi ini telah mengalami perbaikan dan disesuaikan dengan data pendapatan nasional yang telah direvisi.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi NAD Tahunan baik dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, maupun dari Otoritas Jasa keuangan yang telah memberikan kontribusi dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Kami menyadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, November 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

SURYAMIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
Ringkasan Eksekutif.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II. KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA.....	5
2.1 Penjelasan Umum.....	5
2.2 Kerangka Teori NAD.....	6
2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional.....	10
2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan.....	12
2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana.....	14
2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD.....	16
BAB III. KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA.....	21
3.1 Kerangka NAD Indonesia.....	21
3.2 Sumber Data.....	27
3.3 Metode Penyusunan.....	30
BAB IV. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA.....	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Neraca Arus Dana Sederhana (Triliun Rupiah)	7
Tabel 4.1 Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah)	38
Tabel 4.2 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Tahun 2010-2014 (Persen)	39
Tabel 4.3 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB tahun 2010-2014 (Persen)	40
Tabel 4.4 Investasi Non-Finansial Menurut Sektor Tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah)	43
Tabel 4.5 Struktur Investasi Non-Finansial Menurut Sektor Tahun 2010-2014 (Persen)	44
Tabel 4.6 Struktur Investasi Non-Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2010-2014 (Persen)	45
Tabel 4.7 Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2014 (Triliun rupiah).....	46
Tabel 4.8 Komposisi Perubahan Kepemilikan Modal Saham Menurut Sektor tahun 2014 (Triliun Rupiah)	47
Tabel 4.9 Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik Menurut Jenis Investasi Tahun 2014 (Triliun Rupiah)	48
Tabel 4.10 <i>S/Gap</i> Menurut Sektor Tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah)	49
Tabel 4.11 Perubahan Portofolio Investasi Finansial LKBB Tahun 2014 (Triliun Rupiah)	52
Tabel 4.12 Sumber Pembiayaan Investasi Finansial LKBB Tahun 2014 (Triliun Rupiah)	53
Tabel 4.13 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Asuransi Tahun 2014 (Triliun Rupiah)	54
Tabel 4.14 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pembiayaan Tahun 2014 (Triliun Rupiah)	55
Tabel 4.15 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Dana Pensiun Tahun 2014 (Triliun Rupiah)	57
Tabel 4.16 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi Sektor Perusahaan Pegadaian Tahun 2014 (Triliun Rupiah)	58
Tabel 4.17 Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto Tahun 2010-2014	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Proporsi Investasi Indonesia Tahun 2013 dan 2014 (Persen).....	41
Grafik 4.2	Perkembangan Investasi Indonesia Tahun 2013-2014 (Triliun Rupiah)	42
Grafik 4.3	Perkembangan Pertumbuhan Investasi Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014 (Persen)	42
Grafik 4.4	Tabungan Bruto, Investasi Non-Finansial, dan Pinjaman Neto LKBB Tahun 2014 (Triliun Rupiah)	50
Grafik 4.5	Komposisi Tabungan Bruto Menurut Sektor-Sektor LKBB Tahun 2014 (Persen).....	51
Grafik 4.6	Proporsi <i>S-I Gap</i> LKBB Menurut Sektor Tahun 2014 (Persen)	51
Grafik 4.7	Perbandingan Beberapa Aset Perusahaan Pembiayaan Tahun 2013 dan 2014 (Triliun Rupiah)	56
Grafik 4.8	Rasio M1 dan M2 Terhadap PDB Tahun 201-2014 (Persen)	61
Grafik 4.9	Velocity of Money Tahun 2010-2014	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	L1-1 - L1-10
Lampiran 2. Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	L2-1 - L2-9
Lampiran 3. Matrik NAD Menurut Kategori Transaksi dan Sektor	L3-1 - L3-12
Lampiran 4. Matrik NAD Indonesia Menurut Sektor	L4-1 - L3-18

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	L1-1 - L1-10
Lampiran 2. Definisi Kategori Transaksi Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia	L2-1 - L2-9
Lampiran 3. Matrik NAD Menurut Kategori Transaksi dan Sektor	L3-1 - L3-12
Lampiran 4. Matrik NAD Indonesia Menurut Sektor	L4-1 - L3-18

<http://www.bps.go.id>

Ringkasan Eksekutif

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data finansial yang secara lengkap menggambarkan penggunaan **tabungan** dan **sumber dana lainnya** untuk membiayai **investasi yang dilakukan** oleh **sektor-sektor institusi** pada periode waktu tertentu. Neraca Arus Dana (NAD) juga menggambarkan arus transaksi finansial antar berbagai sektor institusi melalui (menggunakan) berbagai jenis instrumen finansial pada periode waktu tertentu.

Tabungan dalam istilah NAD merupakan selisih antara **penerimaan** dengan **pengeluaran** dari kegiatan ekonomi. **Penerimaan** meliputi, surplus usaha dari kegiatan memproduksi barang dan jasa, penerimaan dari balas jasa faktor produksi yang dimiliki (upah/gaji, deviden, bunga, sewa, dsb), dan *current transfer* (subsidi, pajak, bantuan luar negeri, dan pensiun). **Pengeluaran** mencakup pengeluaran untuk konsumsi, *current transfer* (seperti pajak, dll), dan pengeluaran lainnya (selain pengeluaran untuk kegiatan produksi) seperti pembayaran deviden dan bunga. Tabungan dalam konteks ini adalah tabungan bruto, yaitu tabungan (sesuai penjelasan diatas) ditambah dengan penyusutan barang modal.

Tabungan merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk investasi. **Sumber lainnya** untuk berinvestasi adalah penerimaan yang berasal dari transaksi keuangan seperti, penerimaan dari hasil penerbitan saham/obligasi, penerimaan kredit, dan sebagainya. Sedangkan **investasi yang dilakukan** oleh berbagai sektor institusi mencakup **investasi finansial** dan **investasi nonfinansial (investasi riil)**. **Investasi finansial** adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu sektor institusi dengan menggunakan berbagai instrumen finansial seperti saham, Surat Utang Negara (SUN), kredit, Surat Berharga Bank Indonesia (SBI), surat berharga jangka pendek, dan sebagainya. **Investasi nonfinansial (investasi riil)** mencakup penambahan serta pengurangan barang-barang modal dan inventori (stok) yang dilakukan oleh suatu sektor institusi. **Sektor-sektor institusi** dalam Neraca Arus Dana tahunan dibagi dalam 3 sektor besar yaitu: **sektor Keuangan, sektor Bukan Keuangan, dan sektor Luar Negeri**. Sektor Keuangan terdiri dari subsektor Bank Sentral, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Sektor Bukan Keuangan meliputi subsektor Rumah Tangga, Pemerintahan Umum, Perusahaan Pemerintah, dan Perusahaan Swasta. Sedangkan Luar Negeri merupakan sektor tersendiri yang terpisah dari sektor-sektor lainnya.

NAD disajikan dalam bentuk matrik, yaitu suatu sajian dalam bentuk tabel yang terdiri dari **baris** dan **kolom**. **Baris** pada matrik NAD menunjukkan kategori transaksi, yaitu jenis-jenis transaksi baik transaksi finansial maupun nonfinansial, seperti pembentukan modal tetap

bruto, kredit, saham, surat berharga jangka panjang, dan sebagainya. Sedangkan **kolom** pada matriks NAD menunjukkan pembagian sektor-sektor institusi. Setiap sektor institusi mempunyai dua kolom yaitu **kolom penggunaan** dan **kolom sumber**. **Kolom penggunaan** digunakan untuk mencatat semua perubahan (arus) aset (harta) baik aset finansial maupun aset nonfinansial, sedangkan **kolom sumber** digunakan untuk mencatat perubahan (arus) kewajiban finansial dan ekuiti.

NAD dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan perumusan kebijakan khususnya di bidang ekonomi dan moneter. NAD juga dapat dipakai untuk melengkapi penyusunan Sistem Neraca Nasional serta Sistem Neraca Sosial Ekonomi Finansial (SNSEF). NAD merupakan sistem data tertutup yang di dalamnya melibatkan sektor luar negeri. Sebagai suatu sistem data tertutup berlaku bahwa setiap perubahan harta di suatu sektor akan diikuti perubahan kewajiban dalam jumlah yang sama di sektor yang lain. Dengan demikian, untuk masing-masing kategori transaksi berlaku identitas baris yang menunjukkan bahwa jumlah arus penggunaan dana (kenaikan harta) sama besarnya dengan jumlah arus sumber dana (kenaikan kewajiban finansial) untuk ekonomi secara keseluruhan. Pada masing-masing sektor berlaku identitas kolom yang menunjukkan bahwa jumlah perubahan harta akan sama dengan perubahan kewajiban ditambah perubahan ekuiti.

Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2014

Kondisi perekonomian makro Indonesia, khususnya ekonomi finansial selama tahun 2010 hingga 2014 dapat dideteksi melalui matrik NAD 2010-2014. Beberapa indikator utama yang dapat diketahui dari matrik NAD dalam hubungannya dengan gambaran perekonomian makro Indonesia adalah tabungan bruto, investasi nonfinansial, Saving Investment Gap (S-I gap), dan investasi finansial. Kondisi perekonomian makro Indonesia, khususnya ekonomi finansial selama tahun 2010 hingga 2014 dapat dideteksi melalui matrik NAD 2010-2014. Beberapa indikator utama yang dapat diketahui dari matrik NAD dalam hubungannya dengan gambaran perekonomian makro Indonesia adalah tabungan bruto, investasi nonfinansial, Saving Investment Gap (S-I gap), dan investasi finansial.

Perekonomian global pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 3,3 persen (y-on-y) relatif sama dengan pertumbuhan tahun 2013. Sementara itu, ekonomi Indonesia melambat dengan pertumbuhan 5,02 persen (c-to-c). Padahal pada tahun 2013 Indonesia mampu mencapai angka 5,58 persen (c-to-c). Perlambatan tersebut dipicu oleh melambatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM serta adanya kebijakan efisiensi anggaran yang memicu perlambatan pengeluaran konsumsi pemerintah. Dari sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha

dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02 persen akibat penambahan sarana dan prasarana telekomunikasi, seperti jumlah BTS, layanan data 4G LTE dan modernisasi jaringan. Sedangkan inflasi umum mencapai 8,36 persen (tahun kalender dan *y-on-y*) sampai dengan akhir Desember 2014. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,14 persen. Secara rata-rata rupiah terdepresiasi sebesar 12 persen dari Rp 10.445 per dolar AS pada tahun 2013 menjadi Rp 11.812 per dolar AS pada tahun 2014. Pelemahan terhadap dolar AS tersebut lebih rendah dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS pada tahun sebelumnya. Pada lain pihak, di tengah dinamika perekonomian global yang kurang menguntungkan, kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2014 mengalami perbaikan akibat dari kebijakan stabilisasi Bank Indonesia yang mampu menekan defisit transaksi berjalan.

Perkembangan suku bunga (sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi pasar uang) selama tahun 2014 menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Kebijakan moneter melalui penetapan BI rate direspon dengan baik oleh suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang relatif tidak banyak berubah dan peningkatan pada suku bunga deposito. Secara rata-rata, suku bunga deposito pada akhir tahun 2014 (8,78 persen) lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2013 (7,69 persen). Sementara itu, kenaikan suku bunga kredit masih lambat dibandingkan suku bunga deposito. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada akhir tahun 2014 sebesar 12,9 persen sedangkan akhir tahun 2013 sebesar 12,4 persen.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum pada tahun 2014 tumbuh melambat sebesar 12,30 persen (*y-on-y*) jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 13,60 persen. Meskipun demikian, kredit yang disalurkan pada Desember tahun 2014 mencapai Rp 3.674,31 triliun atau tumbuh sebesar 11,58 persen (*y-on-y*). Sementara itu, kinerja Bank Umum berdasarkan rasio keuangan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) terjaga baik. Kinerja Bank Umum yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2014 yang berada jauh di atas cadangan minimum 8 persen dan rendahnya rasio kredit bermasalah (NPL) gross yang di bawah 5 persen.

Sejalan dengan kinerja Bank Umum, kondisi pasar saham domestik menunjukkan peningkatan kinerja selama tahun 2014. Sejak awal tahun 2014 tren IHSG menunjukkan penguatan di hampir seluruh sektor walaupun sempat tertahan saat pelaksanaan Pemilihan Presiden pada pertengahan tahun 2014. Pada akhir tahun 2014 IHSG tercatat pada level 5.226,95 meningkat 22,3 persen dibandingkan pada akhir tahun 2013 yang tercatat pada level 4.274,2. Secara sektoral, penguatan terbesar terjadi pada sektor properti sebesar 55,8 persen, kemudian diikuti sektor keuangan sebesar 35,4 persen. Sedangkan sektor yang mengalami

pelemahan adalah sektor pertambangan sebesar minus 4,2 persen sejalan dengan penurunan harga pada komoditas pertambangan. Sementara itu, kinerja pasar obligasi selama tahun 2014 tercatat mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan melalui penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat pada akhir tahun 2014 sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 8,45 persen. Namun kondisi berbeda terjadi pada pasar obligasi korporasi, penerbitan obligasi korporasi selama tahun 2014 tercatat Rp 47,82 triliun menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 55,3 triliun.

Perkembangan Tabungan Bruto

Selama kurun waktu 2010-2014, tabungan bruto menurut sektor memperlihatkan kecenderungan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 11,34 persen. Secara sektoral, sektor perusahaan (swasta dan perusahaan pemerintah) mengalami peningkatan tabungan bruto yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya selama periode tersebut. Sebaliknya, peningkatan tabungan bruto sektor Keuangan dan Luar Negeri paling rendah. Secara keseluruhan, sektor yang memiliki peranan yang paling dominan dalam pembentukan tabungan bruto adalah sektor perusahaan. Dalam pembentukan tabungan bruto, rata-rata kontribusi sektor ini mencapai 58,37persen.

Jika melihat struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di masing-masing sektor, seluruh sektor cenderung berfluktuatif. Selama periode 2010-2014, sektor bukan keuangan masih memegang persentase terbesar. Sektor pemerintah yang merupakan bagian dari sektor Bukan Keuangan adalah sektor yang strukturnya cukup berfluktuatif. Kontribusi terbesar ada pada sektor Perusahaan terutama sektor Perusahaan Swasta. Selama periode tersebut, persentase pada sektor Perusahaan berkisar antara 17,11 persen (tahun 2014) hingga 19,78 persen (tahun 2010).

Perkembangan Investasi

Pada umumnya peran investasi non finansial lebih dominan dibandingkan dengan investasifinansial. Pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan investasi non finansial terhadap total investasi mencapai 53,81 persen. Tahun 2014 kontribusinya naik menjadi 56,55 persen. Kenaikan kontribusi investasi non finansial pada tahun 2014 disebabkan terjadi penurunan pada kontribusi investasi finansial yaitu dari 46,19 persen di tahun 2013 menjadi 43,45 persen ditahun 2014.

Selama periode 2010-2014 nilai investasi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Kenaikan total investasi didukung oleh kenaikan investasi non finansial yang ditunjukkan dengan trennya yang terus meningkat. Namun, di beberapa periode

pertumbuhan investasi non finansial sempat mengalami perlambatan seperti yang terjadi di tahun 2011 dan 2013 (grafik 4.3). Pada tahun 2011 pertumbuhan investasi non finansial ini hanya sebesar 14,5 persen jauh di bawah tahun sebelumnya yang sebesar 29,9 persen. Begitu pula di tahun 2013, pertumbuhannya yang sebesar 7,3 persen mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 17,0 persen. Penurunan investasi non finansial di tahun 2011 lebih banyak disebabkan menurunnya investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan dalam negeri, alat angkutan dalam negeri, dan barang lainnya dari dalam negeri.

Investasi finansial sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian global. Ketika terjadi krisis ekonomi global yang mengancam pada tahun 2010 dan melanda kawasan Eropa dan Amerika Serikat di tahun 2011, investasi finansial Indonesia tertekan sehingga terjadi kontraksi -5,4 persen di tahun 2011. Kondisi tersebut sedikit membaik di tahun berikutnya dimana investasi finansial mengalami pertumbuhan sebesar 33,6 persen. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kontraksi sebesar -33,4 persen dan kembali naik di tahun 2014 sebesar 0,8 persen

Perkembangan Celah Tabungan dan Investasi (*S-I Gap*)

S-I Gap (Saving Investment Gap) dapat menggambarkan kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (*netlending*) atau memperoleh hutang dari sektor lain (*netborrowing*) dalam membiayai investasi nonfinansialnya. Dalam kaitan dengan sektor Luar Negeri (LN), jika *S-I Gap* sektor ini negatif berarti sektor LN memperoleh pinjaman dari sektor domestik. Dalam hal ini, sektor domestik mengalami *net lending*, begitu pula sebaliknya. Selama tahun 2010-2014, sektor Perusahaan senantiasa mengalami *netborrowing*. Kekurangan dana tersebut disediakan oleh sektor domestik, terutama sektor Rumah Tanggadan Keuangan yang merupakan sektor surplus. Secara keseluruhan, selama tahun 2010-2014 sektor domestik selalu mengalami *netborrowing*.

Perkembangan Investasi Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Peran intermediasi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LKBB cukup strategis dan berpotensi besar dalam memengaruhi terjadinya transaksi finansial secara keseluruhan. Selama tahun 2014, tabungan bruto yang tercipta oleh LKBB yaitu sebesar Rp37,29 triliun atau 1,02 persen dari total tabungan bruto nasional. Tabungan bruto tersebut lebih kecil dibandingkan tabungan bruto yang terjadi pada tahun sebelumnya (Rp 45,49 triliun). Pada saat yang sama, selama tahun 2014 investasi nonfinansialnya meningkat sebesar Rp 19,80 triliun. Akibat kenaikan investasi nonfinansial tersebut, pinjaman neto (*S-I gap*) sektor LKBB turun sebesar Rp 17,48 triliun. Secara tidak langsung, penurunan tabungan bruto LKBB merupakan akibat dari menurunnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan kinerja

perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian pada tahun 2014. Jika diamati dari kinerja sektoralnya, sebagian besar tabungan bruto sektor LKBB berasal dari Perusahaan Asuransi yang kontribusinya mencapai 57,84 persen dari total tabungan bruto LKBB.

Proporsi *S-I gap* tertinggi pada LKBB tahun 2014 terjadi pada Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun masing-masing sebesar 44,78 persen dan 25,15 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Perusahaan Asuransi mengalami penurunan proporsi *S-I gap* sebesar 15,97 persen, sedangkan proporsi *S-I gap* Dana Pensiun meningkat sebesar 25,35 persen. Penurunan *S-I gap* Perusahaan Asuransi terjadi karena tabungan brutonya mengalami penurunan sedangkan investasi nonfinansialnya mengalami peningkatan yang besar, sebaliknya pada Dana Pensiun peningkatan tabungan brutonya lebih besar dibandingkan peningkatan investasi nonfinansial sehingga *S-I gap* meningkat.

Hampir sebagian besar, aset yang dimiliki LKBB adalah dalam bentuk aset finansial. Selama tahun 2014, LKBB menambah investasi finansialnya dalam berbagai instrumen sebesar Rp 98,69 triliun. Selain menambah investasi finansialnya, sektor ini juga mengurangi investasi finansialnya di beberapa instrumen yaitu sebesar Rp 1,07 triliun. Secara neto, masih terjadi penambahan pada investasi finansial yaitu sebesar Rp 97,61 triliun. Penambahan aset finansial didominasi oleh penambahan instrumen finansial berupa uang dan simpanan (Rp 43,93 triliun), diikuti kredit (Rp 26,00 triliun), modal saham dan penyertaan (Rp 9,66 triliun) serta surat berharga jangka pendek (Rp 5,44 triliun). Sedangkan, sektor LKBB mengurangi aset finansialnya pada surat berharga jangka panjang (Rp 1,07 triliun).

Dari segi pembiayaan investasi, sektor-sektor LKBB menggunakan berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sumber pembiayaan internal berasal dari *S-I gap*, sedangkan sumber eksternalnya berasal dari transaksi di pasar keuangan. Sumber pembiayaan eksternal ini akan menjadi kewajiban bagi LKBB. Selama tahun 2014, LKBB mampu mendapatkan sumber dana eksternal sebesar Rp 98,81 triliun. Sebagian besar sumber dana eksternal tersebut adalah cadangan asuransi dan pensiun (Rp 52,72 triliun), kredit (Rp 17,10 triliun) dan surat berharga jangka panjang (Rp 0,56 triliun). Peningkatan cadangan asuransi dan pensiun terutama terjadi pada Perusahaan Asuransi (Rp 28,67 triliun) dan Perusahaan Dana Pensiun (Rp 24,05 triliun). Peningkatan kredit masing-masing terjadi pada Perusahaan Asuransi (Rp 3,76 triliun), Perusahaan Pembiayaan (Rp 12,77 triliun), Pegadaian (Rp 0,33 triliun) dan Perusahaan Dana Pensiun (Rp 0,24 triliun). Sedangkan, peningkatan surat berharga jangka panjang terutama terjadi pada Pegadaian (Rp 0,55 triliun).

Perkembangan Uang Beredar

Pada tahun 2010-2014, posisi M2 pada suatu periode sangat dipengaruhi oleh posisi uang kuasi. Selama periode 2010-2014 kontribusi uang kuasi terhadap pembentukan M2 rata-rata sebesar 75,25 persen. Kontribusi lainnya ditentukan oleh M1 yang rata-rata kontribusinya terhadap M2 sebesar 24,29 persen, dan sisanya sebesar 0,46 persen berasal dari surat berharga selain saham. Pertumbuhan uang kuasi meningkat lebih pesat dibandingkan pertumbuhan M1. Selama periode 2010-2014, uang kuasi tumbuh rata-rata sebesar 14,62 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan M1 yang rata-rata tumbuh sebesar 12,96 persen. Hal ini mencerminkan bahwa uang kuasi lebih diminati untuk dimiliki oleh masyarakat dibandingkan uang kuasi.

Velocity of Money dan Financial Deepening Indonesia

Gambaran lain yang menunjukkan keadaan perekonomian nasional dalam kaitannya dengan uang beredar adalah pendalaman sektor Keuangan (*financial deepening*) dan percepatan perputaran uang beredar (*velocity of money*). Sektor Keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (*shallow*) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. Masih dangkalnya sektor Keuangan Indonesia tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. Pada akhir tahun 2010, rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah selama periode 2010 – 2014 yaitu sebesar 36,00 persen. Namun, seiring dengan berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah, rasio tersebut sedikit demi sedikit mengalami peningkatan. Terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan dangkalnya sektor Keuangan Indonesia, yakni (i) rendahnya intermediasi yang dilakukan oleh institusi-institusi di sektor Keuangan, (ii) rendahnya pemanfaatan pasar modal dalam pembiayaan investasi, dan (iii) terbatasnya instrumen investasi di pasar keuangan Indonesia.

Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2010-2014 menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 selama periode tersebut yang hanya berada di kisaran angka 10 sampai 11 persen. Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi selama tahun 2010-2014 disebabkan pertumbuhan yang terjadi pada kedua variabel tersebut sangat berfluktuasi serta tidak sejalan antara satu dengan lainnya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan investasi sangat dirasakan oleh semua sektor produksi guna memperbesar penciptaan nilai tambah dan memacu laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan investasi tersebut, berbagai dana diperlukan guna membiayainya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, seperti pinjaman dan hibah. Proses pembiayaan investasi dalam pelaksanaannya memerlukan peran lembaga-lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan lainnya sebagai perantara yang menghubungkan penyedia dana (selanjutnya disebut sebagai sektor surplus) dengan sektor yang membutuhkan dana (sektor defisit)¹. Pada masa lalu, peranan lembaga keuangan ini kurang begitu menonjol. Sedangkan di lain pihak, penyedia dana hanya melakukan investasi finansialnya pada instrumen-instrumen yang masih terbatas seperti tabungan dan deposito. Akibatnya, belum semua dana digunakan secara optimal untuk pembiayaan investasi. Sementara itu, sektor produksi (investor) masih mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber dananya.

Melihat kenyataan tersebut, sejak permulaan dasawarsa 1980, pemerintah mulai melakukan reformasi ekonomi khususnya di bidang perbankan, misalnya penentuan tingkat suku bunga. Dengan demikian, pemilik dana dapat melakukan investasi finansial dengan pilihan yang lebih luas dan menarik. Di samping itu, dengan meningkatnya kegiatan pasar modal yang ditunjukkan oleh makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang "go-public", menyebabkan para pemilik dana mempunyai alternatif tambahan dalam berinvestasi finansial yang bersifat langsung yaitu dengan cara membeli saham dan sertifikat di pasar modal. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi sekarang ini, arus finansial dari sektor surplus ke sektor defisit melalui instrumen-instrumen yang ada menjadi tidak sederhana lagi. Perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam sektor finansial ini perlu dicatat dan dipantau secara berkala dalam satu sistem data yang lengkap, komprehensif, dan konsisten, sehingga berguna sebagai masukan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan moneter secara lebih tepat. Sistem data tersebut selanjutnya disebut Neraca Arus Dana (NAD).

Selama ini, sistem data mengenai statistik produksi dan distribusi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian nasional (sektor riil) telah disajikan secara berkala baik dalam

¹Dalam kaitan neraca arus dana, sektor surplus merupakan sektor yang memiliki tabungan lebih besar dari kebutuhan investasi realnya, sebaliknya disebut sektor defisit. Selanjutnya investasi riil merupakan besarnya pembentukan modal yang dilakukan oleh masing-masing sektor.

Statistik Pendapatan Nasional, Tabel Input-Output Indonesia, maupun dalam bentuk neraca-neraca lainnya². Sebagian besar neraca-neraca ini hanya menggambarkan besarnya produksi, nilai tambah, pengeluaran konsumsi, dan pembentukan modal yang terjadi di masing-masing sektor. Gambaran mengenai bagaimana sektor-sektor ini memperoleh dan memanfaatkan tabungannya, baik untuk membiayai investasi riil maupun untuk investasi finansial belum tercakup di dalam sistem tersebut. Demikian pula sektor-sektor yang terpaksa melakukan pinjaman untuk membiayai investasi riil karena tabungannya tidak memadai, serta jenis-jenis instrumen finansial apa yang digunakan untuk melakukan pinjaman tersebut belum tergambarkan dalam neraca-neraca di atas. Neraca Arus Dana mencoba mencatat seluruh transaksi ini dari sisi finansialnya, sehingga arus finansial yang terjadi dari sektor surplus ke sektor defisit dapat tergambarkan. Arus finansial tersebut akan merefleksikan perubahan harta dan kewajiban finansial melalui perubahan instrumen-instrumen seperti tabungan, pembelian saham, perubahan uang kas, hutang, piutang dan sebagainya.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan di atas, pada tahun 1987, Badan Pusat Statistik telah membuat suatu studi mengenai *Neraca Arus Dana Indonesia* untuk tahun 1980. Usaha ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan NAD yang sebenarnya walaupun data yang digunakan masih sangat terbatas. Pada tahun 1991, NAD Indonesia 1984-1988 telah berhasil disusun untuk pertama kalinya yang merupakan hasil kerja Tim Teknis yang terdiri dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Untuk menghasilkan publikasi tersebut, Tim Teknis telah bekerja selama lebih kurang dua tahun dengan dukungan biaya dan konsultan dari Bank Dunia/IBRD.

Berdasarkan pengalaman penyusunan tersebut, kini Tim Teknis telah dapat menyusun NAD Indonesia secara berkala. Publikasi NAD ke-26 ini mencakup periode 2010-2014 yang merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Pada masa mendatang, usaha untuk memperbaiki sistem NAD baik dari segi mutu maupun analisisnya terus dikembangkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana telah disebutkan bahwa publikasi Neraca Arus Dana Indonesia 2008-2013 merupakan publikasi keduapuluhtiga yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik sebagai realisasi dari hasil kerja Tim Penyusun NAD Indonesia. Penerbitan publikasi ini mempunyai tujuan antara lain:

²Keseluruhan neraca tersebut dibuat berdasarkan Sistem Neraca Nasional (SNA), yang disarankan oleh PBB, United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No. 2, New York 1968.

- a. Memperkenalkan wawasan penggunaan sistem data makro yang berkaitan dengan arus penyediaan dan penggunaan dana antar sektor.
- b. Melengkapi sistem data neraca nasional yang selama ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh Badan Pusat Statistik.
- c. Menyebarluaskan data dan informasi yang terdapat di dalam neraca arus dana sebagai bahan referensi bagi para pengguna data khususnya di bidang ekonomi moneter.
- d. Menyajikan analisis deskriptif yang berkaitan dengan neraca pembiayaan sektoral, keterkaitan finansial antar sektor, *velocity of income*, dan penyebab "*financial deepening*" berdasarkan data NAD 2010-2014.
- e. Dasar untuk bahan perbaikan dan penyempurnaan penyusunan NAD Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang.

1.3 Sistematika Penulisan

Penulisan NAD tahunan ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

- Bab I: Pendahuluan, menguraikan permasalahan yang melatarbelakangi tulisan ini, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II: Kerangka Teori Neraca Arus Dana, menguraikan mengenai definisi dan kerangka teori NAD. Selain itu, dijelaskan pula hubungan NAD dengan sistem neraca nasional. Kegunaan dan keterbatasan NAD akan dijelaskan pula di akhir bab ini.
- Bab III: Neraca Arus Dana Indonesia, membahas mengenai kerangka NAD Indonesia, sumber data, dan metode penyusunan.
- Bab IV: Analisis Deskriptif Neraca Arus Dana Indonesia, menguraikan secara deskriptif mengenai Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2014, Perkembangan Tabungan Bruto, Perkembangan Investasi, Tinjauan NAD Sektor Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) 2014, Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*) dan Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*).

<http://www.bps.go.id>

BAB II KERANGKA TEORI NERACA ARUS DANA

2.1 Penjelasan Umum

Neraca Arus Dana (NAD) merupakan suatu sistem data yang dirancang untuk memperlihatkan transaksi finansial³ antar berbagai sektor ekonomi, misalnya: pemerintah, perusahaan pemerintah, asuransi, bank umum, perusahaan swasta nonfinansial, dan sebagainya. Setiap sektor dalam NAD memiliki seperangkat sumber dan penggunaan dana yang dibentuk oleh adanya pembelian dan penjualan berbagai jenis instrumen finansial, seperti: deposito, obligasi, pinjaman, dan sebagainya. Instrumen finansial ini merupakan komponen harta atau kewajiban finansial dari masing-masing sektor. Karena memasukkan sektor luar negeri sebagai salah satu sektornya, maka disebut juga sebagai sistem yang terbuka untuk setiap transaksi. Dengan kata lain, setiap pembelian instrumen finansial pada suatu sektor akan menjadi penjualan di sektor lain. NAD juga dapat dilihat sebagai suatu perangkat data yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana tabungan dihubungkan dengan sektor-sektor surplus dan defisit.

NAD merupakan salah satu bagian dari sistem neraca nasional. Sistem ini mencakup semua neraca yang menggambarkan seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam bentuk terpadu (*integrated accounts*). Termasuk dalam sistem ini adalah neraca pendapatan nasional, neraca pembayaran, tabel input-output, dan neraca sosial ekonomi. Seluruh neraca-neraca itu menggambarkan berbagai ragam aspek kegiatan ekonomi. Neraca pendapatan nasional dan tabel input-output menggambarkan kegiatan produksi atau pembelian dan penjualan barang dan jasa sehingga dikenal juga dengan sebutan neraca riil. Sedangkan NAD sebagai neraca modal dalam neraca pembayaran menunjukkan neraca keuangan yang memungkinkan terjadinya kegiatan di sektor riil.

Bab ini menjelaskan secara umum kerangka teori dan cara penyusunan NAD. Selain itu, akan diuraikan pula kedudukan NAD dalam sistem neraca nasional. Bagi para pengguna NAD, diberikan pula uraian tentang kegunaan NAD untuk perencanaan dan analisis ekonomi makro. Sedangkan pada akhir bab ini diuraikan beberapa masalah dan keterbatasan NAD.

³Transaksi Finansial adalah transaksi yang dicerminkan oleh instrumen-instrumen finansial dalam neraca akhir tahun.

2.2 Kerangka Teori NAD

Secara sederhana, NAD menggambarkan bagaimana tabungan dalam perekonomian digunakan untuk membiayai investasi. Dalam ekonomi makro, ada satu persamaan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan tabungan sama dengan investasi, tetapi persamaan ini tidak berlaku untuk masing-masing sektor ekonomi secara terpisah. Untuk ekonomi secara keseluruhan, pendapatan (Y) sama dengan konsumsi (C) ditambah investasi (I) atau $Y = C + I$. Jika tabungan (S) didefinisikan sebagai $S = Y - C$, maka $S = I$. Umumnya, pendapatan sektor Rumah Tangga secara makro selalu lebih besar dari pengeluaran. Sebaliknya, sektor Swasta Non-Finansial selalu defisit. Dengan demikian, sektor Swasta Non-Finansial harus meminjam dari sektor Rumah Tangga. Sektor lainnya, misalnya Bank, merupakan perantara keuangan yang menghimpun dana dari beberapa sektor dan menyalurkannya ke sektor lain. NAD menyediakan data keuangan secara rinci mengenai pinjam-meminjam tersebut melalui berbagai instrumen finansial.

Data NAD biasanya disajikan dalam bentuk matriks. Kolomnya menggambarkan sektor dan barisnya menggambarkan berbagai jenis instrumen finansial. Setiap sektor mempunyai dua kolom, yaitu kolom pertama menunjukkan perubahan harta (penggunaan dana) dan kolom kedua menyatakan perubahan kewajiban (sumber dana). Kenaikan jumlah harta maupun kewajiban suatu sektor dicerminkan oleh arus finansial positif. Sebaliknya, penurunan harta atau kewajiban ditunjukkan oleh arus finansial negatif. Arus tersebut menunjukkan konsep "*net*" dalam pengertian bahwa suatu sektor dapat mempunyai arus yang berasal dari transaksi bulanan, harian, dan mungkin untuk instrumen finansial tertentu dapat terjadi setiap saat. NAD hanya mencatat perubahan dalam setahun. Secara sederhana, konsep *net* semacam ini diperoleh dengan cara mengurangkan neraca akhir dan awal tahun dengan mengabaikan masalah revaluasi.

Tabel 2.1 menggambarkan contoh NAD yang disederhanakan. Dalam contoh ini, ada lima sektor yang ditampilkan yaitu sektor Keuangan, Rumah Tangga, Pemerintah, Bisnis, dan Luar Negeri. Sektor Luar Negeri memperlihatkan transaksi antara bukan penduduk dan penduduk Indonesia. Selain itu, dalam contoh ini hanya mencantumkan beberapa jenis kategori transaksi.

TABEL 2.1 NERACA ARUS DANA SEDERHANA
(Triliun Rupiah)

TRANSAKSI		KEUANGAN		RUMAH TANGGA		PEMERINTAH		BISNIS		LUAR NEGERI		TOTAL	
		P	S	P	S	P	S	P	S	P	S	P	S
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0100	Tabungan Bruto		1		19		6		15		3		44
0200	Perolehan Barang Modal	1		9		8		26		0		44	
0300	Pinjaman Neto	0		10		-2		11		3		0	
0400	Selisih Statistik	0		2		-1		0		-1		0	
0500	Inv. Finansial Neto	0		8		-1		11		4		0	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	14		12		5		13		16		60	
0700	Jumlah Sumber Finansial		14		4		6		24		12		60
0800	Cadangan Valas		1							1		1	1
1000	Deposito		6	3		3		1		-1		6	6
1100	Surat Berharga (Jangka Pendek)	1	3			1		1				3	3
1200	Pinjaman	13			4		4	6	11	10	24	24	
1300	Modal dan Penyertaan			2		1		4	1		4	4	
1400	Surat Berharga (Jangka Panjang)						-1			-1		-1	-1
1500	Cadangan Asuransi dan Pensiun		2	2								2	2
1800	Kredit Dagang							11	10	1	2	12	12
9000	Rupa-rupa		2	5			3	4	4	4		9	9

Keterangan : P = Penggunaan, dan S = Sumber

Pemahaman data pada tabel 2.1 dapat dilakukan secara sederhana. Sektor Rumah Tangga mempunyai kelebihan pendapatan atas pengeluarannya, sehingga menghasilkan tabungan bruto sebesar 19 triliun rupiah, sedangkan tabungan bruto sektor Pemerintah hanya sebesar 6 triliun rupiah. Sektor Rumah Tangga, melakukan investasi atau pengeluaran untuk pembentukan modal sebesar 9 triliun rupiah, sisanya dipinjamkan kepada sektor lain yang tercermin pada kewajiban di sektor-sektor lain. Penambahan harta finansial di sektor Rumah Tangga berupa Deposito, Modal dan Penyertaan, Cadangan Asuransi dan Pensiun, serta Rupa-rupa masing-masing sebesar 3, 2, 2, dan 5 triliun rupiah. Keseluruhan tambahan harta di sektor Rumah Tangga atau jumlah penggunaan finansial mencapai jumlah 12 triliun rupiah. Pada saat yang bersamaan rumah tangga menambah kewajiban finansialnya berupa pinjaman sebesar 4 triliun rupiah. Berdasarkan persamaan akuntansi, Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto, karena Pinjaman merupakan tagihan pada sektor lain. Adanya selisih statistik disebabkan karena kedua kategori tersebut diestimasi dari sumber data yang berbeda. Pinjaman Neto diperoleh dari neraca riil, sedangkan Investasi Finansial Neto dari neraca finansial. Pada tabel 2.1 untuk sektor Rumah Tangga tampak bahwa Pinjaman Neto sebesar 10 triliun rupiah dan Investasi Finansial neto 8 triliun rupiah, atau terdapat selisih statistik sebesar 2 triliun rupiah. Perilaku sektor Bisnis berbeda dengan Rumah

Tangga. Sektor ini memperoleh dana dari hasil operasinya berupa laba ditahan dan penyusutan, yang menghasilkan Tabungan Bruto sebesar 15 triliun rupiah. Pembentukan Modal sektor Bisnis sebesar 26 triliun rupiah melebihi dana yang diperoleh dari tabungannya. Akibatnya sektor ini harus menutupi kekurangan sumber dana finansialnya sebesar 11 triliun rupiah. Kenyataan ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah kewajiban finansial sebesar 24 triliun rupiah. Sebagian dari dana tersebut (13 triliun rupiah) digunakan untuk membeli harta finansial dan sisanya sebesar 11 triliun rupiah merupakan pinjaman neto. Pada tabel 2.1 tampak bahwa untuk sektor Bisnis, Pinjaman Neto sama dengan Investasi Finansial Neto, sehingga selisih statistiknya sama dengan nol.

Sektor Keuangan biasanya tidak banyak menghasilkan dana sendiri dalam melakukan kegiatan usahanya, tetapi peranan sektor ini sangat besar bagi kegiatan pasar finansial, khususnya bertindak sebagai perantara dalam menyalurkan dana dari sektor surplus ke sektor defisit. Dalam tabel 2.1 terlihat bahwa sektor ini hanya menghasilkan dana dari kegiatannya berupa Tabungan Bruto sebanyak 1 triliun rupiah, sama dengan penggunaan untuk pembentukan modal, sehingga pinjaman netonya sama dengan nol. Namun jumlah penambahan harta finansial sektor Keuangan cukup besar, yaitu sebesar 14 triliun rupiah yang berasal dari surat berharga jangka pendek sebesar 1 triliun rupiah dan pinjaman sebesar 13 triliun rupiah. Sumber dana atau penambahan jumlah kewajibannya juga sebesar 14 triliun rupiah yang merupakan penambahan kewajiban Deposito sebesar 6 triliun rupiah dan sisanya 8 triliun rupiah merupakan gabungan dari jenis kewajiban lainnya. Perbedaan antara penambahan harta dan kewajiban sama dengan nol, begitu pula Pinjaman Neto dan selisih statistiknya.

Pemerintah menjalankan kegiatannya dengan surplus berjalan sebesar 6 triliun rupiah, tetapi melakukan investasi harta nonfinansial (pembentukan modal) sejumlah 8 triliun rupiah, sehingga pemerintah membutuhkan pinjaman sebesar 2 triliun rupiah. Dari sisi kewajiban (sumber), sektor ini menambah pinjamannya sebesar 4 triliun rupiah dan 3 triliun rupiah berupa kewajiban lainnya. Di samping itu, terjadi pula penerimaan kembali Obligasi Pemerintah yang menyebabkan penurunan kewajiban sebesar 1 triliun rupiah. Dengan demikian jumlah seluruh penambahan kewajiban sektor Pemerintah menjadi 6 triliun rupiah. Kalau dilihat dari sisi harta (penggunaan), jumlah penggunaan finansialnya sebesar 5 triliun rupiah yang terdiri penambahan Deposito, Surat Berharga Jangka Pendek, dan Penyertaan Modal. Perbedaan antara jumlah penggunaan dan sumber finansial adalah 5 triliun rupiah – 6 triliun rupiah = minus 1 triliun rupiah. Pada hal Pinjamam Netonya minus 2 triliun rupiah, sehingga menimbulkan selisih statistik minus 1 triliun rupiah.

Sektor Luar Negeri sebenarnya memperlihatkan beberapa bagian dari neraca pembayaran Indonesia yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk NAD. Defisit neraca berjalan Indonesia dengan luar negeri sebesar 3 triliun rupiah (lihat Tabel 2.1). Angka ini menunjukkan surplus sebesar 3 triliun rupiah dari sudut pandang luar negeri dan besaran ini dimasukkan pula ke dalam kategori Tabungan Bruto, karena dalam NAD, sektor ini tidak mempunyai investasi riil. Dalam NAD, sektor Luar Negeri mempunyai klaim finansial atas modal fisik, tidak dalam pembentukan modal secara langsung, sehingga nilainya sama dengan nol. Pada sisi penggunaan, sektor ini meningkatkan jumlah harta finansialnya sebesar 16 triliun rupiah, dengan komponen terbesar berbentuk pinjaman sejumlah 11 triliun rupiah. Sebaliknya jumlah sumber finansialnya atau penambahan kewajiban terhadap Indonesia sejumlah 12 triliun rupiah. Dengan demikian investasi finansial netonya $16 - 12 = 4$ triliun rupiah tidak sama dengan Pinjaman Netonya (3 triliun rupiah), sehingga terjadi selisih statistik sejumlah 1 triliun rupiah.

Dua kolom terakhir memperlihatkan jumlah masing-masing kategori transaksi. Jika dibaca menurut baris menunjukkan jumlah transaksi masing-masing jenis instrumen finansial dalam periode bersangkutan. Satu instrumen finansial dicatat dua kali, satu sebagai harta dan satu lagi sebagai kewajiban. Dengan kata lain, setiap harta finansial suatu sektor merupakan kewajiban finansial sektor lainnya. Sebagai contoh jumlah seluruh harta berupa pinjaman yang diberikan sama dengan jumlah seluruh pinjaman yang diterima (kewajiban) oleh seluruh sektor, yaitu sebesar 24 triliun rupiah (ditunjukkan dalam Tabel 2.1 pada dua kolom terakhir untuk baris pinjaman). Hal yang sama dapat pula dilihat untuk kategori transaksi lainnya. Dua kolom terakhir ini juga menunjukkan bahwa jumlah tabungan bruto sama dengan jumlah perolehan harta non finansial atau investasi riil sebesar 44 triliun rupiah.

Dari uraian di atas tampak adanya keterkaitan antar sektor yang disajikan dalam matriks NAD. Misalnya Deposito, yang merupakan kewajiban sektor keuangan meningkat sebesar 6 triliun rupiah. Peningkatan kewajiban sektor ini harus diimbangi dengan peningkatan pemilikan harta pada instrumen yang sama oleh sektor-sektor lainnya. Pada tabel 2.1, jika dibaca sepanjang baris deposito, tampak bahwa sektor Rumah Tangga dan Pemerintah menambah hartanya masing-masing sebesar 3 triliun rupiah, sektor Bisnis menambah 1 triliun rupiah, sedangkan sektor Luar Negeri menurunkan hartanya sebanyak 1 triliun rupiah.

Berdasarkan kerangka NAD dalam beberapa kasus memungkinkan untuk melihat keterkaitan sektor pada dua sisi transaksinya. Misalnya (tidak tampak dalam Tabel 2.1), Ccadangan Aasuransi Jiwa hanya boleh menjadi kewajiban (sisi sumber) sektor Asuransi dan

sebaliknya merupakan harta (sisi penggunaan) bagi sektor Rumah Tangga. Ternyata hubungan semacam ini tidak seluruhnya dapat ditangkap dalam penyajian NAD⁴. Jika tabel 2.1 diperhatikan kembali, kenaikan harta berupa modal pada sektor Rumah Tangga sebesar 2 triliun rupiah mungkin berasal dari Modal Saham tahun yang lalu dan Modal yang disimpan oleh sektor Keuangan atau benar-benar dari saham perusahaan yang baru dikeluarkan atau mungkin juga kombinasi dari keduanya.

2.3 Neraca Arus Dana dalam Sistem Neraca Nasional

Pada sistem neraca nasional (*Integrated System of National Accounts*) setidaknya menyajikan 4 (empat) neraca pokok yaitu: neraca produksi, neraca pendapatan dan pengeluaran, neraca modal dan neraca luar negeri. Neraca produksi memperlihatkan bagaimana nilai tambah diciptakan oleh ekonomi, baik menurut lapangan usaha maupun menurut komponen penggunaannya. Neraca pendapatan dan pengeluaran memperlihatkan besarnya tabungan yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya neraca modal memperlihatkan berapa besar kemampuan tabungan dalam membiayai pembentukan modal dan berapa pinjaman neto yang harus dilakukan. Sedangkan neraca luar negeri memperlihatkan transaksi dengan Luar Negeri, baik dalam bentuk barang dan jasa (ekspor dan impor) maupun dalam bentuk pinjaman dan transfer modal.

Bila sistem neraca nasional dikaitkan dengan sistem neraca arus dana, maka ada dua neraca yang mempunyai hubungan erat, yaitu neraca pendapatan dan pengeluaran dengan neraca modal. Dari neraca pendapatan dan pengeluaran dapat diturunkan Tabungan Bruto, sedangkan dari neraca modal dapat diturunkan Pembentukan Modal Tetap dan Pinjaman Neto. Dalam NAD, pinjaman neto ini kemudian diterjemahkan dalam bentuk perubahan instrumen-instrumen baik di sisi penggunaan maupun sumber.

Neraca Pendapatan dan Pengeluaran (*Income and Outlay Accounts*) pada intinya merupakan gabungan dari neraca Pendapatan dan Pengeluaran sektoral, yang dalam beberapa hal dapat disetarakan dengan laporan rugi laba perusahaan. Pada sistem neraca ini juga berlaku suatu persamaan yang menunjukkan bahwa pengeluaran suatu sektor merupakan pendapatan di sektor lainnya. Selisih antara pendapatan dan pengeluaran sama dengan tabungan (bisa positif maupun negatif). Istilah pengeluaran yang digunakan di sini tidak termasuk pengeluaran untuk harta finansial maupun non finansial (disebut *current*

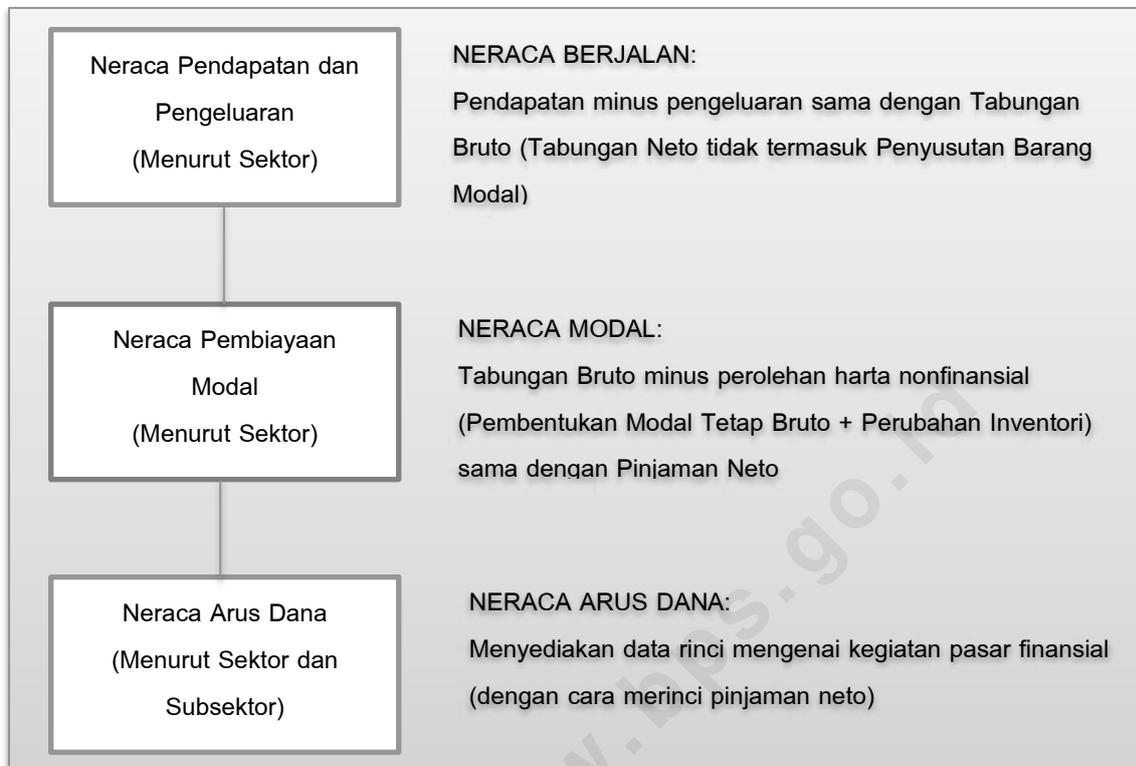
⁴Sebenarnya NAD dapat disajikan dalam dua cara. Pertama, menyajikan data mengenai sumber dan penggunaan dana menurut instrumen finansial dan sektor. Kelemahan penyajian menurut cara ini adalah tidak dapat diketahui secara langsung hubungan antar sektor atau dari siapa kepada siapa suatu instrumen finansial itu diperjual-belikan. Untuk mengatasi kelemahan ini dibuat cara penyajian kedua, yang menyajikan NAD antar sektor. Contoh penggunaannya diberikan dalam Bab IV.

expenditure). Angka tabungan yang berasal dari Neraca Pendapatan dan Pengeluaran selanjutnya dicatat pada Neraca Modal (*Capital Finance Accounts*) yang mencatat sumber dan penggunaan dana menurut rincian transaksi modal. Neraca terakhir ini mencatat Tabungan Bruto dan Pembentukan Modal Bruto atau harta riil yang terdiri dari Pembentukan Modal Tetap Bruto ditambah Perubahan Inventori. NAD juga mencatat pembelian neto barang tak berwujud, seperti: Hak Paten dan Nama Baik (*Goodwill*), walaupun data semacam itu tidak lengkap atau belum tersedia saat ini.

Jumlah sektor dalam Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, dan Neraca Modal lebih sedikit dibandingkan jumlah sektor dalam NAD, bahkan untuk beberapa negara yang sudah menyusunnya, beberapa sektor NAD hanya diwakili oleh satu sektor saja. NAD juga mempunyai kaitan dengan sistem neraca pembayaran. Dalam NAD, surplus/defisit pada neraca pembayaran adalah negatif/positif pada tabungan di sektor Luar Negeri. Bagian Neraca Modal dalam Neraca Pembayaran mencatat transaksi luar negeri menurut instrumen finansial. NAD juga mencatat hal yang serupa tetapi mungkin berbeda dalam kategori dan rinciannya.

Tujuan penyusunan NAD adalah menyediakan data rinci mengenai kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi dari beberapa sektor surplus ke beberapa sektor defisit lainnya dalam pasar finansial. Dalam terminologi ekonomi, NAD didefinisikan sebagai suatu sistem data keuangan yang menyajikan data keuangan yang rinci sekaligus konsisten dengan data dari neraca riil (tabungan dan investasi) yang berasal dari neraca pendapatan nasional. Kegiatan pasar finansial sebagian ditentukan oleh variabel-variabel dari sektor riil melalui keputusan atas besarnya tabungan dan investasi, dan sebagian lagi ditentukan oleh variabel-variabel finansial seperti tingkat suku bunga dan penawaran berbagai jenis instrumen finansial. NAD menyediakan data yang penting untuk melakukan analisis secara empiris, misalnya untuk melihat interaksi antara tabungan dan investasi, hutang dan piutang, perilaku perantara finansial, dan penentuan tingkat suku bunga.

Penjelasan lebih lanjut mengenai keterkaitan antara Neraca Pendapatan dan Pengeluaran, serta Neraca Modal dengan Neraca Arus Dana dapat digambarkan dalam bagan 1 berikut ini.

BAGAN 1**Kaitan antara Neraca Arus Dana dan Sistem Neraca Nasional**

Berdasarkan Bagan 1, dapat ditelusuri neraca berjalan yang menyajikan data mengenai rincian pendapatan dan pengeluaran masing-masing sektor. Selisih pendapatan dan pengeluaran ini menghasilkan Tabungan Bruto, karena di dalamnya masih termasuk komponen penyusutan barang modal. Dalam Neraca Modal digambarkan bagaimana barang modal dibiayai dari berbagai sumber pembiayaan. Selisih antara Tabungan Bruto yang berasal dari Neraca Pendapatan dan Pengeluaran dengan jumlah Pembentukan Barang Modal merupakan Pinjaman Neto. Nilainya bisa positif atau negatif. Selanjutnya Pinjaman Neto tersebut dalam NAD dirinci lagi ke dalam berbagai jenis instrumen finansial dan sektor pelakunya.

2.4 Hubungan Neraca Arus Dana dengan Neraca Perusahaan

Pada umumnya perusahaan mempunyai paling sedikit dua jenis laporan keuangan yaitu laporan rugi-laba dan neraca. Dalam laporan rugi-laba dicatat pendapatan dan pengeluaran berjalan selama periode tertentu, biasanya satu tahun atau satu triwulan. Sedangkan dari neraca diperoleh data mengenai harta, hutang dan modal perusahaan pada satu waktu tertentu, biasanya keadaan akhir tahun atau akhir triwulan. NAD disusun

berdasarkan data neraca, tetapi arusnya dihitung sebagai perubahan posisi finansial selama periode tertentu.

Berdasarkan persamaan akuntansi berlaku hubungan yang menyatakan bahwa jumlah harta (sisi aktiva) sama dengan jumlah kewajiban (sisi pasiva) atau kalau ditulis dalam bentuk persamaan akuntansi menjadi

$$\mathbf{HARTA = KEWAJIBAN}$$

Sisi kewajiban biasanya terdiri dari dua bagian, Hutang dan Modal. Bagian pertama merupakan kewajiban terhadap pihak ketiga dan bagian yang terakhir merupakan kewajiban terhadap pemilik modal. Dengan demikian persamaan di atas dapat diubah menjadi

$$\mathbf{HARTA = HUTANG + MODAL}$$

Dalam terminologi NAD harta selalu diklasifikasikan menjadi harta riil dan harta finansial. Harta riil mencakup semua barang modal seperti gedung, bangunan, mesin dan peralatan yang umumnya berumur lebih dari satu tahun. Untuk menjamin kelangsungan kegiatan perusahaan, maka disisihkan sebagian dana untuk mengganti barang modal tersebut di masa datang, atau penyusutan barang modal. Angka ini dicatat dengan tanda negatif di sisi harta. Dengan demikian persamaannya menjadi

$$\mathbf{HARTA RIIL + HARTA FINANSIAL - PENYUSUTAN = HUTANG + MODAL}$$

atau

$$\mathbf{HARTA RIIL (HR) + HARTA FINANSIAL (HF) = HUTANG (U) + MODAL \& PENYUSUTAN (MP)}$$

Dengan menambahkan subskrip t dan t-1 untuk menyatakan dua tahun neraca yang berurutan ke dalam persamaan di atas diperoleh dua persamaan berikut:

$$\mathbf{HR_t + HF_t = U_t + MP_t, \dots\dots\dots(1)}$$

dan

$$\mathbf{HR_{t-1} + HF_{t-1} = U_{t-1} + MP_{t-1} \dots\dots\dots (2)}$$

Jika persamaan (1) dikurangkan dengan persamaan (2) maka akan diperoleh besaran yang menunjukkan selisih dua level neraca atau arus yang terjadi pada tahun t dan diberi simbol

$$\mathbf{\Delta HR_t + \Delta HF_t = \Delta U_t + \Delta MP_t}$$

Dengan mengganti MPt dengan TBt (tabungan bruto), persamaan di atas dapat disusun kembali menjadi

$$\Delta HFt - \Delta Ut = \Delta TBt - \Delta HRt \dots\dots\dots (3)$$

Berdasarkan persamaan (3) dapat dikatakan bahwa jika perusahaan membelanjakan lebih banyak dananya untuk barang modal melebihi tabungan brutonya, maka perusahaan ini disebut sebagai peminjam (sektor defisit). Sebagai peminjam tidak berarti menghalanginya untuk membeli berbagai harta finansial atau membayar hutang. Kegiatan finansial sebenarnya merupakan kombinasi pembelian harta finansial dan pembayaran hutang untuk memenuhi tingkat pinjaman neto yang telah ditentukan. Persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi

$$\Delta TBt + \Delta Ut = \Delta HRt + \Delta HFt \dots\dots\dots(4)$$

Persamaan (4) memperlihatkan jumlah sumber dana baik yang berasal dari dana yang dihasilkan sendiri (tabungan bruto) maupun dana yang diperoleh dari luar (hutang) sama dengan jumlah penggunaan dana (penambahan harta riil dan harta finansial). Persamaan (4) di atas dapat dipakai sebagai pendekatan untuk menyusun NAD masing-masing sektor, selama sektor bersangkutan mempunyai neraca. Karena dalam matriks NAD sektor pelaku ekonomi disajikan menurut kolom, maka identitas ini disebut "identitas kolom."

Seperti dijelaskan di atas bahwa jumlah sumber dana setiap sektor dalam NAD harus sama dengan jumlah penggunaan dananya. Karena NAD secara keseluruhan merupakan suatu sistem yang tertutup, maka setiap transaksi finansial yang terjadi harus melibatkan dua pelaku, yaitu pembeli dan penjual. Dengan demikian jumlah pembelian untuk setiap instrumen finansial sama dengan jumlah penjualannya, atau dengan kata lain jumlah perubahan suatu harta sama dengan jumlah perubahan kewajiban untuk kategori finansial yang sama. Karena dalam matriks NAD kategori instrumen finansial disajikan menurut baris, maka identitas ini disebut "identitas baris."

2.5 Kegunaan Neraca Arus Dana

Salah satu manfaat dalam penyusunan NAD adalah tersedianya suatu perangkat data keuangan makro dalam bentuk yang lengkap dan konsisten. Lengkap dalam pengertian bahwa NAD melibatkan seluruh instrumen finansial dan pelakunya. Sementara konsisten berarti bahwa data keuangan yang disajikan harus mengikuti aturan tertentu. Misalnya, jumlah sumber dan penggunaan setiap instrumen finansial untuk keseluruhan ekonomi harus sama besarnya. Begitu pula jumlah seluruh sumber dan penggunaan untuk setiap sektor harus sama besarnya. Dengan demikian NAD dapat digunakan sebagai dasar analisis ekonomi makro, khususnya dalam bidang moneter.

2.5.1 Pangkalan Data

NAD merupakan suatu pangkalan data (data base), yang menyediakan catatan-catatan transaksi keuangan secara lengkap dan konsisten. Berdasarkan informasi ini dapat dibuat analisis deskriptif mengenai kegiatan menyeluruh pasar uang dan modal.

2.5.2 Alat Analisis

NAD banyak dipakai oleh para pengguna data sebagai alat analisis. Para pengamat ekonomi makro yang tertarik untuk menganalisis kaitan antara sektor finansial dan riil dapat menggunakan informasi tabungan dan investasi riil. Pengamat lain yang tertarik untuk melihat secara lebih tajam perilaku keuangan sektor tertentu, misalnya sektor Swasta Non Finansial, dapat menggunakan data deret berkala untuk menghitung berbagai jenis rasio, seperti rasio dana yang berasal dari hutang-hutang terhadap modal saham, dan dari pinjaman jangka pendek terhadap pinjaman jangka panjang. Terlebih lagi jika data yang tersedia tidak hanya dalam bentuk arus tetapi juga dalam bentuk level, maka pengamat dapat menggunakan keduanya secara bersamaan. Sektor rumah tangga merupakan sektor yang sering diminati para pengamat ekonomi. Jumlah perubahan harta dan kewajiban lancar seperti deposito dan kredit konsumen dapat digunakan untuk melihat hubungan antara tabungan dan pengeluaran rumah tangga.

2.5.3 Penerapan Teori Portfolio

Berdasarkan teori portfolio, pelaku ekonomi baik sebagai individu maupun perusahaan melakukan investasinya ke berbagai jenis instrumen finansial sesuai dengan hubungan antara hasil dan risiko yang ditawarkan oleh pasar. Jika biaya transaksi masing-masing jenis portfolio diabaikan, maka para pelaku ekonomi akan merubah perilaku investasinya sesuai dengan perubahan rasio keuntungan masing-masing portfolio. Dalam konteks keseimbangan umum, perubahan relatif dari penawaran suatu aset hanya akan diterima pelaku ekonomi jika keuntungan relatif atas aset tersebut juga meningkat atau harganya lebih rendah. Dalam model portfolio yang lengkap, biaya transaksi juga diperhitungkan sehingga memberikan gambaran yang lebih realistis. Teori portfolio ini dapat diterapkan secara sederhana dengan menggunakan kerangka NAD.

2.5.4 Arus Penawaran dan Permintaan untuk Menentukan Suku Bunga

Pengamat ekonomi yang tertarik untuk meramalkan tingkat suku bunga dapat memanfaatkan arus finansial sebagai alatnya. Prosedur sederhana yang dapat dilakukan adalah memperkirakan jumlah permintaan satu atau lebih instrumen finansial melalui tingkat pertumbuhan portfolio sektor-sektor yang biasanya memegang instrumen tersebut seperti

bank dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian secara terpisah diperkirakan penawaran instrumen tersebut. Adanya kelebihan permintaan dibanding penawaran terhadap satu atau lebih instrumen, pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan penawaran hingga mencapai titik keseimbangan umum. Melalui proses iterasi dan penyesuaian untuk mencapai titik keseimbangan tersebut akan dapat diperkirakan tingkat suku bunga dan arus finansial yang terjadi.

2.5.5 Penerapan untuk Perencanaan dan Proyeksi

Sistem data NAD dapat digunakan untuk memperkirakan arus finansial, tabungan, dan investasi sektoral sebagai masukan bagi perencanaan sektoral dan nasional. Salah satu metode yang digunakan untuk memperkirakan variabel-variabel tersebut adalah menggunakan rasio tetap masing-masing sektor. Prosedur sederhana ini harus dimodifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih mendekati kenyataan. Hal ini dilakukan karena dua hal yaitu : pertama, arus finansial biasanya berfluktuasi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk melakukan modifikasi dapat digunakan rasio rata-rata tiga sampai lima tahunan. Kedua, hendaknya dibuat secara iteratif dan disesuaikan dengan memperhatikan konsistensi angka-angka dalam kerangka NAD baik secara sektoral maupun keseluruhan. Kadang-kadang, dalam proses penyesuaian ini didapatkan pula beberapa informasi tidak langsung. Dalam konteks menyusun perencanaan, dapat dimulai dengan memperkirakan investasi riil untuk masing-masing sektor, kemudian diikuti dengan memperkirakan besarnya tabungan yang dapat diciptakan masing-masing sektor dengan menggunakan rasio NAD. Berdasarkan perkiraan tersebut dapat diperkirakan nilai dari pinjaman neto dan variabel-variabel terkait lainnya.

2.6 Masalah dan Keterbatasan NAD

Masalah utama yang biasanya dihadapi dalam penyusunan NAD adalah keterbatasan data yang tersedia. Untuk itu beberapa alternatif pendekatan dan penggunaan metode sampling tidak dapat dihindarkan. Selain kelemahan sumber data, terdapat beberapa keterbatasan NAD lainnya yang berkaitan dengan pendekatan yang digunakan. Sebagai contoh, pendekatan dengan menggunakan neraca sebagai sumber data akan membawa implikasi terhadap pengukuran arus finansial, konsolidasi neraca, dan arus sebenarnya (true flows). Berikut ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai keterbatasan NAD berkaitan dengan penyusunannya.

2.6.1 Pengukuran Arus Finansial

Paling tidak terdapat dua kelemahan jika arus finansial disusun berdasarkan neraca akhir tahun. Pertama, NAD hanya mencatat perubahan dari pos-pos neraca untuk periode satu

tahun. Padahal selama periode ini banyak terjadi perubahan yang cukup berarti, terutama untuk harta lancar seperti kas dan deposito. Kedua, pengertian sumber atau penggunaan dana tidak sama dengan sumber atau penggunaan kas. Penurunan dalam kas dapat berarti penurunan kas sebenarnya atau juga penurunan dana. Akan tetapi penurunan dana (misalnya penurunan piutang dagang), belum tentu berarti penurunan kas.

2.6.2 *Konsolidasi dan Gabungan Neraca*

Agar dapat menyusun neraca finansial untuk sektor secara keseluruhan, neraca-neraca individu yang merupakan anggota sektor tersebut harus dikelompokkan. Pengelompokan ini dapat dilakukan dengan cara konsolidasi atau gabungan. Jika dilakukan konsolidasi dari masing-masing neraca dalam sektor tertentu, maka terjadi penghapusan beberapa pos yang saling menghilangkan, tetapi masih tercatat baik sebagai harta maupun sebagai kewajiban. Untuk menyusun NAD suatu sektor berdasarkan metode konsolidasi harus tersedia secara rinci data mengenai dari dan untuk siapa harta dan kewajiban sektor tersebut. Tetapi dalam praktek data semacam ini sangat jarang diperoleh, terkecuali untuk sektor luar negeri. Oleh karena itu NAD umumnya disusun dengan metode gabungan.

2.6.3 *"Arus Sebenarnya" Lawan "Perubahan Level dalam Neraca"*

Secara umum, arus keuangan dihitung dari perbedaan dua neraca akhir tahun yang berurutan. Angka ini biasanya sama dengan transaksi yang sebenarnya (true flows) selama periode tersebut. Walaupun begitu, ada beberapa pos neraca yang transaksinya tidak menggambarkan nilai sebenarnya, yaitu transaksi yang diakibatkan karena hal-hal berikut ini :

(1) Keuntungan atau Kerugian Akibat Perubahan Kurs

Nilai ekuivalen rupiah terhadap harta atau kewajiban dalam mata uang asing dapat berubah atau lebih tinggi dari tahun ke tahun sebagai akibat dari perubahan kurs yang terjadi. Dengan demikian, perubahan dalam level (yang dinyatakan dalam rupiah) dapat dipengaruhi oleh perubahan dalam penggunaan kurs.

Idealnya, nilai "true flow" dalam rupiah seharusnya dihitung dari data setiap transaksi yang dinyatakan dalam mata uang asing baik untuk harta maupun kewajiban, dengan menggunakan nilai tukar yang sebenarnya bagi transaksi tersebut. Akan tetapi, data yang sifatnya transaksi individu jumlahnya sangat besar dan datanya sulit diperoleh. Dalam NAD, arus mata uang asing dapat dihitung dengan pendekatan sebagai berikut. Pos-pos neraca yang menggunakan mata uang asing tetapi dilaporkan dalam ekuivalen rupiah (menggunakan kurs pada akhir periode) harus dikonversikan kembali ke dalam mata uang asing menggunakan kurs yang sama. Demikian pula untuk periode sebelumnya dilakukan

dengan menggunakan kurs yang sesuai. Dari sini dapat dihitung arus finansial dalam mata uang asing. Langkah berikutnya adalah mencari kurs yang sesuai untuk mendapatkan arus pos neraca tersebut dalam nilai rupiah. Kurs yang baik adalah menggunakan rata-rata kurs bulanan yang ditimbang dengan jumlah nilai transaksi masing-masing bulan. Jika prosedur semacam ini dilakukan, hasilnya akan mendekati arus sebenarnya.

(2) *Capital Gains and Losses* serta Revaluasi

Perusahaan atau pemerintah dapat saja menyesuaikan nilai hartanya seperti: tanah, gedung dan peralatan, serta penyertaan dalam bentuk saham di perusahaan lain sesuai dengan harga pasar. Setiap kenaikan/penurunan nilai harta akibat penyesuaian harga harus diikuti dengan kenaikan/penurunan modal. Kenaikan/penurunan modal ini dapat disamakan dengan laba/rugi yang diakibatkan *capital gains/losses* yang tercermin dalam laporan rugi/laba.

Meskipun begitu, sistem neraca nasional tidak memperlakukan *capital gains/losses* sebagai pendapatan, karena data ini tidak mengukur nilai produksi sebenarnya. Karena data yang tersedia untuk penyusunan NAD sebagian besar diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, maka harus dilakukan penilaian kembali, apakah menaikkan atau menurunkan harta atau penambahan/pengurangan tabungan dianggap sebagai arus dalam NAD. Kasus ini merupakan salah satu ilustrasi perbedaan antara nilai arus sebenarnya dengan perbedaan dua level neraca.

(3) Perubahan Klasifikasi Sektor

Jika perusahaan atau pelaku ekonomi lainnya melakukan perubahan terhadap kepemilikan, anggaran dasar atau bidang usahanya kemungkinan akan terjadi perubahan klasifikasi perusahaan atau pelaku ekonomi tersebut ke dalam sektor NAD. Perubahan klasifikasi perusahaan ini dapat menyebabkan penurunan level neraca suatu sektor, tetapi sebaliknya akan menaikkan level sektor NAD yang lain.

Penurunan dan kenaikan tidak berpengaruh pada nilai arus sebenarnya, karena kenyataannya tidak ada arus dana yang berhubungan dengan perubahan klasifikasi itu sendiri. Walaupun begitu, laporan sumber dan penggunaan dana untuk perusahaan tersebut tetap dicatat dalam NAD berdasarkan klasifikasi baru.

(4) Perubahan dalam Prosedur Akuntansi dan Laporan Keuangan

Banyak kasus menunjukkan bahwa perubahan prosedur akuntansi yang dilakukan perusahaan dapat menyebabkan perubahan beberapa pos neraca, yang pada akhirnya merubah level neraca keseluruhan. Sebagai contoh, penilaian pada akhir tahun akan

berbeda bila menggunakan sistem "last in first out" (LIFO) atau "first in first out" (FIFO). Perubahan ini seharusnya tidak berpengaruh pada perhitungan sebenarnya, tetapi tetap tercakup pada NAD karena mendasarkan pada data yang ada. Perubahan sistem pelaporan juga dapat mengganggu sistem penyusunan NAD. Misalnya, sebelumnya diperoleh laporan keuangan terpisah antara induk dan cabang dari suatu perusahaan yang sama. Tetapi karena sistem pelaporan perusahaan tersebut yang sekarang hanya dapat memberikan neraca konsolidasi, sehingga seolah-olah terjadi penurunan level neracanya. Hal ini disebabkan karena transaksi antara induk dan cabang tidak diperhitungkan.

(5) Perkiraan Berdasarkan Sampel

Karena keterbatasan data yang dapat dikumpulkan, NAD untuk beberapa sektor seperti perusahaan nonfinansial, hanya didasarkan pada sampel sejumlah neraca perusahaan. Di samping itu jumlah sampel yang digunakan sebagai dasar estimasi mungkin berubah-ubah dari tahun ke tahun. Akibatnya perubahan level neraca gabungan sangat tergantung dari jumlah sampel yang tersedia, dan pada gilirannya dapat menghasilkan arus yang keliru dalam NAD tanpa mengetahui seberapa besar tingkat kesalahannya. Masalah ini dapat diatasi dengan cara menghitung arus dana masing-masing tahun berdasarkan jumlah sampel tertentu yang konsisten, atau dengan memperlihatkan adanya penambahan atau pengurangan sampel untuk masing-masing individu.

<http://www.bps.go.id>

BAB III

KERANGKA DASAR DAN CAKUPAN NERACA ARUS DANA

3.1 Kerangka NAD Indonesia

Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, NAD adalah suatu sistem pencatatan statistik finansial yang menggambarkan transaksi pinjam-meminjam antar berbagai sektor di dalam suatu perekonomian. Berdasarkan hal itu, paling tidak ada dua hal yang harus dijelaskan lebih lanjut yaitu melalui instrumen finansial apa proses pinjam-meminjam itu dilakukan dan sektor-sektor perekonomian mana saja yang menjadi pelakunya. Untuk menggambarkan arus finansial antarsektor melalui instrumen finansial tertentu, lazimnya digunakan matriks yang barisnya menggambarkan instrumen finansial dan kolomnya menunjukkan sektor (pelaku ekonomi). Bagaimana menentukan pembagian sektor dan instrumen finansial yang sesuai dengan situasi dan kondisi perekonomian di Indonesia akan dijelaskan secara lebih rinci, berikut ini.

3.1.1 Pembagian Sektor

Dalam penyusunan statistik, khususnya untuk keperluan analisis tertentu, lazim dilakukan penggolongan unit-unit analisis ke dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Penggolongan ini sangat berguna untuk melihat secara lebih tajam ciri khas kelompok dan perbandingan antarkelompok. Dalam statistik produksi misalnya, unit-unit analisis dikelompokkan menurut kegiatan ekonominya, seperti sektor pertanian, industri, dan sebagainya⁵. Berbeda dengan itu, NAD membagi perekonomian menurut kelompok institusi⁶. Alasan pembagian tersebut adalah transaksi finansial dan keputusan investasi yang dilakukan dalam suatu sistem perekonomian lebih ditentukan oleh pelaku ekonomi, seperti Rumah Tangga, Pemerintah, dan sebagainya.

Salah satu tujuan penyusunan NAD adalah untuk mengetahui perilaku pinjam-meminjam berbagai pelaku ekonomi melalui penggunaan instrumen-instrumen finansial. Untuk menunjang maksud tersebut, perekonomian harus dibagi menjadi sektor-sektor tertentu, sehingga lebih mudah dianalisis. Unit-unit ekonomi yang mempunyai motivasi serupa terhadap keputusan finansial dikelompokkan ke dalam satu sektor. Dengan demikian, paling sedikit perekonomian harus dibagi ke dalam lima sektor, yaitu Rumah Tangga, Pemerintah, Perusahaan, Lembaga Keuangan, dan Luar Negeri; karena kelima sektor tersebut mempunyai perilaku yang sangat berbeda. Pemerintah misalnya, merupakan suatu lembaga

⁵Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) lazim dipakai untuk keperluan penyusunan statistik produksi. KLUI merupakan hasil modifikasi dari International Standard Industrial Classification (ISIC).

⁶Dalam publikasi ini istilah sektor dan institusi digunakan untuk maksud yang sama.

yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dan seringkali melakukan investasi dalam jumlah besar. Lembaga Keuangan (khususnya Bank) berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada investor. Sedangkan motivasi Perusahaan adalah mencari keuntungan dari investasi yang ditanam. Dalam praktiknya, sektor-sektor tersebut (kecuali Luar Negeri) perlu dipecah lagi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam publikasi ini, sektor-sektor di atas (kecuali Luar Negeri), dikelompokkan menurut sektor Keuangan dan Bukan Keuangan. Dengan demikian, dalam analisis Neraca Arus Dana (NAD), sektor-sektor tersebut dibagi ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor Keuangan, Bukan Keuangan, dan Luar Negeri. Sektor Keuangan adalah sektor-sektor yang tidak menghasilkan barang dan berfungsi sebagai penghubung atau perantara (*intermediaries institution*) antara sektor yang surplus dengan sektor yang membutuhkan dana atau sektor defisit. Sedangkan sektor Luar Negeri merupakan konsekuensi logis dari dianutnya sistem perekonomian terbuka, sehingga terjadi transaksi antara residen dengan nonresiden.

Dalam sektor Keuangan, paling tidak harus mencakup sektor Bukan Bank (Lembaga Keuangan Lainnya) dan sektor Bank. Hal itu perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa hanya sektor Bank saja yang dapat menciptakan uang baik uang kartal maupun uang giral, sedangkan sektor Bukan Bank tidak diizinkan melakukannya (*nonintermediaries institution*). Dengan pembagian semacam ini, selanjutnya dapat ditelusuri arus finansial dari lembaga pencipta uang (uang kartal maupun uang giral) ke sektor-sektor lainnya.

Selain itu, dapat pula diketahui sektor mana yang mempunyai kelebihan dana (surplus) dan sebaliknya (defisit). Dalam publikasi ini, sektor Keuangan dirinci ke dalam sektor Otoritas Moneter, sektor Bank, dan Lembaga Keuangan Lainnya. Otoritas Moneter dibentuk sebagai sektor tersendiri karena mempunyai fungsi khusus yaitu menciptakan uang kartal. Lembaga ini diwakili oleh Bank Indonesia. Sektor Perbankan terdiri dari Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional, dan BPR Syariah. Khusus Bank Umum Konvensional, secara spesifik dapat dibedakan menjadi Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa, BUSN Non-Devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank campuran, dan Bank asing. Walaupun sistem pendataan statistik keuangan untuk sektor Keuangan (bukan bank) tidak sebaik yang dimiliki sektor Perbankan, tetapi dalam NAD tetap diusahakan membagi sektor ini secara rinci. Cukup banyak sektor yang termasuk dalam kelompok sektor nonbank atau lembaga keuangan lainnya diantaranya adalah Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Asuransi, Pegadaian, dan Dana Pensiun.

Berdasarkan pengalaman negara maju dan juga perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, sektor Asuransi memiliki volume usaha yang semakin besar. Sejalan dengan

kemajuan pembangunan di Indonesia, peranan sektor ini juga akan semakin meningkat. Berdasarkan UU. No.2 tahun 1992, ada 2 (dua) jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi (usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa, program asuransi sosial, dan usaha reasuransi), serta usaha penunjang usaha asuransi (usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian, usaha konsultan aktuarial, dan usaha agen asuransi). Program asuransi sosial meliputi program asuransi sosial yang hanya boleh diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT (Pesero) Jasa Raharja, PT (Pesero) Taspen, PT (Pesero) JAMSOSTEK, dan PT (Pesero) ASABRI. Program asuransi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) lainnya seperti Perusahaan Pembiayaan, mencakup juga jenis pembiayaan sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan pembiayaan kartu kredit. Walaupun peranan LKBB tidak sebesar sektor Bank tetapi keberadaannya cukup berarti.

Lain halnya dengan sektor Keuangan, sektor Bukan Keuangan adalah sektor-sektor yang bergerak di sektor riil, yaitu sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam perekonomian Indonesia ada lima sokoguru yang menggerakkan roda perekonomian, yakni sektor Pemerintah, Perusahaan Pemerintah (BUMN dan BUMD), Perusahaan Swasta, Koperasi, dan Rumah Tangga. Kelima komponen ini juga dimunculkan secara tersendiri dalam NAD. Sektor terakhir sebagai pelengkap sistem NAD adalah sektor Luar Negeri. Sektor ini secara eksplisit dapat menggambarkan karakteristik utang-piutang penduduk Indonesia dengan luar negeri.

Berdasarkan latar belakang pembagian sektor seperti diuraikan di atas, seharusnya terdapat 30 sektor yang dicakup dalam NAD Indonesia. Dari 30 sektor tersebut, 20 sektor diantaranya merupakan sektor Keuangan, dan hanya 9 sektor adalah sektor Bukan Keuangan serta satu sektor Luar Negeri. Tetapi karena keterbatasan data, dalam publikasi ini hanya disajikan sektor-sektor agregat sebanyak 8 sektor, yaitu : Bank Sentral, Perbankan, Lembaga Keuangan lainnya (Perusahaan Pembiayaan, Asuransi, Dana pensiun dan Pegadaian), Pemerintah, Perusahaan Pemerintah (BUMN dan BUMD) Non-Finansial, Bisnis (Perusahaan Swasta) Non-Finansial, Rumah Tangga, dan Luar Negeri.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai gambaran umum kerangka sektor NAD Indonesia, berikut ini dibuat skematis pembagian sektornya.

SEKTOR KEUANGAN

1. *Bank Sentral*
2. *Perbankan*
 - Bank Umum Konvensional

- Bank Umum Syariah
 - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional
 - BPR Syariah
3. *Lembaga Keuangan Lainnya*
- Perusahaan Pembiayaan (Pembiayaan Sewa Guna Usaha, Pembiayaan Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan Pembiayaan Kartu Kredit)
 - Peransuransian (Usaha Asuransi, Usaha Penunjang Asuransi dan Program Asuransi Sosial)
 - Dana Pensiun
 - Pegadaian

SEKTOR BUKAN KEUANGAN

1. *Rumah Tangga*
2. *Pemerintah (Pusat dan Daerah)*
3. *Perusahaan Pemerintah (BUMN, dan BUMD) Non-Finansial*
4. *Bisnis (Perusahaan Swasta Nonfinansial)*

SEKTOR LUAR NEGERI

Secara lengkap definisi masing-masing sektor di atas diberikan pada Lampiran 1, dalam publikasi ini.

3.1.2 *Pembagian Kategori Transaksi*

Baris-baris NAD pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian atas (*above the line*) dan bagian bawah (*below the the line*). Bagian atas berisi Tabungan Bruto dan Perolehan Aset (harta) Non-Finansial yang dalam istilah lain disebut investasi riil. Tabungan Bruto dibagi menjadi dua yaitu Penyusutan Barang Modal dan Tabungan Neto. Sedangkan Perolehan Aset Non-Finansial terdiri dari Aset yang dapat diproduksi (*produced assets*) dan aset yang tidak dapat diproduksi (*non produced assets*). *Produced assets* terdiri dari aset tetap (*fixed assets*) atau barang modal, perubahan stok, dan perolehan barang berharga. Sedangkan contoh dari *non produced assets* adalah tanah. Semua rincian tersebut berasal dari sektor riil yang biasanya dituangkan dalam neraca modal nasional dan merupakan jembatan menuju ke bagian bawah NAD atau juga bagian finansial.

Sebelum masuk ke bagian finansial untuk kepentingan pengecekan konsistensi, diperkenalkan beberapa baris pembantu. Pertama, pinjaman neto yang merupakan selisih antara tabungan bruto dan investasi bruto. Akan tetapi, karena matriks NAD disajikan menurut sektor, maka selalu terjadi perbedaan antara tabungan dan investasi real. Jika angka baris ini

positif berarti sektor yang bersangkutan mengalami kelebihan dana (sektor surplus). Sebaliknya, jika negatif disebut sektor yang kekurangan dana (sektor defisit). Matriks NAD dapat digunakan untuk menelusuri aliran dana dari sektor surplus ke sektor defisit melalui berbagai instrumen finansial yang nantinya digambarkan pada bagian bawah.

Nilai pinjaman neto dapat pula dihitung berdasarkan selisih jumlah penggunaan finansial dengan sumber finansial. Logikanya, per definisi pinjaman neto adalah bagian investasi finansial. Begitu pula selisih jumlah penggunaan dan sumber juga akan merupakan investasi finansial, tetapi diperoleh dari mutasi/transaksi finansial. Apabila angka ini negatif berarti jumlah sumber finansial lebih besar dari jumlah penggunaannya. Sebaliknya, jika selisih tersebut positif menunjukkan jumlah penggunaan lebih besar dari sumber. Perbedaan kedua pendekatan ini dimunculkan pada baris selisih statistik. Dengan demikian, terdapat lima baris penunjang yaitu pinjaman neto, selisih statistik, investasi finansial neto, jumlah penggunaan finansial, dan jumlah sumber finansial. Di bawah baris penunjang ini selanjutnya merupakan bagian NAD yang berisi berbagai instrumen finansial.

NAD idealnya menampung seluruh jenis instrumen finansial yang dipakai oleh masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia. Jika pendekatan ini ditempuh maka daftar instrumen akan menjadi sangat panjang, sehingga sulit untuk memahami dan mengambil kesimpulan dari daftar ini. Untuk itu dilakukan penggolongan jenis instrumen yang sejenis atau mempunyai sifat hampir sama, dengan mempertimbangkan instrumen-instrumen khas yang dimiliki oleh sektor tertentu. Misalnya, Cadangan Asuransi dan Dana Pensiun dimunculkan sebagai konsekuensi logis dari keberadaan sektor Asuransi dan Dana Pensiun. Begitu pula transaksi kategori pajak yang hanya menggambarkan hubungan utang dan piutang pajak antara sektor Pemerintah dengan sektor-sektor wajib pajak.

Jika dasar penggolongan itu diikuti, maka secara garis besar kategori transaksi NAD Indonesia dapat dibagi menjadi (a) Cadangan Valuta Asing Pemerintah, (b) Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya, (c) Uang dan Simpanan, (d) Surat Berharga Jangka Pendek, (e) Pinjaman, (f) Modal (*Equity*), (g) Surat Berharga Jangka Panjang dan (h) Lainnya. Di bawah ini dijelaskan rincian masing-masing kategori transaksi dalam kelompok besar di atas. Cadangan Valuta Asing Pemerintah menggambarkan hubungan antara sektor Otoritas Moneter dengan sektor Luar Negeri. Kategori ini akan mencakup transaksi Emas Moneter, *Special Drawing Right (SDR)*, Posisi Cadangan IMF, Cadangan Valuta Asing, dan lainnya. Dalam sistem keuangan Indonesia, di samping Otoritas Moneter, sektor lainnya dapat pula secara langsung melakukan hubungan dengan sektor Luar Negeri. Oleh karena itu, untuk menampung transaksi yang demikian, dimunculkan kategori Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya.

Pada kategori Uang dan Simpanan, dirinci semua instrumen yang sebagian besar berkaitan dengan utang bank terhadap sektor lainnya. Karena uang dan simpanan sektor lainnya pada sektor bank dapat berbentuk valuta asing dan rupiah, maka dimunculkan kategori Uang dan Simpanan Dalam Valuta Asing dan Rupiah secara terpisah. Masing-masing kategori ini dirinci lagi ke dalam Uang Kertas dan Logam, Giro, Tabungan, dan Deposito Berjangka. Di samping jenis tabungan tersebut, dimunculkan pula jenis tabungan lainnya yang mencakup Tabungan Giro Pos dan Koperasi berturut-turut untuk menampung simpanan yang dilakukan di Kantor Pos dan Koperasi. Surat berharga jangka pendek umumnya diberikan oleh bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jenis instrumen ini sebenarnya merupakan satu alternatif lain dalam investasi finansial. Di lain pihak, Otoritas Moneter kadang-kadang menggunakan instrumen ini dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk melaksanakan kebijaksanaan moneternya. Selanjutnya, pinjaman merupakan utang pada bank dan institusi lain.

Pada praktiknya, terdapat kecenderungan bahwa sektor keuangan nonbank juga ikut mengambil alih sebagian peranan bank dalam pemberian pinjaman. Semua kredit atau pinjaman yang diberikan ini dapat berbentuk rupiah ataupun valuta asing. Oleh sebab itu dalam NAD, di bawah kategori ini dimunculkan pula instrumen Kredit Bank Dalam Rupiah, Pinjaman Institusi Lain Dalam Rupiah, serta Pinjaman Dalam Valuta Asing. Karena sifat kredit yang diberikan ini mempunyai fungsi yang berlainan, maka kredit (yang berasal dari Bank maupun institusi lainnya) dipecah menjadi Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi. Sedangkan semua kredit yang diberikan dalam valuta asing baik oleh bank maupun institusi lainnya dimasukkan dalam satu kategori Pinjaman Dalam Valuta Asing.

Setiap sektor dalam menjalankan kegiatannya tentu mempunyai Modal atau *Equity*. Untuk kegiatan yang sudah berjalan dan masih memungkinkan untuk melakukan penambahan modal, maka ada berbagai cara untuk mendapatkannya. Bisa dengan cara dipenuhi sendiri seperti perusahaan perorangan bekerja sama dengan orang atau dengan menjual saham (tanda ikut memiliki). Alternatif lainnya bisa dilakukan dengan cara melakukan penawaran sahamnya (*go public*) di pasar modal khususnya untuk perusahaan-perusahaan kategori sedang dan besar yang memiliki prospek bagus. Bagi perusahaan (emiten), cara seperti itu merupakan cara memperoleh sumber dana di luar kredit perbankan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kelebihan dana, cara seperti itu merupakan suatu alternatif melakukan investasi di luar kebiasaan menyimpannya dalam bentuk simpanan di bank dan surat berharga jangka pendek. Untuk menangkap aktivitas tersebut, maka dalam NAD, kategori modal dirinci lagi jenisnya menjadi kategori transaksi Modal Saham dan Penyertaan

(swasta) dan Penyertaan Modal Pemerintah yang dalam beberapa perusahaan pemerintah seringkali berubah menjadi dana donasi bagi perusahaan yang menerimanya.

Surat Berharga Jangka Panjang (Obligasi) umumnya diterbitkan oleh sektor Pemerintah, Lembaga Keuangan dan sektor lain yang memerlukan dana investasi jangka panjang. Pada kategori ini, untuk saat sekarang baru dapat dimunculkan berupa obligasi pemerintah dan obligasi lainnya (obligasi perusahaan swasta dan perusahaan pemerintah) tanpa rincian lebih lanjut, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Khusus obligasi negara, saat ini untuk obligasi pemerintah selain berorientasi ke pasar luar negeri juga telah menerbitkan obligasi untuk dalam negeri. Obligasi pemerintah dalam negeri ini merupakan bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) rupiah dan valuta asing berjangka panjang baik *tradable* dan *nontradable* maupun *fixed* dan *variable*. Contoh dari obligasi ini adalah ORI, FR/VR Bond, Global Bond untuk yang *tradable*, dan SRBI untuk BLBI, serta Surat Utang ke BI untuk penyehatan dan restrukturisasi Perbankan untuk yang *nontradable*. Selain dalam bentuk SUN, obligasi pemerintah juga berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara jangka panjang baik dalam rupiah maupun valuta asing. Contoh dari obligasi ini adalah Ijarah Fixed Rate (IFR), Global Sukuk, dan Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, kelompok kategori yang terakhir merupakan kategori khas untuk sektor-sektor tertentu. Seperti Cadangan Asuransi dan Pensiun, untuk sektor Asuransi dan Dana Pensiun, dan Dana Perwalian yang direncanakan untuk menampung investasi yang dilakukan masyarakat ke dalam "*trust company*". Nampaknya, investasi ke perusahaan semacam ini masih belum berkembang di Indonesia. Kemudian untuk menampung utang-utang dagang yang sering terjadi di dunia usaha dimunculkan kategori Kredit Dagang. Kategori Klaim antarbank dibuat khusus untuk transaksi yang terjadi antarbank, baik antara Perbankan dan Bank Indonesia, maupun transaksi antarperbankan.

Selain kategori transaksi di atas, dibuat pula suatu kategori Rupa-Rupa yang menampung semua transaksi yang tidak tercakup dalam kategori yang telah disebut terdahulu. Definisi kategori transaksi diberikan secara lengkap di Lampiran 2. Namun demikian, berkaitan dengan data NAD yang disajikan dalam publikasi ini, hanya kategori transaksi yang penting dan strategis saja yang ditampilkan tersendiri, sedangkan untuk kategori transaksi lain hanya ditampilkan agregasinya.

3.2 Sumber Data

Umumnya, sumber data yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia

merupakan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Sesuai dengan pembagian sektor dalam NAD, data ini sangat beragam baik tingkatan maupun sumbernya. Data untuk sektor perbankan sudah merupakan neraca konsolidasi yang dilengkapi dengan kode-kode transaksi NAD. Sebaliknya, sektor Keuangan Bukan Bank dan sektor Bukan Keuangan sebagian besar masih merupakan neraca individu perusahaan yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Karena karakteristik data yang digunakan untuk sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri berbeda, maka tidak dapat diperoleh dari neraca akhir tahun. Untuk lebih jelasnya, sumber data masing-masing sektor yang digunakan dalam penyusunan NAD diuraikan berikut ini.

3.2.1 Sektor Otoritas Moneter

Data untuk sektor ini bersumber dari Bank Indonesia yang merupakan hasil pengolahan khusus. Sumber data sektor ini berbentuk neraca yang sangat rinci, sehingga memudahkan pemberian kode transaksi NAD. Selain itu, data tersebut dilengkapi pula dengan perkiraan alokasinya (*counterpart accounts*) ke sektor-sektor lain. Dengan demikian, data itu sangat membantu konsistensi dan kelengkapan data di sektor bersangkutan.

3.2.2 Sektor Bank

Data untuk sektor ini juga bersumber dari Bank Indonesia dalam bentuk neraca konsolidasi, masing-masing untuk Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Campuran, dan Bank Asing. Seperti Neraca Otoritas Moneter, rincian dari neraca konsolidasi ini juga sangat memadai, sehingga memungkinkan untuk membuat perkiraan alokasinya ke sektor-sektor lain.

3.2.3 Lembaga Keuangan Lainnya

Sumber data untuk sektor ini cukup luas dan beragam sesuai dengan banyaknya jenis kegiatan yang dicakup di dalamnya. Data Perusahaan Pembiayaan diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan survei khusus ke perusahaan-perusahaan bersangkutan. Data Perusahaan Dana Pensiun juga diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dari survei khusus. Survei khusus yang dilakukan untuk mengumpulkan data perusahaan pembiayaan dan dana pensiun adalah Survei Khusus Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan (SKDPP). Data untuk sektor Asuransi (yang meliputi tiga jenis usaha peransuransian yaitu usaha asuransi, usaha jasa penunjang asuransi, dan program asuransi sosial) diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa neraca konsolidasi untuk masing-masing jenis usaha asuransi. Sedangkan data untuk sektor Pegadaian diperoleh langsung dari PT (Pesero) Pegadaian.

3.2.4 Sektor Pemerintah

Sektor Pemerintah terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Berbeda

dengan sektor-sektor sebelumnya, sektor ini tidak memiliki informasi keuangan dalam bentuk neraca. Penyusunan NAD untuk sektor ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi yang relevan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menjadi suatu bentuk "Neraca Pemerintah Pusat". Sedangkan untuk Pemerintah Daerah tidak dapat dilakukan karena keterbatasan data. Oleh karena itu, sektor terakhir ini hanya mengandalkan data sektor-sektor lainnya terutama yang bersumber dari Bank Indonesia dan perusahaan-perusahaan pemerintah. Khusus mengenai tabungan dan pembentukan modal pemerintah, datanya diperoleh langsung dari hasil penyusunan statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.5 *Perusahaan Pemerintah Non Finansial*

Perusahaan Pemerintah Non-Finansial terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Non-Finansial. Perusahaan Pemerintah di bidang keuangan (finansial) baik perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank termasuk dalam kelompok sektor keuangan. Data untuk sektor BUMN diperoleh langsung dari Kementerian Negara BUMN berupa neraca individu perusahaan sehingga memerlukan pengolahan lebih lanjut. Data yang diperoleh sudah mencakup seluruh BUMN yang ada, yaitu sekitar 141 BUMN. Sedangkan data untuk BUMD diperoleh dari hasil Survei Statistik Keuangan yang dilakukan Subdirektorat Statistik Keuangan, BPS, dengan cakupan kurang lebih 695 BUMD di seluruh Indonesia. Penaksiran untuk memperoleh cakupan yang lebih baik juga dilakukan secara tidak langsung melalui alokasi (*counterpart accounts*) sektor-sektor lain.

3.2.6 *Perusahaan Swasta Non-Finansial*

Sektor ini mencakup perusahaan-perusahaan di luar BUMN, BUMD, dan lembaga keuangan (finansial). Perusahaan Swasta di bidang keuangan (finansial) termasuk dalam kelompok sektor keuangan. Sistem pengolahan data untuk perusahaan swasta ini belum dikembangkan di Indonesia. Artinya, belum ada satupun instansi atau lembaga yang mengumpulkan dan menyajikan data statistik keuangan sektor ini. Oleh karena itu, keberadaan sektor ini dalam NAD Indonesia masih memiliki kelemahan data yang cukup berarti. Sumber data keuangan untuk sektor ini diperoleh dari Survei Khusus Perusahaan Swasta (SKPS) Non-Finansial yang dilakukan oleh BPS, serta dari data laporan keuangan perusahaan-perusahaan *go-public* yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data lainnya berasal dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan yang mengumpulkan laporan keuangan dalam rangka pemungutan pajak. Namun demikian, karena cakupan sektor ini belum diketahui secara pasti, maka data dari perusahaan-perusahaan tersebut belum dapat diperkirakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, beberapa informasi mengenai sektor ini diambil dari perkiraan-perkiraan lawan (*counterpart accounts*) yang tersedia di sektor lain

(khususnya sektor bank), sedangkan data perusahaan tersebut hanya dimanfaatkan untuk memperoleh gambaran strukturalnya.

3.2.7 Rumah Tangga

Sektor Rumah Tangga merupakan sektor yang hampir tidak mungkin dapat disusun neraca akhir tahunnya. Hal ini disebabkan belum terlihat pentingnya rumah tangga memiliki suatu laporan keuangan. Pendekatan yang dipakai untuk memperoleh data keuangan rumah tangga adalah melakukan estimasi hasil Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR) yang dilakukan BPS dengan mengambil sampel kurang lebih sebanyak 10.000 rumah tangga. Hasil pengolahan SKTIR ini hanya dapat dimanfaatkan untuk memperoleh rasio tabungan terhadap pendapatan (*saving ratio*) dan struktur perubahan harta dan kewajiban finansial rumah tangga. Sedangkan arus masing-masing instrumen finansialnya seperti: Uang, Giro, Deposito, Kredit Bank, dan sebagainya tetap mempertimbangkan data alokasi (*counterpart accounts*) yang diberikan oleh sektor Bank. Data tabungan dan pembentukan modal diperoleh dari hasil perhitungan angka-angka Statistik Pendapatan Nasional Indonesia.

3.2.8 Luar Negeri

Dalam penyusunan NAD Indonesia, data untuk sektor Luar Negeri diperoleh dari Bank Indonesia. Data tersebut diturunkan dari transaksi luar negeri yang ada pada Neraca Pembayaran (*Balance of Payment*) dan Posisi Investasi Internasional (*International Investment Position/IIP*). Tabungan untuk sektor ini dihitung dari angka Statistik Pendapatan Nasional Indonesia, yaitu Ekspor barang jasa dikurangi Impor barang jasa dan ditambah lagi dengan Pendapatan Neto terhadap Luar Negeri atas Faktor Produksi (*Net Factor Income from abroad*).

3.3 Metode Penyusunan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, sumber data utama yang digunakan dalam penyusunan NAD Indonesia adalah neraca perusahaan, terkecuali untuk sektor Rumah Tangga dan Luar Negeri. Neraca-neraca perusahaan tersebut dapat berupa: (a) neraca konsolidasi, seperti neraca perbankan yang disiapkan oleh Bank Indonesia dan neraca asuransi yang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan, dan (b) neraca individu perusahaan yang diterima langsung dari perusahaan bersangkutan ataupun sebagai data sekunder dari instansi terkait.

Prosedur penyusunan NAD Indonesia berdasarkan sumber data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Penyusunan Bagan Transaksi (*Chart of Accounts*) Sektoral

Bagan transaksi adalah suatu media antara yang secara teknis digunakan untuk

mentransformasikan neraca akhir tahun menjadi bentuk neraca lain yang menggunakan kategori transaksi NAD. Bagan transaksi ini dapat disusun berdasarkan neraca baik dalam bentuk konsolidasi maupun individual. Transformasi dari pos-pos neraca yang ada pada setiap neraca akhir tahun ke dalam kategori transaksi NAD dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap pos neraca bersangkutan. Bahkan, sering dilakukan dengan membuat terlebih dahulu daftar konversi pos-pos neraca ke kategori transaksi NAD untuk setiap neraca. Secara teknis, langkah-langkah penyusunan bagan transaksi adalah sebagai berikut.

- i. Setiap pos neraca setelah diidentifikasi diberi kode kategori transaksi NAD yang sesuai. Pengkodean tersebut berpedoman pada klasifikasi kategori transaksi baku yang digunakan dalam NAD Indonesia. Neraca perusahaan dan neraca konsolidasi yang masing-masing pos neracanya sudah menggunakan kode transaksi NAD disebut Bagan Transaksi Perusahaan. Selanjutnya, bagan transaksi ini dapat disederhanakan dengan menggabungkan nilai transaksi dari pos-pos neraca yang mempunyai kode kategori transaksi sama.
- ii. Bagan Transaksi Sektoral diperoleh dengan cara menggabungkan Bagan Transaksi Perusahaan yaitu menjumlahkan nilai transaksi dari kategori NAD yang berkode sama. Selanjutnya, hasil penggabungan ini merupakan neraca yang siap dipakai untuk menyusun NAD.

3.3.2 Penghitungan Arus Finansial

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, NAD menggambarkan arus finansial yang terjadi antarsektor ekonomi selama satu periode tertentu (satu tahun). Dalam praktik, arus finansial ini disusun dengan cara menghitung selisih nilai dari masing-masing kategori transaksi dari dua neraca (bagan transaksi) pada tahun yang berurutan. Oleh karena itu, arus finansial untuk suatu tahun tertentu bisa negatif atau positif. Dalam NAD, arus finansial dikelompokkan menjadi dua kolom yaitu sumber dan penggunaan. Arus finansial sebagai sumber (*sources*) berasal dari semua kategori transaksi yang ada di sisi pasiva bagan transaksi. Sebaliknya, arus finansial sebagai penggunaan (*uses*) berasal dari semua kategori transaksi di sisi aktiva.

3.3.3 Rekonsiliasi NAD

NAD Indonesia disusun berdasarkan neraca finansial yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, konsistensi data dari berbagai sumber tersebut harus dijaga melalui suatu tahap yang disebut rekonsiliasi. Bank Indonesia di samping menyediakan data untuk Otoritas Moneter dan Bank Pencipta Uang Giral, mampu pula menunjukkan alokasinya (*counterpart accounts*) pada sektor-sektor terkait. Misalnya untuk arus uang dan rekening giro

sebagai sumber di Perbankan, dapat diketahui sektor apa saja pemiliknya dan berapa besarnya. Di lain pihak, transaksi yang sama juga dapat diketahui dari sektor yang bersangkutan, tetapi nilainya belum tentu sama. Pada dasarnya, rekonsiliasi NAD bertujuan untuk menciptakan kelayakan dan konsistensi isian NAD baik ditinjau dari sektor maupun dari jenis instrumen finansial yang digunakan. Apabila dilihat menurut sektor, selisih antara jumlah penggunaan finansial dan sumber finansial harus sama dengan pinjaman neto. Sedangkan dari segi kategori transaksi, jumlah sumber harus sama dengan jumlah penggunaan.

Secara operasional, rekonsiliasi NAD dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Isian kolom (sumber dan penggunaan) pada masing-masing sektor harus memenuhi persamaan yang berlaku untuk NAD.
 - Pinjaman Neto (0300) = Tabungan Bruto (0100) - Pembentukan Modal Tetap atau Perolehan Harta Nonfinansial (0200).
 - Investasi Finansial Neto (0500) = Jumlah Penggunaan Finansial (0600) - Jumlah Sumber Finansial (0700).
 - Selisih Statistik (0400) = Pinjaman Neto (0300) - Investasi Finansial Neto (0500). Tetapi karena dalam NAD Indonesia ada beberapa sektor yang datanya sangat lemah atau bahkan tidak tersedia sama sekali maka Selisih Statistik ditiadakan, sehingga Pinjaman Neto = Investasi Finansial Neto.
 - Jumlah Penggunaan Finansial (0600) merupakan jumlah seluruh penggunaan dana dari berbagai instrumen finansial di kolom penggunaan.
 - Jumlah Sumber Finansial (0700) merupakan jumlah seluruh sumber dana dari berbagai instrumen finansial di kolom sumber.
- ii. Konsistensi data dari berbagai sumber terutama pada tingkat makro juga harus dijaga. Secara nasional, data Penyusutan Barang Modal, Tabungan Neto, Pembentukan Modal Tetap, dan Perubahan Stok yang diperoleh dari hasil perhitungan NAD sedikit berbeda dengan hasil perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, seluruh angka makro tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan angka-angka PDB. Dalam praktik, penyesuaian dilakukan dengan mengalokasikan perbedaan nilai dari kedua perhitungan di atas ke sektor-sektor yang tingkat ketelitian dan cakupan datanya masih lemah. Sebaliknya, hasil penghitungan dari sektor-sektor yang tingkat ketelitiannya tinggi tetap dipertahankan.
- ii. Perilaku setiap jenis instrumen finansial di dalam NAD juga harus mendapat perhatian. Instrumen finansial seperti Uang, Giro, Deposito, Kredit Dagang, dan Kredit Bank

mempunyai karakteristik yang berbeda. Terdapat beberapa instrumen yang hanya dapat ditransaksikan oleh sektor-sektor tertentu. Sebagai contoh, Giro (1022), di sisi sumber hanya boleh diisikan di sektor Keuangan. Di dalam rekonsiliasi, seluruh data untuk kategori transaksi yang bersumber dari Bank Indonesia tidak mengalami penyesuaian. Sedangkan sektor-sektor yang terkena alokasi berdasarkan data Bank Indonesia tersebut, isian aslinya mungkin saja diubah untuk menjaga keseimbangan dan kelayakan masing-masing instrumen finansial.

3.3.4 Masalah dalam Proses Penyusunan

Seperti telah dijelaskan, data yang digunakan untuk penyusunan NAD diperoleh dari sumber yang sangat beragam. Umumnya, data tersebut diperoleh dalam bentuk neraca akhir tahun baik yang sudah dikonsolidasikan maupun yang masih berbentuk neraca individu perusahaan. Masalah utama yang dihadapi dalam proses penyusunan adalah pada saat mengidentifikasi pos-pos neraca ke dalam kode transaksi NAD. Untuk itu diperlukan pemahaman yang mendalam tentang kandungan dan makna dari setiap pos neraca tersebut. Begitu pula penggunaan istilah dan kekhususan dari setiap pos neraca yang dapat berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Proses untuk mempelajari dan memahami setiap neraca individu ini cukup memakan waktu.

Masalah kedua adalah seringkali terjadi pos-pos dalam neraca ini kurang didukung oleh keterangan yang memadai. Bahkan, itu disajikan dalam bentuk kelompok besarnya saja (tidak rinci). Kondisi ini sangat menyulitkan proses transformasi dari pos-pos neraca ke kode transaksi NAD serta dapat menyebabkan kekeliruan pemberian kode. Masalah lainnya adalah belum dibangunnya sistem pengadaan data NAD yang baku dan konsisten pada instansi-instansi terkait, sehingga sering dibutuhkan pengolahan ulang yang bersifat khusus untuk kepentingan penyusunan NAD. Jika sistem ini dapat berjalan, maka proses penyusunan dan penyajian NAD dapat lebih dipercepat.

<http://www.bps.go.id>

BAB IV

KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA

BERDASARKAN NAD INDONESIA TAHUN 2010-2014

4.1 GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2014

Perekonomian global pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 3,3 persen (y-on-y) relatif sama dengan pertumbuhan tahun 2013. Berbagai kebijakan yang lebih longgar mendukung pemulihan ekonomi negara maju, meskipun dampaknya tidak seragam bagi semua negara. Pertumbuhan ekonomi negara maju mencapai 1,8 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 1,4 persen. Fenomena ini dapat tercermin dari kondisi perekonomian Amerika Serikat, Jerman, dan Inggris yang mengalami peningkatan, yakni masing-masing sebesar 2,4 persen, 1,6 persen, dan 2,6 persen (y-on-y) pada tahun 2014 dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 yakni masing-masing sebesar 2,2 persen, 0,2 persen, dan 1,7 persen (y-on-y). Namun, kondisi sebaliknya terjadi pada perekonomian Jepang yang mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen.

Di sisi lain, ekonomi Indonesia melambat dengan pertumbuhan 5,02 persen (c-to-c). Padahal pada tahun 2013 Indonesia mampu mencapai angka 5,58 persen (c-to-c). Perlambatan tersebut dipicu oleh melambatnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh tekanan inflasi akibat kenaikan harga BBM serta adanya kebijakan efisiensi anggaran yang memicu perlambatan pengeluaran konsumsi pemerintah. Selain itu, kondisi perekonomian negara tujuan ekspor yang melambat juga menjadi penyebab menurunnya volume ekspor migas dan non migas Indonesia. Meskipun demikian, selama tahun 2014 masih terjadi percepatan pertumbuhan pada komponen pengeluaran konsumsi LNPR (Lembaga Non Profit yang melayani Rumah tangga) sebesar 12,43 persen yang didorong oleh pengeluaran Pemilu baik Pileg maupun Pilpres pada semester pertama tahun 2014.

Dari sisi produksi, pertumbuhan didukung oleh semua lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,02 persen akibat penambahan sarana dan prasarana telekomunikasi, seperti jumlah BTS, layanan data 4G LTE dan modernisasi jaringan. Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 9,81 persen dan jasa lainnya sebesar 8,92 persen. Jika dilihat strukturnya perekonomian Indonesia tahun 2014 didominasi oleh tiga lapangan usaha yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor.

Kondisi tersebut didukung oleh situasi ekonomi makro dan sistem keuangan yang kondusif memungkinkan sektor rumah tangga dan sektor usaha melakukan kegiatan ekonominya dengan lebih baik. Namun, kuatnya permintaan domestik di tengah melemahnya kinerja ekspor menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan neraca transaksi berjalan. Akibatnya, secara kumulatif neraca perdagangan sepanjang tahun 2014 mencatat defisit sebesar 26,2 miliar dolar AS. Meskipun demikian, kondisi tersebut lebih baik dibandingkan defisit tahun 2013 sebesar 29,1 miliar dolar AS. Perbaikan tersebut didorong oleh kinerja neraca perdagangan barang non migas yang mencapai surplus sebesar 18,7 miliar dolar AS pada tahun 2014. Capaian surplus yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tersebut utamanya dipengaruhi oleh kontraksi impor non migas yang lebih dalam daripada kontraksi ekspor.

Sejalan dengan neraca perdagangan, secara keseluruhan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia juga mengalami perbaikan akibat dari kebijakan stabilisasi Bank Indonesia yang mampu menekan defisit transaksi berjalan. Neraca transaksi modal dan finansial pada tahun 2014 tercatat surplus secara total sebesar 43,59 miliar dolar AS. Surplus tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang hanya mencapai 22,01 miliar dolar AS. Sedangkan posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2014 mencapai 111,86 miliar dolar AS atau setara dengan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah.

Sebaliknya, nilai tukar rupiah cenderung mengalami pelemahan sepanjang tahun 2014 kecuali pada triwulan I/2014. Pelemahan rupiah tidak dapat dipisahkan dari fenomena lambatnya pemulihan ekonomi global serta penurunan harga komoditas global yang berdampak pada terus berlanjutnya defisit transaksi berjalan. Secara rata-rata rupiah terdepresiasi sebesar 12 persen dari Rp 10.445 per dolar AS pada tahun 2013 menjadi Rp 11.812 per dolar AS pada tahun 2014. Pelemahan terhadap dolar AS tersebut lebih rendah dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS pada tahun sebelumnya. Sementara secara point-to-point rupiah terdepresiasi sebesar 1,7 persen mencapai level Rp 11.876 per dolar AS (akhir Desember 2014).

Dari sisi stabilitas harga, pada Desember 2014 terjadi inflasi umum sebesar 8,36 persen (tahun kalender dan y-on-y). Besaran inflasi tersebut relatif sama dibandingkan tahun 2013 sebesar 8,38 persen. Jika dilihat per sektor maka kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi ialah transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 12,14 persen, kemudian bahan makanan sebesar 10,57 persen.

Perkembangan suku bunga (sebagai salah satu indikator untuk melihat kondisi pasar uang) selama tahun 2014 menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Kebijakan moneter melalui

penetapan BI rate direspon dengan baik oleh suku bunga di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang relatif tidak banyak berubah dan peningkatan pada suku bunga deposito. Secara rata-rata, suku bunga deposito pada akhir tahun 2014 (8,78 persen) lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2013 (7,69 persen). Sementara itu, kenaikan suku bunga kredit masih lambat dibandingkan suku bunga deposito. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada akhir tahun 2014 sebesar 12,9 persen sedangkan akhir tahun 2013 sebesar 12,4 persen.

Dari sisi intermediasi, kinerja perbankan masih tumbuh positif walaupun melambat. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum pada tahun 2014 tercatat sebesar Rp 4.114 triliun atau tumbuh 12,30 persen (y-on-y). Pertumbuhan tersebut melambat jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang tumbuh sebesar 13,60 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada deposito dengan pertumbuhan year on year sebesar 20,09 persen yang disebabkan terjadinya pergeseran dana masyarakat dari tabungan ke deposito sebagai dampak dari kebijakan moneter yang lebih ketat. Secara struktural, deposito masih menjadi kontributor utama terhadap dana pihak ketiga yakni 43,79 persen. Kontribusi tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya, sedangkan kontribusi giro dan tabungan menurun. Pada penyaluran dana, kredit pada Desember 2014 mencapai Rp 3.674,31 triliun atau tumbuh sebesar 11,58 persen (y-on-y). Berdasarkan penggunaan, jumlah kredit bank umum didominasi oleh kredit modal kerja dengan kontribusi sebesar 47,83 persen. Meskipun demikian, kredit investasi pada tahun 2014 tumbuh lebih cepat yaitu 13,16 persen dibandingkan kredit modal kerja yang tumbuh hanya 10,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, kinerja Bank Umum berdasarkan rasio keuangan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL) terjaga baik. Kinerja Bank Umum yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR) pada tahun 2014 yang mencapai 19,5 persen jauh di atas cadangan minimum 8 persen. Kondisi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya sebesar 18,4 persen. Selain itu, rasio kredit bermasalah (NPL) gross juga terkendali dengan capaian 2,2 persen (di bawah 5 persen). NPL tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 yang tercatat sebesar 1,9 persen. Peningkatan NPL tersebut disebabkan oleh perlambatan perekonomian yang diikuti depresiasi nilai tukar rupiah sehingga menurunkan kemampuan korporasi dan perorangan dalam membayar kredit.

Sejalan dengan kinerja Bank Umum, kondisi pasar saham domestik menunjukkan peningkatan kinerja selama tahun 2014. Sejak awal tahun 2014 tren IHSG menunjukkan penguatan di hampir seluruh sektor walaupun sempat tertahan saat pelaksanaan Pemilihan Presiden pada pertengahan tahun 2014. Namun, seiring dengan pelaksanaan pemilu yang aman, lancar, dan kondusif pada bulan Juli 2014 mendorong penguatan lebih lanjut hingga

mencapai level di atas 5000. Selain itu, tanggapan yang positif dari pelaku pasar atas kebijakan pemerintah mengurangi subsidi BBM dan kebijakan BI untuk meningkatkan BI rate juga ikut menjaga tren penguatan IHSG. Pada akhir tahun 2014 IHSG tercatat pada level 5.226,95 meningkat 22,3 persen dibandingkan pada akhir tahun 2013 yang tercatat pada level 4.274,2. Secara sektoral, penguatan terbesar terjadi pada sektor properti sebesar 55,8 persen, kemudian diikuti sektor keuangan sebesar 35,4 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pelemahan adalah sektor pertambangan sebesar minus 4,2 persen sejalan dengan penurunan harga pada komoditas pertambangan.

Sementara itu, kinerja pasar obligasi selama tahun 2014 tercatat mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan melalui penurunan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat pada akhir tahun 2014 sebesar 7,8 persen dibandingkan tahun 2013 sebesar 8,45 persen. Namun kondisi berbeda terjadi pada pasar obligasi korporasi, penerbitan obligasi korporasi selama tahun 2014 tercatat Rp 47,82 triliun menurun dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 55,3 triliun. Penerbitan obligasi korporasi tersebut masih didominasi perusahaan multifinance.

4.2 PERKEMBANGAN TABUNGAN BRUTO

**Tabel 4.1 Tabungan Bruto Menurut Sektor,
Tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR (1)	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013*) (5)	2014**) (6)
A. BUKAN KEUANGAN	2.142,42	2.410,22	2.516,93	2.714,37	3.012,76
1. Pemerintah	189,70	215,88	255,25	206,70	320,35
2. Perusahaan	1.461,97	1.610,96	1.602,24	1.877,45	1.964,42
- Pemerintah	104,39	104,49	123,68	134,05	161,03
- Swasta +)	1.357,59	1.506,47	1.478,56	1.743,40	1.803,39
3. Rumah Tangga	490,75	583,39	659,43	630,21	727,99
B. KEUANGAN	33,51	62,49	122,69	167,83	315,11
4. Bank ++)	9,11	46,21	86,73	136,49	277,82
5. Bukan Bank	24,41	16,29	35,96	31,34	37,29
C. LUAR NEGERI	81,00	110,53	382,05	360,91	325,27
6. Luar Negeri	81,00	110,53	382,05	360,91	325,27
JUMLAH	2.256,94	2.583,24	3.021,66	3.243,11	3.653,13
*) angka sementara +) terdiri dari perusahaan swasta non finansial					
**) angka sangat sementara ++) termasuk Bank Sentral					

Perkembangan tabungan bruto menurut sektor selama tahun 2010-2014 disajikan pada tabel 4.1. Selama kurun waktu 2010-2014, tabungan bruto memperlihatkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata setahun sebesar 11,34persen.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 14,09 persen. Tahun 2014 tabungan bruto mengalami peningkatan sebesar Rp3.653,13 triliun (lihat tabel 4.1), atau meningkat 10,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara sektoral, sektor perusahaan (swasta dan perusahaan pemerintah) mengalami peningkatan tabungan bruto yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya selama periode tersebut. Sedangkan sektor keuangan tabungan brutonya yang paling rendah.

Tabel 4.2 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor, Tahun 2010-2014 (Persen)					
SEKTOR	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BUKAN KEUANGAN	94,93	93,30	83,30	83,70	82,47
1. Pemerintah	8,41	8,36	8,45	6,37	8,77
2. Perusahaan	64,78	62,36	53,03	57,89	53,77
- Pemerintah	4,63	4,04	4,09	4,13	4,41
- Swasta +)	60,15	58,32	48,93	53,76	49,37
3. Rumah Tangga	21,74	22,58	21,82	19,43	19,93
B. KEUANGAN	1,48	2,42	4,06	5,17	8,63
4. Bank ++)	0,40	1,79	2,87	4,21	7,60
5. Bukan Bank	1,08	0,63	1,19	0,97	1,02
C. LUAR NEGERI	3,59	4,28	12,64	11,13	8,90
6. Luar Negeri	3,59	4,28	12,64	11,13	8,90
JUMLAH	100	100	100	100	100
*) angka sementara +) terdiri dari perusahaan swasta non finansial					
**) angka sangat sementara ++) termasuk Bank Sentral					

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa selama periode 2010-2014 sektor perusahaan (swasta dan perusahaan pemerintah) memiliki peranan yang paling dominan dalam pembentukan tabungan bruto secara keseluruhan. Kontribusi sektor ini dalam pembentukan tabungan bruto rata-rata mencapai 58,37 persen. Kontribusi tertinggi dari sektor ini terhadap total tabungan bruto selama periode tersebut terjadi di tahun 2010 sebesar 64,78 persen dan kontribusi terendah terjadi di tahun 2012 sebesar 53,03 persen. Hal tersebut menunjukkan besarnya peran yang dimainkan oleh sektor ini dalam kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto secara nasional. Tabungan tersebut nantinya akan digunakan untuk kegiatan investasi baik investasi fisik maupun investasi finansial.

Sedangkan pada sektor Keuangan, walaupun kontribusinya terhadap pembentukan tabungan bruto secara nasional tidak signifikan, namun perannya sebagai lembaga intermediasi antara sektor surplus dan defisit, sangat menentukan terhadap jalannya roda perekonomian nasional. Peran tersebut terutama terlihat dalam penyediaan kredit investasi

dan kredit konsumsi yang dibutuhkan dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian nasional. Pada tahun 2013 kontribusi tabungan bruto sektor keuangan secara rata-rata hanya sebesar 4,35 persen/tahun. Kontribusi tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor Rumah Tangga dan Pemerintah yang kontribusinya masing-masing sebesar 21,10 persen/tahun dan 8,07 persen/tahun (terhadap pembentukan tabungan bruto nasional).

Tabel 4.3 Struktur Tabungan Bruto Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2010-2014 (persen)

SEKTOR	2010	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BUKAN KEUANGAN	31,21	30,78	29,21	28,50	28,58
1. Pemerintah	2,76	2,76	2,96	2,17	3,04
2. Perusahaan	21,30	20,57	18,60	19,71	18,63
- Pemerintah	1,52	1,33	1,44	1,41	1,53
- Swasta +)	19,78	19,24	17,16	18,30	17,11
3. Rumah Tangga	7,15	7,45	7,65	6,62	6,91
B. KEUANGAN	0,49	0,80	1,42	1,76	2,99
4. Bank ++)	0,13	0,59	1,01	1,43	2,64
5. Bukan Bank	0,36	0,21	0,42	0,33	0,35
C. LUAR NEGERI	1,18	1,41	4,43	3,79	3,09
6. Luar Negeri	1,18	1,41	4,43	3,79	3,09
JUMLAH	32,88	32,98	35,07	34,05	34,65
PDB (Triliun Rp)	6.864,13	7.831,73	8.615,70	9.524,74	10.542,69
*) angka sementara		+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial			
**) angka sangat sementara		++) termasuk Bank Sentral			

Tabel 4.3 memperlihatkan persentase struktur tabungan bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor, dimana secara umum persentase seluruh sektor cenderung berfluktuatif. Selama periode 2010-2014 persentase terbesar dari struktur⁷ ini masih pada sektor bukan keuangan. Sektor pemerintah yang merupakan bagian dari sektor Bukan Keuangan merupakan sektor dengan struktur yang cukup berfluktuatif. Persentase terkecil pada sektor pemerintah ini terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 2,17 persen, sedangkan persentase terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,04 persen. Pada sektor bukan Keuangan ini, kontribusi terbesar dari struktur ini ada pada sektor Perusahaan terutama sektor Perusahaan Swasta. Persentase struktur dari sektor Perusahaan selama periode tersebut berkisar antara 17,11 persen (tahun 2014) hingga 19,78 persen (tahun 2010). Sedangkan satu sektor lagi dalam sektor Bukan Keuangan yaitu sektor Rumah Tangga, persentase strukturnya selama periode 2010-2014 cenderung berfluktuatif, yaitu berada pada kisaran 6,62 persen (tahun 2013) hingga 7,65 persen (tahun 2012). Namun hanya pada tahun 2013 peranannya

⁷ Untuk mempersingkat, yang dimaksud struktur di sini adalah struktur tabungan bruto terhadap PDB

mengalamiperlambatan yaitu sebesar 6,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,65 persen, kemudian pada tahun 2014 meningkat kembali menjadi 6,91 persen.

Pada sektor Keuangan, peranan struktur ini selama periode 2010-2014 berada pada kisaran 0,49persen (tahun 2010) hingga 2,99 persen (tahun 2014) dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada sektor ini, persentase sektor Bank relatif lebih besar dibandingkan sektor Bukan Bank. Pada sektor Bank, persentase terbesar ada di tahun 2014 sebesar 2,64 persen, sedangkan persentase terkecil hanya sebesar 0,14 (tahun 2010). Sementara pada sektor Bukan Bank persentasenya hanya berkisar 0,21 persen (tahun 2011) hingga 0,42 (tahun 2012). Disamping sektor Keuangan dan sektor Perusahaan Pemerintah, struktur dari sektor Luar Negeri juga relatif kecil dan juga berfluktuasi.

4.3 PERKEMBANGAN INVESTASI

4.3.1. Gambaran Umum Investasi Indonesia 2010 -2014

Perkembangan investasi dalam konteks ini adalah investasi non finansial dan investasi finansial. Investasi non finansial terjadi akibat adanya proses perubahan (penambahan maupun pengurangan) aset non finansial berupa barang modal dan persediaan (inventori). Sedangkan investasi finansial terjadi karena adanya transaksi finansial oleh para pelaku ekonomi di pasar keuangan melalui berbagai macam instrumen finansial, seperti saham, obligasi, SBI, kredit, valas, dan sebagainya.



Pada umumnya peran investasi non finansial lebih dominan dibandingkan dengan investasifinansial. Pada tahun 2013 kontribusi yang diberikan investasi non finansial terhadap total investasi mencapai 53,81 persen. Tahun 2014 kontribusinya naik menjadi 56,55 persen. Kenaikan kontribusi investasi non finansial pada tahun 2014 disebabkan terjadi penurunan pada kontribusi investasi finansial yaitu dari 46,19 persen di tahun 2013 menjadi 43,45 persen ditahun 2014.



Berdasarkan grafik 4.2, terlihat bahwa selama periode 2010-2014 nilai investasi Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat. Kenaikan total investasi didukung oleh kenaikan investasi non finansial yang ditunjukkan dengan trennya yang terus meningkat. Namun, di beberapa periode pertumbuhan investasi non finansial sempat mengalami perlambatan seperti yang terjadi di tahun 2011 dan 2013 (grafik 4.3). Pada tahun 2011 pertumbuhan investasi non finansial ini hanya sebesar 14,5 persen jauh di bawah tahun sebelumnya yang sebesar 29,9 persen. Begitu pula di tahun 2013, pertumbuhannya yang sebesar 7,3 persen mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 17,0 persen. Penurunan investasi non finansial di tahun 2011 lebih banyak disebabkan menurunnya investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan dalam negeri, alat angkutan dalam negeri, dan barang lainnya dari dalam negeri.



Investasi finansial sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian global. Ketika terjadi krisis ekonomi global yang mengancam pada tahun 2010 dan melanda kawasan Eropa dan Amerika Serikat di tahun 2011, investasi finansial Indonesia tertekan sehingga terjadi kontraksi -5,4 persen di tahun 2011. Kondisi tersebut sedikit membaik di tahun berikutnya dimana investasi finansial mengalami pertumbuhan sebesar 33,6 persen. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kontraksi sebesar -33,4 persen dan kembali naik di tahun 2014 sebesar 0,8 persen.

4.3.2. Perkembangan Investasi Non Finansial Indonesia Tahun 2010 - 2014

Dalam teori ekonomi makro dijelaskan bahwa tabungan bruto dan investasi non finansial apabila dilihat secara total, akan bernilai sama. Tetapi jika dilihat secara sektoral maka antara tabungan bruto dan investasi non finansial dapat memiliki nilai yang berbeda. Pola perkembangan yang ditunjukkan oleh investasi non finansial secara nasional sama dengan pola perkembangan tabungan bruto.

Tabel 4.4 Investasi Non Finansial Menurut Sektor Tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah)					
SEKTOR	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BUKAN KEUANGAN	2,240.50	2,581.35	3,003.15	3,209.50	3,615.54
1. Pemerintah	181.41	226.90	286.58	271.64	293.51
2. Perusahaan	1,823.08	2,113.87	2,414.13	2,601.14	3,055.99
- Pemerintah	252.62	138.24	303.70	360.43	210.00
- Swasta +)	1,570.47	1,975.63	2,110.43	2,240.71	2,845.99
3. Rumah Tangga	236.00	240.57	302.44	336.72	266.04
B. KEUANGAN	16.44	1.90	18.52	33.61	37.59
4. Bank ++)	1.71	6.44	22.03	12.60	17.78
5. Bukan Bank	14.72	-4.54	-3.51	21.01	19.81
C. LUAR NEGERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH	2,256.94	2,583.24	3,021.66	3,243.11	3,653.13
*) angka sementara	+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial				
**) angka sangat sementara	++) termasuk Bank Sentral				

Definisi dari investasi non finansial (INF) disajikan secara rinci pada lampiran 2 di halaman belakang buku ini. Tabel 4.4. menyajikan perkembangan INF yang dilakukan masing-masing sektor beserta nilainya selama tahun 2010-2014. Sedangkan Tabel 4.5 menggambarkan kontribusi dari masing-masing sektor dalam menciptakan INF selama tahun

2010-2014. Secara sektoral, sektor perusahaan (swasta dan perusahaan pemerintah) mengambil peran yang sangat dominan dalam melakukan INF. Hal ini terlihat jelas dari besarnya dana untuk investasi ini yang mencapai Rp 3.055,99 triliun pada tahun 2014. Jumlah tersebut merupakan 83,65 persen dari nilai INF yang dilakukan oleh seluruh sektor. Besarnya nilai INF yang dikeluarkan oleh sektor ini merupakan salah satu ciri khas dari sektor ini, dimana untuk menjamin kegiatan ekonominya dapat berjalan dengan baik, biasanya diperlukan investasi yang cukup besar dalam bentuk investasi non finansial (berupa barang modal dan stok). Selain sektor Perusahaan, sektor-sektor yang juga berperan cukup dominan dalam pembentukan INF adalah Pemerintah dan Rumah Tangga. Selama tahun 2010 – 2014, nilai INF sektor pemerintah berkisar antara Rp 181,41 triliun hingga Rp 293,51 triliun. Sedangkan nilai INF sektor Rumah Tangga berkisar antara Rp 236 triliun hingga Rp 336,72 triliun.

Hal sebaliknya terjadi pada sektor keuangan (bank dan bukan bank), dimana INF sektor ini kecil. Hal ini disebabkan investasi yang dominan sebagian besar dalam bentuk investasi finansial, seperti giro, deposito, surat berharga (saham dan obligasi) swasta, dan sebagainya.

**Tabel 4.5 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor
Tahun 2010-2014 (persen)**

SEKTOR (1)	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013*) (5)	2014**) (6)
A. BUKAN KEUANGAN	99.27	99.93	99.39	98.96	98.97
1. Pemerintah	8.04	8.78	9.48	8.38	8.03
2. Perusahaan	80.78	81.83	79.89	80.21	83.65
- Pemerintah	11.19	5.35	10.05	11.11	5.75
- Swasta +)	69.58	76.48	69.84	69.09	77.91
3. Rumah Tangga	10.46	9.31	10.01	10.38	7.28
B. KEUANGAN	0.73	0.07	0.61	1.04	1.03
4. Bank ++)	0.08	0.25	0.73	0.39	0.49
5. Bukan Bank	0.65	-0.18	-0.12	0.65	0.54
C. LUAR NEGERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

*) angka sementara +) terdiri dari perusahaan swasta non finansial

***) angka sangat sementara ++) termasuk Bank Sentral

Dari tabel 4.5.diatas jelas terlihat bahwa hampir sebagian besar INF dilakukan oleh sektor Perusahaan (Swasta dan Perusahaan Pemerintah). Selama tahun 2010-2014, secara rata-rata sektor ini mengambil porsi sebesar 81,27 persen dari total INF seluruh sektor. Nilai INF yang dikeluarkannya pun cukup besar, dimana pada tahun 2014 mencapai Rp 3.055,99 triliun.

Berdasarkan Tabel 4.5 juga, terlihat bahwa selama periode 2010-2014, kontribusi sektor perusahaan terhadap INF secara umum relatif meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 83,65 persen.

Sektor yang juga mempunyai kontribusi nyata terhadap pembentukan INF adalah sektor Pemerintah dan Rumah Tangga. Selama tahun 2010- 2014 rata-rata kontribusi sektor-sektor ini sebesar 8,54 persen dan 9,49 persen. Kontribusi INF Pemerintah tahun 2011 sebesar 8,78 persen. Pada tahun 2012 kontribusi tersebut mengalami sedikit peningkatan menjadi 9,48 persen, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 8,38 persen. Pada tahun 2014, kontribusi INF pemerintah kembali menurun sebesar 8,03 persen. Sementara itu, kontribusi sektor rumah tangga cenderung sedikit berfluktuatif. Pada tahun 2010 kontribusinya sebesar 10,46 turun menjadi 9,31 persen pada 2011 dan kembali naik hingga 10,01 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 kontribusi tersebut juga mengalami peningkatan menjadi 10,38 persen, tetapi kembali turun di tahun 2014 yang mana kontribusi tersebut dibawah rata-rata sektor rumah tangga yaitu sebesar 7,28 persen.

Tabel 4.6 Struktur Investasi Non Finansial Menurut Sektor Terhadap PDB Tahun 2010-2014 (persen)

SEKTOR	2010	2011	2012	2013*)	2014**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. BUKAN KEUANGAN	32.64	32.96	34.86	33.70	34.29
1. Pemerintah	2.64	2.90	3.33	2.85	2.78
2. Perusahaan	26.56	26.99	28.02	27.31	28.99
- Pemerintah	3.68	1.77	3.52	3.78	1.99
- Swasta +)	22.88	25.23	24.50	23.53	26.99
3. Rumah Tangga	3.44	3.07	3.51	3.54	2.52
B. KEUANGAN	0.24	0.02	0.21	0.35	0.36
4. Bank ++)	0.02	0.08	0.26	0.13	0.17
5. Bukan Bank	0.21	-0.06	-0.04	0.22	0.19
C. LUAR NEGERI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Luar Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH	32.88	32.98	35.07	34.05	34.65
PDB (Triliun Rp)	6,864.13	7,831.73	8,615.70	9,524.74	10,542.69
*) angka sementara	+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial				
**) angka sangat sementara	++) termasuk Bank Sentral				

Kontribusi sektor keuangan (Bank dan Bukan Bank) terhadap keseluruhan investasi non finansial tidak terlalu signifikan. Bahkan selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor tersebut tidak mencapai 1 persen. Minimnya investasi non finansial yang dilakukan sektor keuangan dikarenakan investasinya sebagian besar dalam bentuk investasi finansial. Tabel 4.6 memperlihatkan persentase struktur investasi non finansial terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari masing-masing sektor. Secara umum persentase dari sektor pemerintah dan rumah tangga sedikit berfluktuatif. Persentase terbesar dari struktur ini masih pada sektor Perusahaan (swasta dan Perusahaan Pemerintah) yang cenderung meningkat setiap tahunnya yakni dari tahun 2010 sebesar 26,56 persen menjadi 28,99 persen pada tahun 2014. Rata-rata kontribusi dari ketiga sektor tersebut masing-masing sebesar 27,57 (sektor Perusahaan), 3,22 (sektor Rumah Tangga), dan 2,9 (sektor Pemerintah).

4.3.3. Perkembangan Investasi Finansial Indonesia Tahun 2014

Tabel 4.7 menggambarkan komposisi jenis-jenis investasi finansial berdasarkan instrumen finansial. Selama tahun 2014 investasi finansial mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. Perubahan ini terkait dengan adanya peralihan perilaku investasi yaitu dari investasi finansial ke investasi nonfinansial.

Tabel 4.7 Jenis-jenis Investasi Finansial menurut Instrumen Finansial Tahun 2014 (Triliun Rupiah)		
Instrumen Finansial	Penambahan/ Pengurangan	%
(1)	(2)	(3)
01. Cadangan Valas Pemerintah	-4,06	-0,14
02. Klaim dalam Valas Lainnya	0,00	0,00
03. Uang dan Simpanan	648,76	23,11
04. Surat Berharga Jangka Pendek	297,96	10,61
05. Kredit	441,42	15,72
06. Modal Saham dan Penyertaan	807,22	28,75
07. Surat Berharga Jangka Panjang	358,39	12,77
a. Surat Berharga Pemerintah	214,71	7,65
b. Surat Berharga Lainnya	143,68	5,12
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	52,72	1,88
09. Kredit Dagang	30,19	1,08
10. Rekening Antar Bank	17,44	0,62
11. Rupa-rupa	157,38	5,61
Jumlah	2.807,41	100,00

Investasi finansial yang tercipta pada tahun 2014 sebesar Rp 2.807,41 triliun atau mengalami kontraksi 0,83 persen dibandingkan tahun 2013. Penurunan terjadi pada beberapa instrumen kecuali pada instrumen uang dan simpanan, surat berharga jangka pendek, modal saham dan penyertaan, surat berharga jangka panjang, cadangan asuransi dan pensiun, kredit dagang, serta rekening antar bank. Selama tahun 2014, modal saham dan penyertaan menjadi instrumen yang paling menarik untuk berinvestasi, dimana kontribusinya terhadap investasi finansial adalah paling besar yaitu 28,75 persen atau senilai Rp 807,22 triliun. Kemudian diikuti uang dan simpanan serta kredit masing-masing dengan kontribusi 23,11 persen dan 15,72 persen.

Tabel 4.8 menggambarkan perubahan kepemilikan saham masing-masing sektor selama tahun 2014. Sektor Perusahaan Swasta Non Finansial merupakan sektor yang paling dominan dalam menempatkan dananya di instrumen ini yaitu sebesar Rp 381,79 triliun atau 47,30 persen dari seluruh penempatan. Diikuti sektor Luar negeri yang menempatkan dananya sebesar Rp 309,88 triliun (38,39 persen). Sedangkan sektor rumah tangga menambah investasinya pada instrumen ini (*net buying*), yaitu sebesar Rp 94,51 triliun. Sektor lain yang melakukan *net selling* pada instrumen ini adalah Bank Indonesia yaitu sebesar Rp 0,03 Triliun.

Sektor	Penambahan/ Pengurangan	%
(1)	(2)	(3)
1. Bank Indonesia	-0.03	-0.00
2. Perbankan	1.91	0.24
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank	9.66	1.20
4. Rumah Tangga	94.51	11.71
5. Pemerintah Umum	5.60	0.69
6. Perusahaan Pemerintah	3.91	0.48
7. Perusahaan Swasta Non Finansial	381.79	47.30
8. Luar Negeri	309.88	38.39
Jumlah	807.22	100.00

Berkaitan dengan kepemilikan investasi, menarik untuk disimak bagaimana pola kegiatan investasi dari investor asing di pasar keuangan domestik. Tabel 4.9 memperlihatkan perubahan kepemilikan beberapa jenis investasi dari investor asing di pasar keuangan domestik.

**Tabel 4.9 Investasi Luar Negeri di Pasar Keuangan Domestik
Menurut Jenis Investasi, Tahun 2014 (Triliun Rupiah)**

Jenis Investasi	INVESTASI LN	TOTAL INVESTASI	% TERHADAP TOTAL INVESTASI
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cadangan Valas Pemerintah	-2.28	-4.06	56.08
02. Klaim dalam Valas Lainnya	0.00	0.00	0.00
03. Uang dan Simpanan	18.02	648,76	2,78
04. Surat Berharga Jangka Pendek	212.72	297.96	71.39
05. Kredit	39.16	441.42	8.87
06. Modal Saham dan Penyertaan	309.88	807.22	38.39
07. Surat Berharga Jangka Panjang	37.07	358.39	10.34
a. Surat Berharga Pemerintah	29.14	214.71	13.57
b. Surat Berharga Lainnya	7.93	143.68	5.52
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	0.00	52.72	0.00
09. Kredit Dagang	0.45	30.19	1.50
10. Rekening Antar Bank	0.00	17.44	0.00
11. Rupa-rupa	48.32	157.38	30.70

Pada tabel tersebut terlihat bahwa investor asing selama tahun 2014 telah menguasai beberapa instrumen finansial, di antaranya dalam surat berharga jangka pendek, serta modal saham dan penyertaan. Bahkan dalam surat berharga pemerintah, kepemilikan sektor ini mencapai 5,52 persen. Sedangkan pada surat berharga jangka pendek serta modal saham dan penyertaan, penambahan kepemilikan dari investor asing terhadap total penambahannya masing-masing sebesar 71,39 persen (modal saham dan penyertaan), dan 38,39 persen (surat berharga lainnya). Selain menambah investasi dalam beberapa instrumen, investor asing selama tahun 2014 juga melepas investasinya, diantaranya cadangan valas pemerintah. Sehingga pada instrumen cadangan valas pemerintah, investor asing melakukan net selling hingga Rp 2,28 triliun.

4.4 PERKEMBANGAN CELAH TABUNGAN DAN INVESTASI (S-I Gap) TAHUN 2010-2014

Tabel 4.10 menggambarkan nilai celah tabungan dan investasi (S-I Gap) menurut sektor selama tahun 2010-2014. S-I Gap (Saving Investment Gap) dapat menggambarkan kemampuan suatu sektor untuk memberikan pinjaman bagi sektor lain (net lending) atau memperoleh hutang dari sektor lain (net borrowing) dalam membiayai investasi non finansialnya. Dalam kaitan dengan sektor Luar Negeri (LN), jika S-I Gap sektor ini negatif berarti sektor LN memperoleh pinjaman dari sektor domestik. Dalam hal ini sektor domestik mengalami net lending, begitu pula sebaliknya.

**Tabel 4.10 S-I Gap Menurut Sektor
Tahun 2010-2014 (Triliun Rupiah)**

SEKTOR (1)	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013*) (5)	2014**) (6)
A. BUKAN KEUANGAN	-98.08	-171.12	-486.22	-495.13	-602.79
1. Pemerintah	8.28	-11.03	-31.33	-64.94	26.84
2. Perusahaan	-361.11	-502.91	-811.89	-723.69	-1,091.58
- Pemerintah	-148.23	-33.75	-180.02	-226.37	-48.97
- Swasta +)	-212.88	-469.16	-631.87	-497.31	-1,042.60
3. Rumah Tangga	254.75	342.82	357.00	293.49	461.95
B. KEUANGAN	17.08	60.59	104.18	134.22	277.52
4. Bank ++)	7.39	39.77	64.71	123.89	260.03
5. Bukan Bank	9.68	20.82	39.47	10.34	17.48
C. LUAR NEGERI	81.00	110.53	382.05	360.91	325.27
6. Luar Negeri	81.00	110.53	382.05	360.91	325.27
JUMLAH	-	-	-	-	-
*) angka sementara	+) terdiri dari perusahaan swasta non finansial				
***) angka sangat sementara	++) termasuk Bank Sentral				

Selama tahun 2010-2014, sektor Perusahaan senantiasa mengalami *net borrowing*. Kekurangan dana tersebut dapat disediakan oleh sektor domestik, terutama sektor Rumah Tangga. Jika sektor domestik tidak dapat memenuhi kebutuhan dana tersebut, maka akan dipenuhi dari sektor LN. Dalam hal ini sektor LN mengalami *net lending*, sebaliknya sektor domestik mengalami *net borrowing*. Kondisi tersebut dapat terlihat selama tahun 2010-2014.

Berbeda dengan sektor Perusahaan yang merupakan sektor defisit, sektor Rumah Tangga dan Keuangan adalah sektor surplus. Sektor-sektor ini memiliki kemampuan untuk memberi pinjaman kepada sektor lain yang kekurangan dana. Selama tahun 2010-2014 rata-rata surplus sektor Rumah Tangga mencapai Rp 342,00 triliun pertahun, dan rata-rata surplus sektor Keuangan hanya sebesar Rp 118,72 triliun pertahun. Sedangkan rata-rata defisit pada sektor Perusahaan adalah sebesar Rp 698,24 triliun pertahun. Sehingga selama periode tersebut masih diperlukan tambahan dana dari sektor LN untuk menutupi kekurangan dana pada sektor perusahaan.

4.5 TINJAUAN NAD SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), TAHUN 2014

Peran intermediasi perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam LKBB cukup strategis dan berpotensi besar dalam memengaruhi terjadinya transaksi finansial secara keseluruhan. Dengan pertimbangan tersebut, maka arus dana sektor LKBB selama tahun 2014 akan dianalisis tersendiri dalam tulisan ini. Sektor-sektor dalam LKBB sebenarnya berjumlah cukup banyak, namun dalam bab ini hanya akan diuraikan pada 4 (empat) sektor LKBB saja. Pertimbangannya adalah empat sektor tersebut mempunyai pengaruh yang nyata terhadap kegiatan sektor LKBB secara keseluruhan. Keempat sektor LKBB tersebut adalah : Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Dana Pensiun, dan Perusahaan Pegadaian⁸.

4.5.1. Tabungan Bruto, Investasi Non Finansial, dan *S-I Gap* LKBB 2014

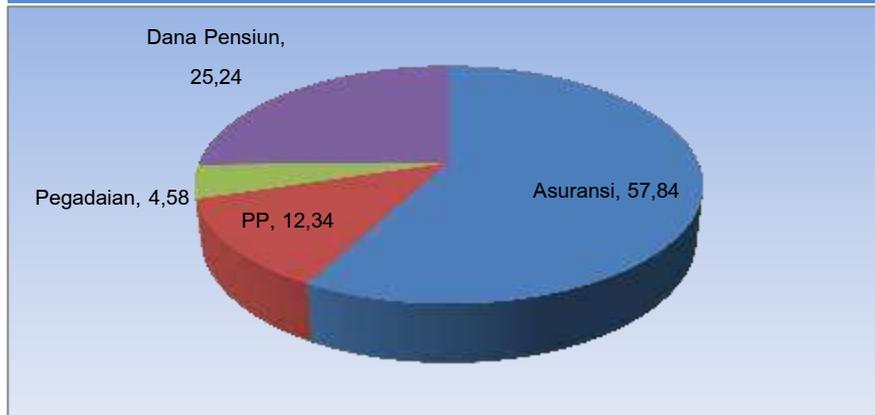
Pada Tabel 15 (yang disajikan pada lampiran) terlihat bahwa selama tahun 2014, tabungan bruto yang tercipta oleh LKBB yaitu sebesar Rp 37,29 triliun⁹ atau berkontribusi sebesar 1,02 persen dari total tabungan bruto. Tabungan bruto tersebut lebih kecil dibandingkan tabungan bruto yang terjadi pada tahun sebelumnya (Rp 45,49 triliun). Pada saat yang sama investasi non finansial selama tahun 2014 juga meningkat sebesar Rp 19,80 triliun.



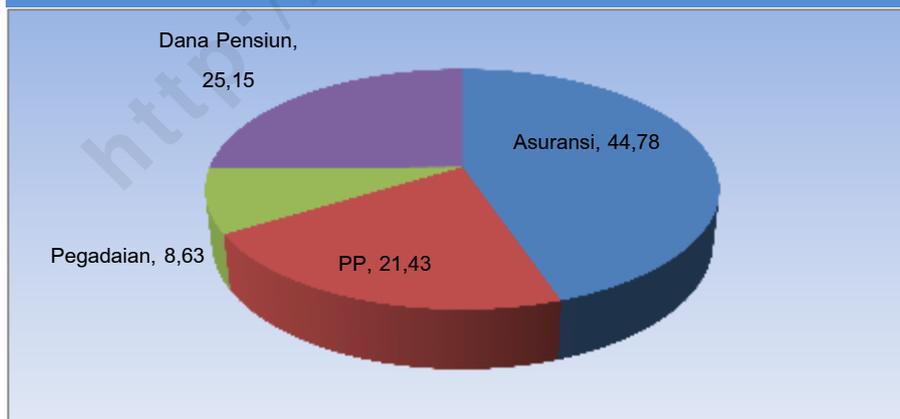
Akibat kenaikan investasi non finansial selama tahun 2014, pinjaman neto (*S-I gap*) sektor LKBB menjadi Rp 17,48 triliun. Penurunan tabungan bruto LKBB dibandingkan tahun sebelumnya ini secara tidak langsung merupakan akibat dari menurunnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan kinerja perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan pegadaian di tahun 2014.

⁸Untuk selanjutnya LKBB akan diwakili oleh ke empat sektor ini

⁹Turun 18,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik 4.5 Komposisi Tabungan Bruto Menurut Sektor-sektor LKBB,

Jika diamati dari kinerja sektoralnya, tabungan bruto sektor LKBB sebagian besar berasal dari Perusahaan Asuransi yang kontribusinya mencapai 57,84 persen dari total tabungan bruto LKBB. Kontribusi tersebut lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 47,78 persen dari total tabungan bruto LKBB. Meskipun demikian, penambahan tabungan bruto Perusahaan Asuransi di tahun 2014 (Rp 21,57 triliun) lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya (Rp 21,73 triliun) atau turun sebesar 0,75 persen. Penurunan tabungan bruto dibandingkan tahun sebelumnya juga terjadi pada Perusahaan Pembiayaan (71,30 persen) dan Pegadaian (65,73 persen), sedangkan tabungan bruto Dana Pensiun meningkat 244,17 persen.

Grafik 4.6 Proporsi S-I Gap LKBB Menurut Sektor, Tahun 2014 (Persen)

Proporsi *S-I gap* tertinggi pada LKBB tahun 2014 terjadi pada Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun masing-masing sebesar 44,78 persen dan 25,15 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Perusahaan Asuransi mengalami penurunan proporsi *S-I gap* sebesar 15,97 persen, sedangkan proporsi *S-I gap* Dana Pensiun meningkat sebesar

25,35persen. Penurunan *S-I gap* Perusahaan Asuransi terjadi karena tabungan brutonya mengalami penurunan sedangkan investasi nonfinansialnya mengalami peningkatan yang besar, sebaliknya pada Dana Pensiun peningkatantabungan brutonya lebih besar dibandingkan peningkatan investasi nonfinansial sehingga *S-I gap* meningkat.

4.5.2. Investasi Finansial LKBB 2014

Sebagai bagian dari upaya ekspansi kegiatan usahanya, maka di samping meningkatkan investasi riil, LKBB juga melakukan investasi finansial. Hampir sebagian besar aset yang dimiliki LKBB adalah dalam bentuk aset finansial. Selama tahun 2014 LKBB menambah investasi finansialnya dalam berbagai instrumen sebesar Rp 98,69 triliun. Selain menambah investasi finansialnya, sektor ini juga mengurangi investasi finansialnya di beberapa instrumen sebesar Rp 1,07 triliun. Sehingga secara neto masih terjadi penambahan investasi finansial sebesar Rp 97,61 triliun.

**Tabel 4.11 Perubahan Portofolio Investasi Finansial LKBB, Tahun 2014
(Triliun Rupiah)**

Jenis Investasi Finansial	Penambahan	Pengurangan	Neto
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Cadangan Valas Pemerintah			
02. Klaim dalam Valas Lainnya			
03. Uang dan Simpanan	43.93		43.93
04. Surat Berharga Jangka Pendek	5.44		5.44
05. Kredit	26.00		26.00
06. Modal Saham dan Penyertaan	9.66		9.66
07. Surat Berharga Jangka Panjang		1.07	(1.07)
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun			
09. Kredit Dagang			
10. Rekening Antar Bank			
11. Rupa-rupa	13.66		13.66
Jumlah	98.69	1.07	97.61

Penambahan aset finansial didominasi oleh penambahan uang dan simpanan (Rp 43,93 triliun), diikuti kredit (Rp 26,00 triliun), modal saham dan penyertaan (Rp 9,66 triliun) serta surat berharga jangka pendek (Rp 5,44 triliun). Sedangkan, sektor LKBB mengurangi aset finansialnya pada surat berharga jangka panjang (Rp 1,07 triliun). Dari segi pembiayaan investasi, sektor-sektor LKBB menggunakan berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sumber pembiayaan internal berasal dari *S-I gap*, sedangkan sumber eksternalnya berasal dari transaksi di pasar keuangan. Sumber pembiayaan eksternal ini akan menjadi kewajiban bagi LKBB. Selama tahun 2014, LKBB mampu mendapatkan sumber dana eksternal sebesar Rp 98,81

triliun. Sebagian besar sumber dana eksternal tersebut adalah cadangan asuransi dan pensiun (Rp 52,72 triliun), kredit (Rp 17,10 triliun) dan surat berharga jangka panjang (Rp 0,56 triliun). Peningkatan cadangan asuransi dan pensiun terutama terjadi pada Perusahaan Asuransi (Rp 28,67 triliun) dan Perusahaan Dana Pensiun (Rp 24,05 triliun). Peningkatan kredit masing-masing terjadi pada Perusahaan Asuransi (Rp 3,76 triliun), Perusahaan Pembiayaan (Rp 12,77 triliun), Pegadaian (Rp 0,33 triliun) dan Perusahaan Dana Pensiun (Rp 0,24 triliun). Sedangkan, peningkatan surat berharga jangka panjang terutama terjadi pada Pegadaian (Rp 0,55 triliun).

**Tabel 4.12 Sumber Pembiayaan Investasi Finansial LKBB, Tahun 2014
(Triliun Rupiah)**

Jenis Sumber Pembiayaan (1)	Penambahan (2)	Pengurangan (3)	Neto (4)
SUMBER EKSTERNAL	98.81	18.68	80.13
01. Cadangan Valas Pemerintah			
02. Klaim dalam Valas Lainnya			
03. Uang dan Simpanan			
04. Surat Berharga Jangka Pendek		18.64	(18.64)
05. Kredit	17.10		17.10
06. Modal Saham dan Penyertaan		0.04	(0.04)
07. Surat Berharga Jangka Panjang	0.56		0.56
08. Cadangan Asuransi dan Pensiun	52.72		52.72
09. Kredit Dagang			
10. Rekening Antar Bank			
11. Rupa-rupa	28.44		28.44
SUMBER INTERNAL	17.48		17.48
12. S-I Gap	17.48		17.48
Jumlah	116.30	18.68	97.61

Selain menambah kewajiban finansialnya pada beberapa instrumen, LKBB juga mengurangi kewajiban finansialnya selama tahun 2014 pada instrumen surat berharga jangka pendek sebesar Rp 18,64 triliun serta modal saham dan penyertaan sebesar Rp 0,04 triliun. Dengan demikian, secara neto kewajiban sektor LKBB masih bertambah sebesar Rp 97,61 triliun. Kewajiban (neto) tersebut merupakan dana yang siap digunakan untuk pembiayaan investasi finansial yang dilakukan oleh LKBB.

4.5.3 Gambaran Ringkas Kegiatan Investasi Sektor-Sektor LKBB Tahun 2014

Perusahaan Asuransi

Perusahaan Asuransi merupakan sektor yang paling berpengaruh dalam LKBB. Hal ini disebabkan total aset yang dihasilkan merupakan yang terbesar yaitu mencapai 52,84 persen dari total aset LKBB pada tahun 2013. Selama tahun 2013 juga aset sektor Perusahaan Asuransi bertambah sebesar Rp 53,33 triliun. Sebagian besar berupa aset finansial yang bertambah Rp 48,31 triliun.

**Tabel 4.13 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi
Sektor Perusahaan Asuransi, Tahun 2014
(Triliun Rupiah)**

Jenis Portofolio Investasi (1)	Nilai (2)	Sumber Pembiayaan Investasi (3)	Nilai (4)
INVESTASI NON FINANSIAL	13,74	SUMBER INTERNAL	21,57
		Tabungan Bruto	21,57
INVESTASI FINANSIAL	48,31	SUMBER EKSTERNAL	40,48
01. Uang dan Simpanan	24,74	01. Surat Berharga Jangka Pendek	(18,59)
02. Surat Berharga Jangka Pendek	5,35	02. Kredit	3,76
03. Kredit	5,44	03. Modal Saham dan Penyertaan	
04. Modal Saham dan Penyertaan	5,94	04. Surat Berharga Jangka Panjang	
05. Surat Berharga Jangka Panjang	1,13	05. Cadangan Asuransi dan Pensiun	28,67
06. Rekening Antar Bank		06. Rupa-rupa	26,64
07. Rupa-rupa	5,71	07. Klaim dalam Valas Lainnya	
08. Klaim dalam Valas Lainnya			
Jumlah	62,05	Jumlah	62,05

Penambahan aset finansial sebesar itu sebagian besar berupa uang dan simpanan, modal saham dan penyertaan, serta rupa-rupa masing-masing sebesar Rp 24,74 triliun, Rp 5,94, dan Rp 5,71 triliun. Untuk membiayai investasinya baik investasi non finansial (fisik) maupun investasi finansial, sektor ini menggunakan sumber dana, baik internal¹⁰ maupun eksternal¹¹. Dana internal selama tahun 2014 meningkat sebesar Rp 21,57 triliun, sedangkan dana eksternalnya meningkat sebesar Rp 40,48 triliun. Sebagian besar dana eksternal berasal dari cadangan asuransi dan dana pensiun yang selama tahun 2013 bertambah sebesar Rp 28,67 triliun. Sumber pembiayaan eksternal lainnya berasal dari rupa-rupa sebesar 26,64 triliun. Selain digunakan untuk investasi, sumber dana yang diperoleh sebagiannya juga digunakan untuk mengurangi kewajibannya berupa surat berharga jangka pendek. Selama tahun 2014 surat berharga jangka pendek sektor ini berkurang sebesar 18,59 triliun.

¹⁰ Berupa tabungan bruto

¹¹ berupa kewajiban finansial

Perusahaan Pembiayaan (PP)

Kondisi perekonomian makro, terutama perekonomian global membawa dampak terhadap kinerja sektor ini. Hal ini tercermin dari penambahan tabungan bruto sektor ini sebesar Rp 4,60 triliun pada tahun 2014, turun 71,3 persen dari tahun sebelumnya.

**Tabel 4.14 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi
Sektor Perusahaan Pembiayaan, Tahun 2014
(Triliun Rupiah)**

Jenis Portofolio Investasi (1)	Nilai (2)	Sumber Pembiayaan Investasi (3)	Nilai (4)
INVESTASI NON FINANSIAL	0,85	SUMBER INTERNAL	4,60
		Tabungan Bruto	4,60
INVESTASI FINANSIAL	18,96	SUMBER EKSTERNAL	15,21
01. Klaim dalam Valas Lainnya		01. Klaim dalam Valas Lainnya	
02. Uang dan Simpanan	1,63	02. Surat Berharga Jangka Pendek	(0,05)
03. Surat Berharga Jangka Pendek	(0,02)	03. Kredit	12,77
04. Kredit	18,18	04. Modal Saham dan Penyertaan	
05. Modal Saham dan Penyertaan	0,10	05. Surat Berharga Jangka Panjang	
06. Surat Berharga Jangka Panjang	(0,00)	06. Rupa-rupa	2,49
07. Rekening Antar Bank			
08. Rupa-rupa	(0,93)		
Jumlah	19,81	Jumlah	19,81

Terkait pembiayaan investasi, sektor Perusahaan Pembiayaan sebagai institusi intermediasi tidak memiliki akses sumber dana yang spesifik seperti halnya LKBB lain. Sehingga untuk mendukung kegiatan investasinya, sektor ini sangat tergantung pada perolehan tabungan bruto serta aliran dana eksternal terutama dalam bentuk kredit perbankan. Bila dilihat dari struktur sumber pendanaannya, selama tahun 2014 sumber dana utama sektor ini berasal dari tabungan bruto, kredit dan rupa-rupa.

Namun seperti terlihat pada Tabel 4.14, sumber dana utama Perusahaan Pembiayaan pada tahun 2014 berasal dari kredit dan rupa-rupa yang bertambah masing-masing sebesar Rp 12,77 triliun dan 2,49 triliun. Selain untuk investasi sumber dana yang diperoleh sebagiannya juga digunakan untuk mengurangi kewajibannya berupa Surat Berharga Jangka Pendek. Selama tahun 2014 surat berharga jangka pendek sektor ini berkurang sebesar 0,05 triliun. Secara neto kewajiban Perusahaan Pembiayaan masih bertambah sebesar Rp 19,84 triliun.

pada tahun 2013 sebesar 5,01 triliun rupiah atau nilai kenaikannya hampir 2 kali lipat dari kenaikan aset INF tahun sebelumnya. Aset IF juga meningkat sebesar Rp 28,67 triliun atau meningkat 17 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Jenis Portofolio Investasi (1)	Nilai (2)	Sumber Pembiayaan Investasi (3)	Nilai (4)
INVESTASI NON FINANSIAL	5,01	SUMBER INTERNAL	9,41
		Tabungan Bruto	9,41
INVESTASI FINANSIAL	28,67		
01. Uang dan Simpanan	17,58	SUMBER EKSTERNAL	24,28
02. Surat Berharga Jangka Pendek	0,11	01. Kredit	0,24
03. Modal Saham dan Penyertaan	3,61	02. Cadangan Asuransi dan Pensiun	24,05
04. Surat Berharga Jangka Panjang	(2,21)	03. Surat Berharga Jangka Panjang	
05. Rekening Antar Bank		04. Rupa-rupa	(0,01)
06. Kredit	0,95		
07. Rupa-rupa	8,62		
Jumlah	33,69	Jumlah	33,69

Instrumen aset-aset finansial selama tahun 2014 pada umumnya mengalami pertambahan (lihat Tabel 4.15). Jenis investasi yang menjadi pilihan utama dari pengurus dana pensiun dalam menempatkan dana kelolaannya adalah berupa Uang dan Simpanan. Penambahan Uang dan Simpanan mencapai 17,58 triliun pada tahun 2014. Perusahaan Dana Pensiun juga banyak menempatkan dananya berupa modal saham penyertaan (Rp 3,61 triliun). Sementara itu, aset finansial Perusahaan Dana Pensiun berupa Surat Berharga Jangka Panjang menurun drastis sebesar 2,21 triliun. Padahal pada tahun sebelumnya, penambahan pada aset berupa Surat Berharga Jangka Panjang mencapai Rp 2,64 triliun.

Dari segi pembiayaan investasi, sumber pembiayaan utama selama tahun 2014 berasal dari hutang iuran anggota Perusahaan Dana Pensiun (cadangan pensiun) dan tabungan bruto masing-masing meningkat sebesar Rp 24,28 triliun dan Rp 9,41 triliun. Sumber pembiayaan dari cadangan pensiun dan tabungan bruto meningkat masing-masing sebesar 3 kali lipat dan 11 kali lipat. Pada Tabel 4.15 terlihat pula bahwa sektor ini selain menambah kewajibannya juga mengurangi kewajibannya berupa instrumen rupa-rupa sebesar Rp 0,01 triliun.

Pegadaian

Gambaran mengenai sektor pegadaian dalam tulisan ini mengacu kepada kinerja dari PT (Pesero) Pegadaian¹². Walaupun total aset perusahaan ini paling kecil di antara LKBB lainnya (hanya sebesar 1,59 persen aset LKBB), selama tahun 2014 perusahaan ini mengalami penurunan investasi nonfinansial pada tahun 2014 menjadi Rp 0,02 triliun dibandingkan tahun 2013 yang sebesar Rp 4,02 triliun. Selama tahun 2014, sektor ini memperoleh dana dari kredit sebesar 0,33 triliun meningkat dari tahun 2013 sebesar Rp -1,72 triliun, surat berharga jangka panjang (obligasi) sebesar Rp 0,56 triliun. Sedangkan sumber dana internal (tabungan bruto) meningkat sebesar Rp 1,71 triliun. Peningkatan sumber dana internal ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4,99 triliun. Informasi sumber dana yang berasal dari saham tidak relevan karena sesuai dengan status hukum perusahaan yang berbentuk Perusahaan Umum. Sehingga, modal perusahaan ini bukan berbentuk saham tetapi berasal dari penyertaan modal Pemerintah. Ini berarti, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang 100 persen saham Perum Pegadaian.

**Tabel 4.16 Perubahan Portofolio Investasi dan Sumber Pembiayaan Investasi
Sektor Perusahaan Pegadaian, Tahun 2014 (Triliun Rupiah)**

Jenis Portofolio Investasi (1)	Nilai (2)	Sumber Pembiayaan Investasi (3)	Nilai (4)
INVESTASI NON FINANSIAL	0,20	SUMBER INTERNAL	1,71
		Tabungan Bruto	1,71
INVESTASI FINANSIAL	1,68	SUMBER EKSTERNAL	0,17
01. Uang dan Simpanan	(0,01)	01. Surat Berharga Jangka Pendek	
02. Kredit	1,43	02. Kredit	0,33
03. Cadangan Asuransi dan Pensiun		03. Surat Berharga Jangka Panjang	0,56
04. Rupa-rupa	0,26	04. Kredit Dagang	
		05. Modal Saham dan Penyertaan	(0,04)
		06. Rupa-rupa	(0,68)
Jumlah	1,88	Jumlah	1,88

¹²Sebagai institusi yang bergerak dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah

4.6 PERCEPATAN UANG BEREDAR (*VELOCITY OF MONEY*) DAN PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN (*FINANCIAL DEEPENING*)

4.6.1. Percepatan Uang Beredar (*Velocity of Money*)

Velocity of Money (V) merupakan suatu ukuran yang biasanya digunakan untuk melihat kecepatan perputaran uang beredar. Peredaran uang disebabkan adanya transaksi-transaksi ekonomi yang melibatkan berbagai pihak dalam suatu perekonomian. Jika *V* rendah artinya perputaran uang yang beredar lambat atau dengan kata lain masyarakat memegang uang lebih lama sebelum uang itu akhirnya digunakan untuk transaksi. Sebaliknya, jika *V* tinggi berarti terjadi perputaran uang yang sangat cepat atau masyarakat tidak berlama-lama untuk menggunakan uang dalam melakukan transaksi.

Sebagai contoh sederhana, pada suatu periode, A menjual barang dagangannya ke B sebesar Rp50 ribu, maka *V* yang terjadi adalah 1. Selanjutnya jika A menggunakan uang Rp50 ribu tersebut untuk membayar jasa perbaikan barang misalnya, maka terjadi perpindahan uang (*V*) satu kali lagi. Walaupun secara nominal uangnya masih yang sama yaitu Rp50 ribu namun secara agregat jumlah uang yang beredar adalah Rp100 ribu, sehingga perpindahan uang yang terjadi ada sebanyak 2 kali atau:

$$V = \frac{100}{50} = 2$$

Velocity of money dapat juga dipakai sebagai ukuran dalam menentukan inflasi. Disamping itu fluktuasi yang terjadi dalam *velocity of money* biasanya selalu diikuti dengan fluktuasi pada suku bunga (*interest rate*).

Secara umum *Velocity of Money* diukur dengan rumus:

$$V = \frac{PDB}{M_1}$$

Di mana : *V* = *Velocity of Money*

PDB= Produk Domestik Bruto

*M*₁ = Uang beredar sempit

4.6.2. Pendalaman Sektor Keuangan (*Financial Deepening*).

Pendalaman sektor Keuangan(*financial deepening*) merupakan salah satu langkah penting dalam upaya mengembangkan pasar keuangan suatu negara. Memperdalam pasar keuangan juga dapat dilakukan sebagai upaya untuk menarik eksekutif likuiditas di perekonomian

dan memperkecil risiko gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan yang berasal dari gejolak nilai tukar maupun fluktuasi di pasar saham atau obligasi.

Pasar keuangan yang dalam mempunyai beberapa efek positif, yaitu:

- (i) Dari sisi dunia usaha, pasar keuangan yang dalam diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan aktivitas ekonomi dengan tersedianya berbagai alternatif pembiayaan.
- (ii) Dari sisi investor, pasar keuangan yang dalam memberikan beragam pilihan instrumen investasi sehingga mereka dapat mengoptimalkan imbal hasil dari investasinya.
- (iii) Dapat mendorong lebih banyak investor untuk menanamkan dananya di pasar keuangan sehingga dapat berdampak positif terhadap pembiayaan ekonomi.

Upaya yang perlu dilakukan untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam adalah dengan memperkaya instrumen investasi, seperti instrumen berjangka panjang maupun instrumen *structured product* dan *derivative product* yang dapat digunakan sebagai instrumen *hedging* atau sebagai asuransi transaksi keuangan. Hal ini perlu diupayakan karena keterbatasan instrumen investasi akan mengakibatkan investor menjadi kurang aktif dalam melakukan transaksi sehingga pasar keuangan menjadi tidak likuid. Indikator yang lazim digunakan untuk melihat kedalaman sektor keuangan adalah rasio kewajiban likuid dari sistem keuangan terhadap Produk Domestik Bruto, dalam hal ini M2/PDB (King dan Levine, 1993).

4.6.3. Uraian Ringkas *Velocity of Money* dan *Financial Deepening* Indonesia Tahun 2010-2014

Pada bagian ini akan diuraikan secara ringkas tentang perkembangan *velocity of money* (V) dan *financial deepening* (FD) selama periode 2010-2014. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu secara ringkas mengenai agregat moneter lainnya, yaitu perkembangan uang beredar.

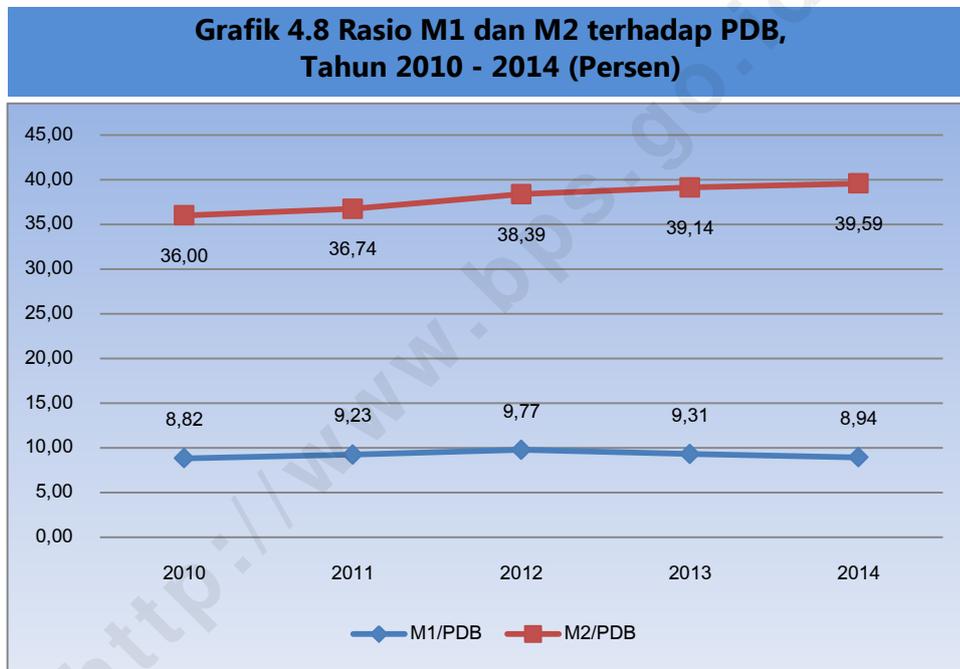
Tabel 4.17 Uang Beredar dan Produk Domestik Bruto Tahun 2010-2014

Tahun	Uang Beredar (Triliun Rp) ¹				PDB ² (Triliun Rp)	Velocity (PDB/M1)	Rasio (%)	
	M1	Uang Tunai	Surat Berharga Selain Saham	M2			M1/PDB	M2/PDB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2010	605,41	1.856,72	9,07	2.471,21	6.864,13	11,34	8,82	36,00
2011	722,99	2.139,84	14,39	2.877,22	7.831,73	10,83	9,23	36,74
2012	841,65	2.455,44	10,42	3.307,51	8.615,70	10,24	9,77	38,39
2013	887,11	2.817,97	22,81	3.727,89	9.524,74	10,74	9,31	39,14
2014	942,22	3.209,48	21,63	4.173,33	10.542,69	11,19	8,94	39,59

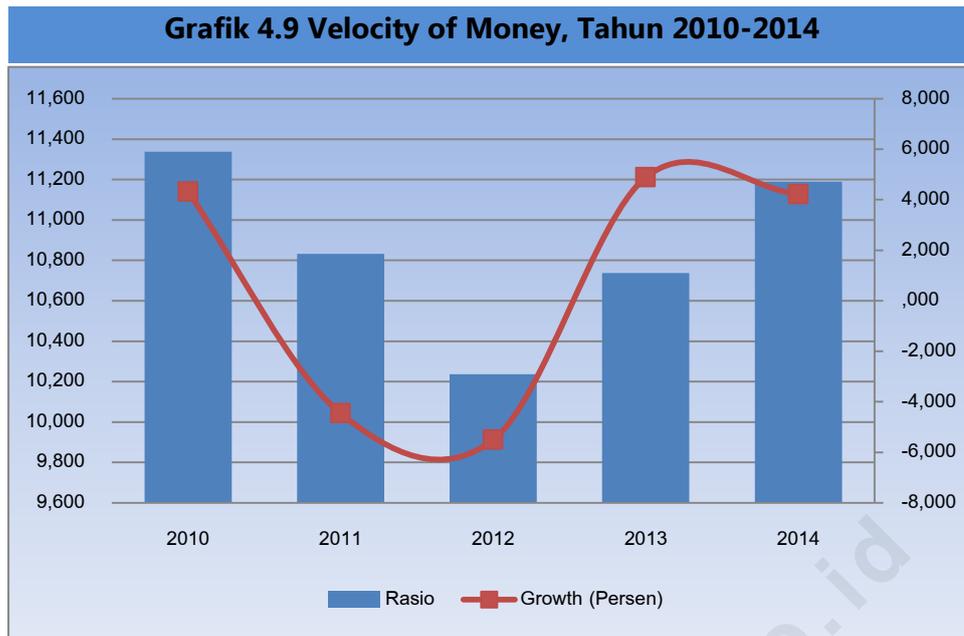
Sumber: ¹) Statistik Ekonomi-Keluangan Indonesia, Bank Indonesia

²) Pendapatan Nasional Indonesia

Perkembangan uang beredar sempit (M1) dan uang beredar luas (M2) serta kaitannya dengan Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 2010-2014 ditunjukkan pada Tabel 4.17. Posisi M2 pada suatu periode sangat dipengaruhi oleh posisi uang kuasi. Selama periode 2010-2014 kontribusi uang kuasi terhadap pembentukan M2 rata-rata sebesar 75,25 persen. Kontribusi lainnya ditentukan oleh M1 yang rata-rata kontribusinya terhadap M2 sebesar 24,29 persen, dan sisanya sebesar 0,46 persen berasal dari surat berharga selain saham. Pertumbuhan uang kuasi meningkat lebih pesat dibandingkan pertumbuhan M1. Selama periode 2010-2014, uang kuasi tumbuh rata-rata sebesar 14,62 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan M1 yang rata-rata tumbuh sebesar 12,96 persen. Hal ini mencerminkan bahwa uang kuasi lebih diminati untuk dimiliki oleh masyarakat dibandingkan uang kuasi.



Gambaran lain yang menunjukkan keadaan perekonomian nasional dalam kaitannya dengan uang beredar adalah pendalaman sektor keuangan (financial deepening). Kondisi pendalaman pasar uang Indonesia selama periode 2010 – 2014 dapat dilihat dari Grafik 4.8. Untuk kasus Indonesia, upaya pendalaman sektor keuangan sedang dilakukan karena sektor keuangan Indonesia masih dianggap dangkal (shallow) dibanding beberapa negara utama di kawasan Asia. Masih dangkalnya sektor keuangan Indonesia tercermin dari perkembangan rasio M2/PDB. Pada akhir tahun 2010 rasio M2/PDB Indonesia mencapai titik terendah selama periode 2010 – 2014 yaitu sebesar 36,00 persen. Namun, seiring dengan berbagai kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah, rasio tersebut sedikit demi sedikit mengalami peningkatan.



Disamping *financial deepening*, masalah percepatan perputaran uang beredar (*velocity of money*) juga merupakan hal penting yang patut diperhatikan untuk melihat gambaran tentang stabilitas keuangan moneter. Kondisi *velocity of money* di Indonesia selama periode 2010-2014 menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal itu tercermin dari rendahnya rasio antara PDB dengan M1 selama periode tersebut yang hanya berada di kisaran angka 10 sampai 11 persen. Perlambatan perputaran uang beredar yang terjadi selama tahun 2010-2014 disebabkan pertumbuhan yang terjadi pada kedua variabel tersebut sangat berfluktuasi serta tidak sejalan antara satu dengan lainnya.

Lampiran 1
Definisi Sektor Neraca Arus Dana (NAD)
Indonesia

<http://www.bps.go.id>

DEFINISI SEKTOR NERACA ARUS DANA (NAD) INDONESIA

I. SEKTOR KEUANGAN (FINANCIAL SECTOR)

1.1 Bank Sentral (*Central Bank*)

Bank Sentral adalah lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi sbb: (1) mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran yang sah, (2) memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa, (3) melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keuangan, dan (4) sebagai pemegang kas pemerintah.

Di Indonesia fungsi-fungsi Bank Sentral dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI). Selain memiliki sejumlah fungsi, BI juga memiliki sejumlah kewajiban antara lain kewajiban atas uang kartal (uang logam dan uang kertas) yang berada di luar BI dan Kas Negara, serta simpanan giro BPUG dan sektor swasta pada BI. Kewajiban-kewajiban tersebut seringkali disebut sebagai uang primer.

Oleh karena kewenangan Bank Sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia (BI), maka dalam Neraca Arus Dana (NAD) Indonesia, neraca Bank Sentral hanya terdiri dari neraca BI.

1.2 Perbankan (*Banks*)

Sektor ini mencakup Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional, dan BPR Syariah, baik perusahaan milik pemerintah maupun swasta.

1.2.1 Bank Umum Konvensional (*Deposit Money Banks*)

Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam sistem keuangan karena dapat menciptakan uang giral dan uang kuasi. Bank Umum Konvensional terdiri dari Bank Pesero, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) devisa, BUSN non devisa, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Campuran, dan Bank Asing. Secara umum, kegiatan utama bank-bank tersebut (kecuali bank non devisa) adalah menghimpun dana masyarakat baik dalam bentuk giro, deposito berjangka maupun tabungan. Selain itu bank-bank tersebut juga memberikan atau menyalurkan kredit baik untuk modal kerja maupun untuk investasi, dan melakukan transaksi perdagangan luar negeri.

1.2.2 Bank Perkreditan Rakyat (*Rural Banks*)

Kegiatan utama BPR adalah menerima simpanan dan memberikan kredit untuk skala kecil dalam jangka pendek kepada pedagang-pedagang kecil terutama yang berada di wilayah pedesaan. Sehingga wilayah kerja BPR umumnya lebih bersifat lokal tingkat desa. Dilihat dari jenisnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdiri dari BPR-BKD dan BPR-Non BKD.

1.2.3 Perbankan Syariah (*Sharia Banks*)

Dimasukkannya konsep perbankan syariah ini sesuai dengan amanat dan semangat UU No.7 tahun 1992 yang telah meletakkan dasar bagi terwujudnya perbankan sistem ganda yaitu sistem perbankan yang memungkinkan beroperasinya bank dengan sistem bagi hasil (syariah) dan bank yang beroperasi secara konvensional. Kemudian di dalam UU perbankan yang baru yaitu UU. No.10 tahun 1998 kembali menindaklanjuti dan secara transparan telah menyebutkan tentang latar belakang diperkenalkannya sistem perbankan syariah dalam struktur perbankan di Indonesia. Menurut UU tersebut kegiatan perbankan syariah terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga dan mengembangkan pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan.

UU No. 10 tahun 1998 tersebut juga menjelaskan tiga cara dalam mengembangkan perbankan syariah yaitu (a) pendirian bank baru, (b) konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, dan (c) pembukaan kantor cabang syariah (full branch) pada bank umum konvensional.

1.3 Lembaga Keuangan Lainnya (*Other Financial Institutions*)

Sektor ini mencakup semua lembaga keuangan selain bank yang terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, Perusahaan Penunjang Asuransi, Perusahaan Dana Pensiun, Perusahaan Pegadaian, dan Pasar Modal.

1.3.1 Perusahaan Pembiayaan (*Finance Companies*)

Perusahaan Pembiayaan adalah jenis perusahaan finansial yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Cakupan kegiatan Perusahaan Pembiayaan adalah Perusahaan Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing), Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring), Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) dan Kartu Kredit (Credit Card). Perusahaan Pembiayaan secara umum dimaksudkan untuk memberikan penyaluran dana kepada para nasabah dalam bentuk pembiayaan, dan tidak dibenarkan menarik dana secara langsung dari pihak ketiga (non depositories institution) sesuai dengan undang-undang yang

berlaku. Oleh karena itu, sebagian besar sumber dana Perusahaan Pembiayaan berasal dari kredit perbankan baik bank dalam negeri maupun bank asing.

1.3.1.1 Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Kegiatan Perusahaan Pembiayaan jenis sewa guna usaha ini adalah memberikan pembiayaan (lessor) kepada para penyewa guna usaha (lease) untuk penyediaan barang-barang modal baik secara "finance lease" maupun "operating lease" dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

1.3.1.2 Pembiayaan Anjak Piutang (*Factoring*)

Anjak Piutang adalah jenis kegiatan usaha pembiayaan yang bisa dilakukan baik secara individu maupun dalam bentuk badan usaha. Kegiatan usaha Anjak Piutang adalah membeli piutang baik dalam bentuk *account receivable* maupun *promissory notes* atas dasar tingkat diskonto tertentu dari si penjual baik *with recourse* maupun *without recourse*. Anjak Piutang jenis *with recourse* berarti tanggung jawab penagihan piutang selanjutnya akan beralih kepada pihak yang melakukan anjak piutang.

1.3.1.2 Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance*)

Pembiayaan Konsumen adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah terutama untuk pengadaan barang-barang konsumsi dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

1.3.1.3 Pembiayaan Kartu Kredit (*Credit Card*)

Pembiayaan Kartu Kredit adalah jenis kegiatan usaha yang memberikan pembiayaan kepada para nasabah untuk kepentingan pembelian barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak penerbit kartu kredit. Biasanya pihak bank disebut sebagai issuer, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau pemegang kartu kreditnya disebut sebagai card holder. Pemegang kartu kredit dapat menggunakan untuk berbelanja di tempat-tempat yang sudah terdaftar sebagai penerima kartu kredit (merchant).

1.3.2 Modal Ventura (*Venture Capital*)

Modal Ventura adalah kegiatan usaha yang kegiatan utamanya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dalam jangka waktu tertentu umumnya selama sepuluh tahun, dan dapat diperpanjang kembali. Selain memberikan bantuan modal kepada PPU, perusahaan modal ventura juga seringkali memberikan bimbingan manajemen kepada PPU. Bentuk usaha modal ventura ini umumnya

dikembangkan oleh pihak swasta besar dalam rangka mewujudkan kemitraan usaha dengan perusahaan-perusahaan kecil.

1.3.3 Usaha Perasuransian (Insurance Business)

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 pasal 3, Usaha Perasuransian dibedakan menjadi dua yaitu (a) Usaha Asuransi, dan (b) Usaha Penunjang Usaha Asuransi.

1.3.3.1 Usaha Asuransi (Insurance Business)

Usaha Asuransi terdiri dari Asuransi Kerugian, Asuransi Jiwa dan Reasuransi.

1.3.3.1.1 Usaha Asuransi Kerugian (Loss Insurance Business)

Usaha Asuransi Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat risiko atas kerugian, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

1.3.3.1.2 Usaha Asuransi Jiwa (Life Insurance Business)

Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

1.3.3.1.3 Usaha Reasuransi (Reinsurance Business)

Usaha Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungjawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

1.3.3.2 Usaha Jasa Penunjang Usaha Asuransi (Insurance Supporting Business)

Usaha Jasa Penunjang Asuransi terdiri dari (i) Usaha Pialang Asuransi, (ii) Usaha Pialang Reasuransi, (iii) Usaha Penilai Kerugian Asuransi, (iv) Usaha Konsultan Aktuaria, dan (v) Usaha Agen Asuransi.

1.3.3.2.1 Usaha Pialang Asuransi (Insurance Brokerage Business)

Usaha Pialang Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

1.3.3.2.2 Usaha Pialang Reasuransi (Reinsurance Brokerage Business)

Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraaan dalam

penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi.

1.3.3.2.3 Usaha Penilai Kerugian (Loss Adjuster Business)

Usaha Penilai Kerugian adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan.

1.3.3.2.4 Usaha Konsultan Aktuarial (Actuarial Consultant Business)

Usaha Konsultan Aktuarial adalah usaha yang memberikan jasa konsultasi aktuarial.

1.3.3.2.5 Usaha Agen Asuransi (Insurance Agency Business)

Usaha Agen Asuransi adalah usaha yang memberikan jasa perantara di bidang pemasaran asuransi untuk / atas nama penanggung.

1.3.3.3 Program Asuransi Sosial (Social Insurance Program)

Sesuai dengan Undang-undang No.2 tahun 1992 tidak dikenal lagi perusahaan Asuransi Sosial seperti sebelumnya. Undang-undang itu mengatur program asuransi sosial yaitu sebagai suatu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1) dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa program asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa program asuransi sosial yang ada diantaranya adalah :

Program asuransi sosial bidang asuransi kerugian, yaitu asuransi wajib kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh BUMN PT (Pesero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Program asuransi sosial bidang asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASKES

Program asuransi sosial yang mengelola Tabungan Hari Tua (THT) dan asuransi kesehatan bagi anggota ABRI dan para karyawan sipil ABRI diselenggarakan oleh PT (Pesero) ASABRI.

Program asuransi sosial yang mengelola THT dan asuransi kematian bagi pegawai negeri sipil, diselenggarakan oleh PT (pesero) TASPEN.

Program asuransi sosial yang mengelola THT, asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja, diselenggarakan oleh PT (Pesero). Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. JAMSOSTEK).

1.3.4 Pegadaian (Pawnshops)

Mencakup usaha lembaga perkreditan pemerintah yang tugasnya membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan nilai barang jaminan yang diserahkan oleh pihak peminjam tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya.

1.3.5 Dana Pensiun (Pension Fund)

Sesuai dengan UU No.11 tahun 1992 tentang perusahaan Dana Pensiun, perusahaan ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun bertujuan untuk memelihara kesejahteraan sosial karyawan perusahaan, melalui pemberian santunan hari tua/uang pensiun. Umumnya dana yang terkumpul dari iuran peserta dan pemberi kerja selain digunakan untuk membayar tunjangan hari tua/pensiun karyawan, juga diinvestasikan dalam bentuk aset tetap, saham, maupun disimpan dalam bentuk tabungan atau deposito.

Terdapat tiga pilihan bentuk program pensiun yaitu (i) Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK), (ii) Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) dan (iii) Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). Sedangkan berdasarkan bentuk badan hukumnya, Dana Pensiun dibedakan menjadi dua yaitu (i) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan (ii) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

1.3.5.1. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (PPBK)

Pada program pensiun jenis ini, karyawan biasanya tidak perlu ikut membayar iuran, sedangkan perusahaan sebagai pemberi kerja membayar iuran dalam batas persentase tertentu dari keuntungannya dalam tahun tertentu. Dalam hal risiko, kegagalan pengolahan berada pada pihak peserta.

1.3.5.2. Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)

Pada program pensiun jenis ini, kewajiban membayar iuran ditanggung oleh pihak pemberi kerja dan peserta yang telah ditetapkan lebih dahulu berdasarkan kemampuan masing-masing pihak. Berdasarkan kesepakatan ini, dalam keadaan bagaimanapun pihak perusahaan sebagai pihak pemberi kerja harus tetap membayar iuran kepada pihak dana pensiun sesuai yang telah disepakati. Dalam hal risiko kegagalan pengolahan risiko berada pada pihak peserta.

1.3.5.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Pada jenis program ini manfaat pasti telah ditetapkan sebelumnya. Dalam program ini besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh pihak pemberi kerja berubah-ubah sesuai dengan hasil perhitungan aktuarial dan hasil pengelolaan dananya. Sedangkan bagi peserta, besarnya iuran yang harus dibayarkan oleh peserta besarnya tetap. Dalam hal risiko kegagalan pengelolaan berada pada pihak pemberi kerja. Sebaliknya jika pengelolaan dana pensiun berhasil maka akan mengurangi beban iuran pihak pemberi kerjanya.

1.4 Pasar Modal (Capital Market)

Pasar Modal adalah sarana yang dapat mempertemukan kepentingan pihak investor dengan pihak emiten. Dalam hal ini, pasar modal menjadi sarana alternatif bagi pihak perusahaan yang menginginkan sumber dana di luar kredit perbankan. Pihak perusahaan yang melakukan penawaran saham (emiten) dapat memperoleh sumber dana melalui penawaran perdana di pasar primer atau Initial Public Offering (IPO). Selain terjadi transaksi jual beli saham, di pasar modal juga dilakukan transaksi jual beli obligasi. Sarana untuk melangsungkan transaksi pasar modal di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Seperti halnya pada kegiatan peransuransian, pada kegiatan di pasar modal juga memunculkan kegiatan usaha derivatif seperti Broker Pasar Modal, Underwriter, Adjuster dan Penjamin Emisi.

II. SEKTOR BUKAN KEUANGAN (NONFINANCIAL SECTORS)

Secara umum sektor-sektor yang dicakup di sini merupakan institusi yang memanfaatkan dana dari sektor keuangan untuk memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, sektor-sektor ini tidak mempunyai wewenang dalam pengumpulan dan penyaluran dana dari dan ke masyarakat. Sektor bukan keuangan terdiri dari sektor Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, Perusahaan Swasta (Bisnis) dan Rumah Tangga.

2.1 Pemerintah (Government)

Pengertian sektor Pemerintah adalah sektor yang semata-mata melakukan kegiatan administrasi pemerintah dan melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharap balas jasa. Termasuk dalam kegiatan pemerintah juga meliputi kegiatan lembaga-lembaga pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah, tetapi tidak termasuk badan usaha milik pemerintah (BUMN dan BUMD). Dalam penyusunan NAD Indonesia, kedua sektor

tersebut (BUMN dan BUMD) dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Perusahaan Pemerintah. Sektor Pemerintah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu (i) Pemerintah Pusat dan (ii) Pemerintah Daerah.

2.1.1 Pemerintah Pusat (Central Government)

Mencakup semua unit pemerintah baik yang berada di pusat seperti: Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Pemerintah lain, serta semua unit vertikalnya yang berada di daerah. Lembaga ini umumnya melakukan jasa pelayanan umum, seperti administrasi, pertahanan dan keamanan, membuat peraturan-peraturan pemerintah, merencanakan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemakmuran masyarakat, menyelenggarakan jasa pendidikan, kesehatan, kebudayaan, rekreasi dan jasa pelayanan sosial lainnya secara cuma-cuma (di bawah tingkat harga normalnya).

2.1.2 Pemerintah Daerah (Local Government)

Mencakup semua unit kegiatan pemerintah yang berada di tingkat propinsi, kabupaten dan desa, kecuali unit vertikal pemerintah pusat di daerah. Lembaga ini mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (hak otonom).

2.2 Perusahaan Pemerintah Non Finansial (Non Financial Government Enterprises)

Mencakup semua perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang dan jasa milik pemerintah (BUMN dan BUMD) non finansial. Termasuk juga di sini Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai "badan pemerintah" yang memiliki peran dan fungsi khusus untuk mengatur kebutuhan logistik nasional.

2.2.1 Badan Usaha Milik Negara (State Enterprises)

Mencakup badan usaha milik pemerintah pusat yang bentuk badan hukumnya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Dasar Pementukan BUMN. Sedangkan tatacara pembinaan dan pengawasan BUMN diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983. Berdasarkan UU No. 9 tahun 1969, bentuk badan hukum perusahaan milik negara dibedakan menjadi: Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Perseroan (PESERO), dan Perusahaan Perseroan Terbuka (Tbk).

Pertamina dan BULOG termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah

Kementerian Negara BUMN. Badan hukum Pertamina dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971, sedangkan BULOG dibentuk berdasarkan Keppres RI No. 11 Tahun 1969.

Selain itu, masih ada BUMN yang disebut, PN atau PT (murni) yang berdiri sebelum lahirnya UU No. 9 tersebut, dan bentuk badan hukumnya diatur berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

BUMN yang dicakup di sini hanya yang bergerak di bidang non finansial, dan jenis usahanya lebih berorientasi pada usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, seperti: usaha pengangkutan, pos dan telekomunikasi, listrik dan sebagainya. BUMN-BUMN yang bergerak di bidang finansial seperti perbankan, sudah dikategorikan sebagai sektor tersendiri yaitu sektor Bank.

2.2.2 Badan Usaha Milik Daerah (Local Government Enterprises)

Sektor ini mencakup semua badan usaha milik pemerintah daerah, yang pengelolaan dan pembinaannya berada di bawah pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 tahun 1962. Jenis kegiatannya antara lain meliputi penyediaan air minum, pengelolaan pasar, penyediaan objek wisata/taman hiburan dan sebagainya. Pada umumnya, perusahaan ini berbentuk perusahaan daerah (PD) yang diatur berdasarkan peraturan daerah.

2.3 Bisnis (Business Enterprises)

Sektor ini mencakup Koperasi dan Perusahaan Swasta Non Finansial.

2.3.1 Koperasi (Cooperative)

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 1967 jo.UU No.25 Tahun 1992, yang dimaksud dengan Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melakukan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Dalam sektor ini, koperasi dibagi menjadi dua, yaitu Koperasi Perkotaan (non-KUD) dan Koperasi Pedesaan (KUD). Pembagian ini umumnya didasarkan pada wilayah kerjanya.

Koperasi yang berbentuk bank (seperti BUKOPIN) dan asuransi (Koperasi Asuransi Indonesia) berturut-turut masuk ke sektor bank umum dan asuransi. Untuk meningkatkan efisiensi, maka koperasi primer dapat membentuk berbagai jenis koperasi sekunder. Jenis koperasi sekunder dapat berupa pusat (daerah tingkat II), gabungan (propinsi), dan induk (nasional).

2.3.1.1 Koperasi Perkotaan (Non rural Cooperative)

Koperasi non-KUD umumnya adalah koperasi yang menghimpun anggota dan warga masyarakat nonpedesaan berdasarkan fungsi atau peran tertentu serta pembagian kerja atau profesi dalam masyarakat. Koperasi tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu:

- (i) Koperasi fungsional seperti pegawai negeri, ABRI, karyawan, dan lainnya.
- (ii) Golongan menurut bidang usaha seperti jasa, produksi, industri kecil dan kerajinan rakyat.
- (iii) koperasi serba usaha dan simpan-pinjam.

2.3.1.2 Koperasi Pedesaan (Rural Cooperative)

Koperasi Pedesaan (KUD) adalah jenis koperasi yang berkedudukan di desa dan yang menghimpun warga desa untuk menjalankan berbagai fungsi usaha, terutama di sektor pertanian, seperti koperasi pertanian, koperasi kopra, koperasi perikanan/nelayan, koperasi peternak, koperasi pengrajin dan simpan-pinjam.

2.3.2 Perusahaan Swasta Non finansial (Private Nonfinancial Enterprises)

Mencakup semua perusahaan nonfinansial yang berbadan hukum milik masyarakat. Kegiatan utamanya adalah memproduksi barang dan jasa dengan tujuan mencari untung. Usaha ini bisa dimiliki oleh perorangan, kelompok, gabungan perusahaan, usaha keluarga, dan sebagainya dengan maksud untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Bentuk badan hukumnya bisa berupa Perseroan Terbatas (PT), Firma (Fa), CV dan NV. Dalam kelompok ini tidak termasuk usaha rumah tangga, karena usaha rumah tangga dimasukkan sebagai bagian dari sektor rumah tangga.

2.4 Rumah Tangga (Households)

Mencakup kegiatan rumah tangga biasa, badan-badan nirlaba dan usaha rumah tangga. Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang tinggal di suatu bangunan dan biasanya mengurus kebutuhan sehari-harinya secara bersama. Badan yang tidak mencari laba mencakup badan-badan swasta yang menghasilkan jasa pelayanan rumah sakit, sekolah, yayasan, tempat peribadatan dan sebagainya. Usaha rumah tangga adalah kegiatan ekonomi tidak berbentuk badan hukum yang dilakukan oleh rumah tangga, dan risiko usahanya ditanggung seorang atau lebih anggota rumah tangga dengan tujuan menghasilkan barang dan/atau jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain, misalnya, usaha pertanian, industri/kerajinan dan sebagainya.

III. SEKTOR LUAR NEGERI (Rest of the World)

Mencakup kegiatan antara penduduk Indonesia (residen) baik individu maupun institusi dan bukan penduduk (non residen/luar negeri). Transaksi yang terjadi antara residen dengan non residen ini dicatat di dalam Neraca Pembayaran (Balance of Payments).

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 2
Definisi Kategori Transaksi
Neraca Arus Dana (NAD)
Indonesia

<http://www.bps.go.id>

DEFINISI KATEGORI TRANSAKSI NERACA ARUS DANA INDONESIA

0100 Tabungan Bruto

Tabungan Bruto merupakan jumlah dari penyusutan barang modal tetap dan tabungan neto.

0110 Penyusutan Barang Modal

Penyusutan Barang Modal (PBM) merupakan biaya penyusutan barang modal tetap (pabrik, mesin dan peralatan) karena aus/rusak dalam proses produksi yang dibebankan pada biaya operasi perusahaan. Biaya penyusutan sesungguhnya bukan merupakan pengeluaran dana. Selain itu, penyusutan barang modal juga meliputi perkiraan penyusutan rumah yang dimiliki perorangan dan barang modal tetap milik perusahaan.

0120 Tabungan Neto

Tabungan Neto merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran dari kegiatan ekonomi suatu sektor setelah dikurangi penyusutan barang modal. Penerimaan disini meliputi: pendapatan dari penjualan barang dan jasa, balas jasa faktor tenaga kerja seperti upah dan gaji, serta pendapatan kepemilikan seperti bunga dan sewa. Penerimaan juga mencakup pendapatan dari transfer (bukan transfer modal), seperti subsidi dari pemerintah yang diterima oleh sektor usaha, bantuan luar negeri yang diterima pemerintah, pensiun yang diterima oleh sektor rumah tangga, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Sedangkan pengeluaran mencakup baik pengeluaran barang dan jasa yang dibayarkan kepada sektor lain, maupun pembayaran transfer (seperti pembayaran pajak) dan dividen. Pengeluaran untuk barang modal tetap dan persediaan dikategorikan sebagai pengeluaran modal.

0200 Investasi Non finansial

Merupakan penjumlahan dari Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori.

0210 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Yang dimaksud dengan PMTB adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan bukan merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan, dan bandara, serta mesin dan peralatan.

0220 Perubahan Inventori

Perubahan Inventori adalah perubahan nilai persediaan pada akhir tahun dikurangi dengan persediaan pada awal tahun. Persediaan meliputi bahan baku, pekerjaan yang masih dalam proses dan barang jadi yang belum terjual. Termasuk juga persediaan di bidang pertanian seperti ternak dan hasil pertanian. Perubahan persediaan emas yang dikuasai oleh Bank Sentral merupakan bagian dari kategori transaksi Cadangan Valuta Asing Pemerintah (0800).

0300 Pinjaman Neto = 0100 - 0200

Pinjaman Neto merupakan selisih antara Tabungan Bruto dengan Perolehan Harta Non Finansial. Istilah ini disebut juga Celah Tabungan dan Investasi atau Saving Investment Gap (S-I Gap).

0400 Selisih Statistik = 0300 - 0500

Selisih Statistik adalah selisih antara Pinjaman Neto (sisi transaksi riil, bagian atas NAD) dan Investasi Finansial Neto (sisi finansial NAD). Penyebab utama adanya Selisih Statistik di beberapa sektor adalah adanya perbedaan sumber data antara bagian atas NAD dan sisi finansialnya.

Jika dalam persamaan akuntansi total aset sama dengan kewajiban plus kekayaan neto, maka Pinjaman Neto harus sama dengan Investasi Finansial Neto. Tetapi karena data yang diperoleh berasal dari berbagai sumber yang berbeda cakupannya, maka terjadi ketidakkonsistenan yang menimbulkan selisih tersebut.

0500 Investasi Finansial Neto = 0600 - 0700

Investasi Finansial Neto merupakan selisih antara jumlah penggunaan finansial (kenaikan harta finansial neto) dengan jumlah sumber finansial (kenaikan kewajiban finansial neto).

0600 Jumlah Penggunaan Finansial

Jumlah Penggunaan Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi aktiva. Kenaikan dari penggunaan finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0700 Jumlah Sumber Finansial

Jumlah Sumber Finansial merupakan jumlah seluruh perubahan instrumen finansial dari neraca keuangan sisi pasiva. Kenaikan sumber finansial berarti positif dan penurunannya berarti negatif.

0800 Cadangan Valuta Asing Pemerintah

Cadangan Valuta Asing (Valas) Pemerintah terdiri dari Emas Moneter, Special Drawing Rights, Posisi Cadangan di IMF, Deposito, dan Surat Berharga Dalam Valuta Asing yang dimiliki oleh Otoritas Moneter. Cadangan Valas Pemerintah adalah Aktiva Otoritas Moneter dan merupakan kewajiban sektor Luar Negeri. Dalam penghitungan Pendapatan Nasional, Emas Moneter (dalam bentuk fisik) diperlakukan sebagai hutang luar negeri.

0810 Emas Moneter

Kategori ini mencakup emas yang dimiliki atau disimpan oleh Bank Indonesia. Emas moneter mencakup juga emas yang disimpan pada lembaga keuangan luar negeri. Lawan dari aktiva finansial ini merupakan pasiva di sektor luar negeri.

0820 Special Drawing Rights (SDR)

SDR merupakan aktiva cadangan yang diciptakan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) sebagai pelengkap emas dan mata uang cadangan.

0830 Posisi Cadangan di IMF

Merupakan klaim negara kepada IMF.

0840 Cadangan Valuta Asing

Kategori ini mencakup mata uang asing yang dikuasai dan disimpan oleh Bank Indonesia, Giro dan Deposito Berjangka di bank-bank Luar Negeri, Wesel Ekspor yang didiskontokan lagi oleh bank-bank devisa di Indonesia, investasi dalam surat-surat berharga luar negeri dan klaim atas pemerintah pusat.

0850 Lainnya

Kategori ini mencakup seluruh klaim Luar Negeri Bank Indonesia yang tidak termasuk dalam kategori 0810 sampai dengan 0840.

0900 Klaim Dalam Valuta Asing Lainnya

Kategori ini mencakup semua jenis klaim valas yang tidak termasuk dalam kategori transaksi, seperti Cadangan Valas Pemerintah, Deposito Dalam Valas, Pinjaman Dalam Valas, Tagihan Jangka Pendek dan Tagihan Jangka Panjang Dalam Valas, serta Obligasi.

1000 Uang dan Simpanan (Jumlah)

Uang dan Simpanan terdiri dari seluruh jenis mata uang yang dipegang oleh penduduk, Deposito dan Giro di bank dan giro pos baik dalam rupiah maupun valas, serta Deposito dan simpanan lainnya yang dimiliki penduduk pada bank asing di Luar Negeri. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Uang Kartal dan Uang Logam yang beredar, Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Tabungan Giro Pos.

1010 Uang Dan Simpanan Dalam Valuta Asing

Kategori ini mencakup semua jenis mata uang asing yang dipegang oleh penduduk dan tabungan dalam valas yang disimpan di Bank Indonesia, bank-bank pencipta uang giral (BPUG), dan bank asing yang dinilai dalam rupiah.

1011 Uang

Kategori ini mencakup semua jenis uang kertas dan uang logam dalam valas.

1012 Giro

Kategori ini merupakan simpanan dalam mata uang asing di bank yang dapat ditarik dengan menggunakan cek.

1013 Tabungan

Kategori ini merupakan tabungan dalam mata uang asing yang dapat ditarik dengan menunjukkan buku tabungan.

1014 Deposito Berjangka

Kategori ini merupakan deposito dalam valas yang dapat ditarik jika telah disimpan dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan persetujuan antara penabung dan bank saat perjanjian dibuat.

1019 Tabungan Lainnya

Kategori ini mencakup semua tabungan dalam valas yang tidak termasuk dalam kategori 1011 sampai dengan 1014.

1020 Uang Dan Simpanan dalam Rupiah

Kategori ini mencakup semua jenis mata uang rupiah yang dipegang oleh penduduk dan simpanan pada Bank Indonesia, BPUG dan Bank Asing, Kantor Pos dan Giro dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito Berjangka.

1021 Uang Kertas dan Logam

Kategori ini mencakup uang kertas dan logam yang dipegang oleh masyarakat termasuk Kas Negara dan BPUG. Uang adalah bukti hutang Otoritas Moneter kepada masyarakat umum.

1022 Giro

Kategori ini merupakan tabungan yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek. Giro antar bank tidak termasuk dalam kategori ini, tetapi masuk kategori Klaim Antar Bank (2000).

1023 Tabungan

Tabungan merupakan tabungan yang dapat ditarik dengan menggunakan bukti buku tabungannya.

1024 Deposito Berjangka

Deposito Berjangka adalah jenis tabungan yang hanya dapat ditarik setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara bank dan depositor pada saat pembukuan tabungan.

1030 Tabungan Giro Pos Dan Koperasi

Tabungan Giro Pos merupakan hutang Kantor Pos dan Giro berupa tabungan dan giro. Sedangkan tabungan Koperasi merupakan tabungan wajib dan sukarela.

1100 Surat Berharga Jangka Pendek

Kategori ini mencakup surat tanda hutang jangka pendek yang dapat diperjual belikan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang. Surat berharga ini dapat dikeluarkan oleh perusahaan swasta atau sektor pemerintah baik dalam nilai rupiah maupun mata uang asing lainnya.

1200 Kredit (Jumlah)

Kategori ini menunjukkan jumlah pinjaman bank dan pinjaman dari institusi lainnya baik dalam rupiah maupun valas. Pinjaman merupakan hasil persetujuan antara peminjam dengan si pemberi pinjaman. Pinjaman adalah suatu instrumen finansial yang tidak dapat diperjualbelikan di pasar uang. Ciri terakhir inilah yang membedakan pinjaman dengan surat berharga jangka pendek.

1210 Kredit Bank Dalam Rupiah

Kategori ini mencakup pinjaman (kredit) dan cerukan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, BPUG, dan bank lain di Indonesia. Kredit bank dalam kategori ini biasanya digunakan untuk tujuan bisnis. Kredit bank untuk individu (bukan bisnis) digolongkan pada Kredit Konsumsi; termasuk di dalamnya kredit pemilikan barang tak bergerak. Kategori ini hanya mencakup pinjaman Bank dalam rupiah, sedangkan pinjaman Bank dalam valas dimasukkan dalam kategori Pinjaman Dalam Valas (1230).

1211 Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan untuk membiayai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari.

1212 Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit jangka panjang atau menengah yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

1213 Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk kredit pemilikan rumah. Kredit konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian mobil atau barang tahan lama lainnya untuk keperluan konsumsi. Dalam kategori ini juga termasuk Hutang Hipotek atau persetujuan penjualan yang dijamin oleh harta berwujud seperti tanah dan bangunan tempat tinggal.

1220 Kredit Institusi Lain Dalam Rupiah

Kategori ini dimaksudkan untuk menampung semua jenis pinjaman dalam rupiah yang diberikan oleh berbagai institusi selain bank. Kredit oleh lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan non finansial (Pemerintah dan Swasta) termasuk di sini.

1221 Kredit Modal Kerja

Lihat definisi 1211.

1222 Kredit Investasi

Lihat definisi 1212.

1223 Kredit Konsumsi

Kategori ini mencakup pinjaman dalam rupiah dari Perusahaan Asuransi Jiwa, Koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank lainnya.

1230 Kredit Dalam Valuta Asing

Kategori ini mencakup semua jenis pinjaman dalam valuta asing dari semua sektor ekonomi baik di dalam maupun luar negeri.

1300 Modal Saham Dan Penyertaan

Kategori ini mencakup segala jenis saham baik yang diperjualbelikan maupun tidak. Dalam kategori ini termasuk juga penyertaan modal pemerintah dan penyertaan sektor-sektor lainnya. Dalam NAD yang dicatat adalah saham baru yang diterbitkan, pembelian kembali saham serta jual-beli saham yang beredar berdasarkan harga pasar.

1400 Surat Berharga Jangka Panjang (jumlah)

Kategori ini mencakup Hutang Jangka Panjang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Kategori ini merupakan jumlah obligasi pemerintah dan surat berharga jangka panjang lainnya baik dalam nilai rupiah maupun valas. Berbeda dengan hutang, Obligasi adalah surat berharga yang dapat dipindahtangankan, tidak seperti hutang. Hutang Obligasi tidak selalu dijamin oleh harta riilnya.

1410 Surat Berharga Pemerintah (Jumlah)

Kategori ini mencakup semua surat berharga jangka panjang Pemerintah yang dijual di

dalam maupun luar negeri. Kategori ini meliputi surat berharga jangka panjang dalam nilai rupiah dan valas. Obligasi yang dikeluarkan oleh BUMN dimasukkan dalam kategori Surat Berharga Jangka Panjang Lainnya (1420).

1420 Surat Berharga Lainnya

Kategori ini mencakup surat berharga jangka panjang dalam pengertian luas, yang dikeluarkan oleh selain pemerintah. Jenis surat berharga ini dapat dikeluarkan oleh sektor dalam negeri maupun luar negeri. Surat berharga hipotek termasuk di sini, tetapi bukan untuk kredit kepemilikan rumah. Surat berharga ini dapat juga diterbitkan oleh Yayasan, Perusahaan Swasta dan BUMN.

1500 Cadangan Asuransi Dan Pensiun

Kategori ini mencakup cadangan asuransi jiwa, asuransi non jiwa, asuransi sosial dan dana pensiun. Bagi perusahaan Asuransi Jiwa dan perusahaan Dana Pensiun, transaksi ini merupakan hutang Perusahaan Asuransi Jiwa kepada pemegang polis dan hutang perusahaan dana pensiun kepada anggotanya. Bagi perusahaan Asuransi Non Jiwa transaksi ini mencakup cadangan perusahaan asuransi non jiwa yang digunakan untuk membiayai klaim yang belum dibayar atau klaim di masa yang akan datang. Cadangan teknis pada perusahaan Asuransi Non Jiwa pada dasarnya adalah harta perorangan, perusahaan dan pemerintah di semua sektor, yang tidak dapat dicatat sebagai harta pada pembukuan pemegang polis.

1800 Kredit Dagang

Kategori ini mencakup mencakup kredit jangka pendek yang terjadi dalam bisnis, berupa hutang-piutang antar penyuplai dan pembeli barang dan jasa. Kredit ini berlangsung sejak barang dan jasa diserahkan sampai dengan pembayaran diterima. Kredit Dagang bukan merupakan instrumen finansial yang dapat diperjualbelikan seperti instrumen pasar uang, maupun dinegosiasikan seperti hutang bank. Kredit Dagang antara perusahaan afiliasi termasuk dalam kategori ini. Karena arus finansial dari perusahaan dalam negeri tidak dicatat atas dasar nilai yang dikonsolidasikan, maka Kredit Dagang dalam NAD merupakan arus intra-sektor.

2000 Rekening Antar Bank

Rekening Antar Bank adalah semua jenis klaim yang terjadi antara bank yang satu dengan bank lainnya. Tidak termasuk rekening antar kantor, antar cabang dan kantor pusat, atau antar cabang dari bank yang sama. Rekening antar kantor dinetokan (sisi pasiva dikurangi dengan aktivasinya) dan dimasukkan dalam kategori Rupa-rupa (9000).

9000 Rupa-rupa

Kategori ini mencakup berbagai transaksi lainnya yang tidak termasuk di dalam semua kategori yang disebutkan di atas.

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 3
Matrik NAD Indonesia
Menurut Kategori Transaksi dan Sektor
2010-2014

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.bps.go.id>

TABEL 3. RINGKASAN NERACA ARUS
TABLE 3. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KE		
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMER
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GO
		P	S	P	S	P	S	P	S	P
		U	S	U	S	U	S	U	S	U
0100	Tabungan Bruto		(29.736)		38.842		24.408		490.747	
0200	Investasi Nonfinansial	384		1.328		14.724		236.001		181.415
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(30.121)		37.514		9.684		254.746		8.284
0400	Selisih Statistik = 0300-0500									
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(30.121)		37.514		9.684		254.746		8.284
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	260.048		476.601		149.526		373.035		21.132
0700	Jumlah Sumber Finansial		290.169		439.087		139.842		118.289	
0800	Cadangan Valas Pemerintah	227.485								
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(665)		(37)	(6.294)	(31)	2.819		24	
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	14.344	76.620	(35.494)	388.209	31.302		248.490		13.572
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	14.344	5.353	(41.507)	40.564	1.031		24.720		5.042
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		71.267	6.013	347.646	30.271		222.942		8.531
1021	Uang Kertas dan Logam		39.547	5.357		2.465		13.676		1.709
1022	Giro		31.731	17	38.696	4.877		22.152		(41)
1023	Tabungan		(11)		120.962	944		113.055		228
1024	Deposito Berjangka				175.476	21.934		66.840		5.919
1025	Simpanan Rupiah lainnya			639	12.512	51		7.220		716
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							828		
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			23.136	(327)	5.757	1.560	(736)		(6)
1200	Kredit (Jumlah)	(247)	(527)	330.185	4.693	49.670	39.392	5.589	92.642	(899)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(247)		266.714			21.627		75.720	
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				4.200	47.419	178	5.589	10.978	(877)
1230	Kredit dalam Valas		(527)	63.471	493	2.251	17.587		5.944	(22)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(224)		2.126	30.068	47.840	9.185	68.883	0	(4.792)
1400	Surat Berharga Jk Panjang	(4.468)	(3.647)	(28.105)	(1.034)	22.087	(13.598)	846		2.954
1410	Surat Berharga Pemerintah	(4.468)		(37.092)		3.876		(797)		6.755
1420	Surat Berharga Lainnya		(3.647)	8.987	(1.034)	18.211	(13.598)	1.644		(3.801)
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun					2	49.419	8.211		
1800	Kredit Dagang						3	(15.627)	(19.114)	
2000	Rekening Antar Bank	(1.709)	196.188	201.849	15.619	1.977		(150)		
9000	Rupa-rupa	25.530	21.535	(17.059)	8.153	(9.078)	51.062	57.529	44.737	10.303
	TOTAL	260.432	260.432	477.929	477.929	164.250	164.250	609.036	609.036	202.546

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

DANA INDONESIA, 2010 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2010 (IN BILLION RUPIAHS)

UANGAN/ NON FINANCIAL SECTORS					LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
INTAH	PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
VERNMENT	GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
S	P	S	P	S	P	S	P	S		
S	U	S	U	S	U	S	U	S		
189.698		104.388		1.357.585		81.004		2.256.935	Gross Saving	0100
	252.615		1.570.468					2.256.935	Non Financial Investment	0200
	(148.227)		(212.883)		81.004				Net Lending/Borrowing	0300
	(148.227)		(212.883)		81.004				Statistical Discrepancy	0400
	(119.593)		1.862.086		283.907			3.306.742	Net Financial Investment	0500
12.848		28.634		2.074.969		202.903		3.306.742	Total Financial Uses	0600
									Total Financial Resources	0700
						227.485		227.485	Official Foreign Exchange Reserve	0800
		28	(19.530)	(6.089)	(8.996)	(19.749)		(29.260)	Other Foreign Claims	0900
	26.173		108.890	828	21.686	(36.694)		428.964	Currency and Deposits	1000
	(4.265)		(1.173)		10.376	(37.350)		8.567	Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
	30.439		110.063		11.310	656		419.569	Rupiah Currency & Deposits	1020
	3.419		12.920					39.547	Currency & Coin	1021
	9.528		27.286		6.625	17		70.444	Demand Deposits	1022
	261		5.853		611			120.951	Saving Deposits	1023
	17.474		61.754		1.556			175.476	Time Deposits	1024
	(244)		2.250		2.518	639		13.151	Other Rupiah Deposits	1025
				828				828	Postal & Cooperation Deposits	1030
81	1.115	2.914	(2.630)	22.512	(5.697)	(5.800)		20.939	Short Term Securities	1100
(10.346)	(6.162)	22.850	69.467	320.580	29.822	8.141		477.425	Credit	1200
(324)		12.178		156.962		304		266.467	Bank Loans in Rupiah	1210
	(6.162)	(350)	11.986	44.323	1.375			59.330	Other Institutions Loan in Rupiah	1220
(10.023)		11.022	57.481	119.295	28.447	7.836		151.628	Loans in Foreign Currency	1230
		5	901.794	1.366.950	398.372	7.792		1.414.000	Stock & Participation	1300
87.436	(2.737)	915	8.165	40.190	115.712	4.192		114.454	Long Term Securities	1400
87.436			10.805		108.357			87.436	Government Bonds	1410
	(2.737)	915	(2.640)	40.190	7.355	4.192		27.018	Other Bonds & Debentures	1420
	(140)		41.346					49.419	Life Insurance & Pension Reserve	1500
	(751)	5.484	53.618	45.021	1.470	7.316		38.710	Trade Credits	1800
			(905)		10.744			211.807	Interbank Claims	2000
(64.323)	(137.091)	(3.562)	701.872	284.976	(279.206)	10.221		352.798	Miscellaneous Accounts	9000
202.546	133.022	133.022	3.432.554	3.432.554	283.907	283.907	5.563.677	5.563.677	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

TABEL 4. RINGKASAN NERACA ARUS
TABLE 4. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KE		
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMER
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GO
		P	S	P	S	P	S	P	S	P
		U	S	U	S	U	S	U	S	U
0100	Tabungan Bruto		(9.535)		55.741		16.286		583.391	
0200	Investasi Nonfinansial	135		6.300		(4.538)		240.570		226.905
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(9.670)		49.440		20.824		342.820		(11.029)
0400	Selisih Statistik = 0300-0500									
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(9.670)		49.440		20.824		342.820		(11.029)
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	187.972		574.052		161.228		599.781		44.985
0700	Jumlah Sumber Finansial		197.642		524.612		140.403		256.961	
0800	Cadangan Valas Pemerintah	113.565	62							
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	1.861		(3.602)	(3.103)	787	(175)		(34)	
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	20.314	52.842	(27.259)	457.123	47.951		241.434		40.217
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	20.314	4.215	(32.872)	40.568	3.984		(5.276)		5.073
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		48.627	5.613	416.555	43.967		245.663		35.144
1021	Uang Kertas dan Logam		54.397	6.866		2.554		19.013		2.377
1022	Giro		(5.772)	(29)	86.566	6.368		2.508		23.779
1023	Tabungan		2		159.337	1.478		152.961		733
1024	Deposito Berjangka				147.133	29.148		77.130		6.104
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(1.225)	23.519	4.419		(5.949)		2.152
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							1.046		
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			13.430	17.065	7.393	2.460	(2.714)		(0)
1200	Kredit (Jumlah)	(481)	(748)	442.796	26.945	62.287	28.472	45	287.681	873
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(481)		370.521			9.236		243.070	
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				2.109	64.538	3.087	45	30.468	881
1230	Kredit dalam Valas		(748)	72.276	24.837	(2.251)	16.149		14.144	(7)
1300	Modal Saham dan Penyertaan			(1.387)	32.070	31.066	25.872	75.913		(53)
1400	Surat Berharga Jk Panjang	(9.580)	19.233	48.601	1.431	25.100	1.980	66.081		30.230
1410	Surat Berharga Pemerintah	(9.580)		47.757		19.625		66.055		11.000
1420	Surat Berharga Lainnya		19.233	844	1.431	5.475	1.980	27		19.230
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun					2	44.041	4.129		
1800	Kredit Dagang						1	(10.342)	(18.727)	
2000	Rekening Antar Bank	(1.256)	56.122	139.361	28.973	(5.073)		(3)		
9000	Rupa-rupa	63.551	70.131	(37.887)	(35.893)	(8.285)	37.752	225.238	(11.959)	(26.282)
	TOTAL	188.107	188.107	580.352	580.352	156.690	156.690	840.352	840.352	271.890

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif
) Angka Sementara

DANA INDONESIA, 2011 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2011 (IN BILLION RUPIAHS)

UANGAN/ NON FINANCIAL SECTORS					LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
INTAH	PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
VERNMENT	GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
S	P	S	P	S	P	S	P	S		
S	U	S	U	S	U	S	U	S		
215.876		104.492		1.506.466		110.527		2.583.243	Gross Saving	0100
	138.240		1.975.630					2.583.243	Non Financial Investment	0200
	(33.748)		(469.165)		110.527				Net Lending/Borrowing	0300
									Statistical Discrepancy	0400
	(33.748)		(469.165)		110.527				Net Financial Investment	0500
	143.450		1.117.961		297.883			3.127.313	Total Financial Uses	0600
56.014		177.199		1.587.125		187.356		3.127.313	Total Financial Resources	0700
					62	113.565		113.627	Official Foreign Exchange Reserve	0800
			467	1.944	(2.216)	(1.336)		(2.704)	Other Foreign Claims	0900
	6.041		188.107	1.046	2.251	8.044		519.055	Currency and Deposits	1000
	3.987		55.832		3.038	9.298		54.080	Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
	2.054		132.276		(787)	(1.253)		463.929	Rupiah Currency & Deposits	1020
	4.753		18.833					54.397	Currency & Coin	1021
	7.744		39.709		687	(29)		80.765	Demand Deposits	1022
	(111)		4.203		75			159.339	Saving Deposits	1023
	(12.497)		46.186		1.062			147.133	Time Deposits	1024
	2.165		23.344		(2.612)	(1.225)		22.294	Other Rupiah Deposits	1025
				1.046				1.046	Postal & Cooperation Deposits	1030
(2.063)	(280)	3.524	9.168	13.003	12.292	5.300		39.290	Short Term Securities	1100
(15.219)	4.283	4.029	79.298	320.263	108.293	45.968		697.393	Credit	1200
7.528		(292)		110.438		61		370.039	Bank Loans in Rupiah	1210
	4.283	5.731	27.530	55.981	99			97.375	Other Institutions Loan in Rupiah	1220
(22.746)		(1.409)	51.767	153.845	108.194	45.907		229.978	Loans in Foreign Currency	1230
	5.712	66.226	281.465	377.867	125.617	16.298		518.333	Stock & Participation	1300
123.813	2.936	821	(100.786)	(1.363)	87.794	4.461		150.377	Long Term Securities	1400
123.813			(68.567)		57.524			123.813	Government Bonds	1410
	2.936	821	(32.219)	(1.363)	30.271	4.461		26.564	Other Bonds & Debentures	1420
	31		39.879					44.041	Life Insurance & Pension Reserve	1500
	106.251	46.299	(22.236)	56.863	10.512	(250)		84.185	Trade Credits	1800
			(805)		(47.129)			85.095	Interbank Claims	2000
(50.517)	18.476	56.300	643.403	817.501	407	(4.694)		878.621	Miscellaneous Accounts	9000
271.890	281.691	281.691	3.093.591	3.093.591	297.883	297.883	5.710.556	5.710.556	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

TABEL 5. RINGKASAN NERACA ARUS
TABLE 5. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KE		
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMER
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GO
		P	S	P	S	P	S	P	S	P
		U	S	U	S	U	S	U	S	U
0100	Tabungan Bruto		10.460		76.274		35.957		659.434	
0200	Investasi Nonfinansial	9.596		12.430		(3.510)		302.437		286.581
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	864		63.845		39.467		356.997		(31.330)
0400	Selisih Statistik = 0300-0500									
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	864		63.845		39.467		356.997		(31.330)
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	151.005		610.725		176.999		801.135		25.731
0700	Jumlah Sumber Finansial		150.141		546.880		137.532		444.138	
0800	Cadangan Valas Pemerintah	123.904	2.037							
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(1.697)		(3.921)	308	1.341	1.996	2.078	25	2
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(30.876)	28.091	7.434	455.537	(11.425)		331.823		(2.572)
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(30.876)	(11.848)	(5.112)	86.071	1.206		32.530		(12.884)
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		39.939	12.546	369.466	(12.631)		295.866		10.312
1021	Uang Kertas dan Logam		66.748	12.542		2.870		21.683		2.711
1022	Giro		(26.791)	(25)	83.995	(8.111)		28.073		(7.296)
1023	Tabungan		(18)		172.562	(3.667)		173.272		728
1024	Deposito Berjangka			27	109.916	821		74.430		11.705
1025	Simpanan Rupiah lainnya			2	2.993	(4.543)		(1.591)		2.464
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							3.428		
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			20.859	5.382	722	45.782	(985)	13	(2)
1200	Kredit (Jumlah)	(5.568)	(1.056)	530.531	13.441	118.716	25.398	7.383	528.904	(725)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(5.568)		464.425			14.700		445.623	
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				2.390	60.564	4.597	7.383	67.856	(717)
1230	Kredit dalam Valas		(1.056)	66.106	11.051	58.152	6.101		15.424	(8)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	364		(1.574)	20.512	33.643	19.298	(69.800)		(19)
1400	Surat Berharga Jk Panjang	20.625	13.545	2.418	9.554	21.028	47	20.264		25.545
1410	Surat Berharga Pemerintah	20.625		6.798		5.934		10.022		12.000
1420	Surat Berharga Lainnya		13.545	(4.380)	9.554	15.094	47	10.242		13.545
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun					13	65.696	(10.411)		
1800	Kredit Dagang						7	(4.955)	7.500	
2000	Rekening Antar Bank	(1.128)	(4.304)	32.292	26.528	(1.550)				
9000	Rupa-rupa	45.381	111.828	22.686	15.618	14.510	(20.690)	525.739	(92.303)	3.502
	TOTAL	160.601	160.601	623.155	623.155	173.489	173.489	1.103.572	1.103.572	312.312

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif
**) Angka Sangat Sementara

DANA INDONESIA, 2012 (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2012 (IN BILLION RUPIAHS)

UANGAN/ NON FINANCIAL SECTORS					LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
INTAH	PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
VERNMENT	GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
S	P	S	P	S	P	S	P	S		
S	U	S	U	S	U	S	U	S		
255.251		123.681		1.478.562		382.046		3.021.665	Gross Saving	0100
	303.703		2.110.428					3.021.665	Non Financial Investment	0200
	(180.022)		(631.865)		382.046				Net Lending/Borrowing	0300
									Statistical Discrepancy	0400
	(180.022)		(631.865)		382.046				Net Financial Investment	0500
	109.971		1.722.728		580.052			4.178.346	Total Financial Uses	0600
57.061		289.993		2.354.593		198.006		4.178.346	Total Financial Resources	0700
					2.037	123.904		125.941	Official Foreign Exchange Reserve	0800
	(22)	20	1.429	(9.944)	(7.314)	(508)		(8.104)	Other Foreign Claims	0900
	29.093		125.276	3.428	13.055	(25.255)		461.809	Currency and Deposits	1000
	19.773		37.729		6.600	(25.259)		48.965	Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
	9.321		87.547		6.455	4		409.416	Rupiah Currency & Deposits	1020
	5.421		21.524					66.750	Currency & Coin	1021
	3.566		36.943		4.031	(25)		57.180	Demand Deposits	1022
	221		2.046		(51)			172.548	Saving Deposits	1023
	2.727		19.037		1.197	27		109.944	Time Deposits	1024
	(2.613)		7.998		1.278	2		2.994	Other Rupiah Deposits	1025
				3.428				3.428	Postal & Cooperation Deposits	1030
(6.383)	550	(1.403)	37.526	11.757	3.521	7.048		62.192	Short Term Securities	1100
(44.644)	6.874	73.266	120.618	206.342	41.875	18.054		819.703	Credit	1200
(2.184)		49.203		(47.703)		(782)		458.857	Bank Loans in Rupiah	1210
	6.874	2.277	15.123	13.614	1.507			90.734	Other Institutions Loan in Rupiah	1220
(42.460)		21.786	105.494	240.431	40.368	18.836		270.112	Loans in Foreign Currency	1230
	7.720	59.450	1.481.755	1.632.016	289.185	9.998		1.741.274	Stock & Participation	1300
161.881	2.496	49.756	(31.759)	(33.942)	146.186	5.961		206.803	Long Term Securities	1400
161.253	(3)		3.169		102.708			161.253	Government Bonds	1410
628	2.499	49.756	(34.928)	(33.942)	43.478	5.961		45.550	Other Bonds & Debentures	1420
	62		76.032					65.696	Life Insurance & Pension Reserve	1500
	54.214	14.471	67.649	75.768	12.370	31.533		129.278	Trade Credits	1800
					(7.389)			22.225	Interbank Claims	2000
(53.793)	8.984	94.433	(155.798)	469.167	86.526	27.271		551.529	Miscellaneous Accounts	9000
312.312	413.674	413.674	3.833.155	3.833.155	580.052	580.052		7.200.011	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Number in the brackets is negative

**) Very Preliminary Figures

TABEL 6. RINGKASAN NERACA ARUS
TABLE 6. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KE		
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMER
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GO
		P	S	P	S	P	S	P	S	P
		U	S	U	S	U	S	U	S	U
0100	Tabungan Bruto		40.450		96.036		31.345		630.213	
0200	Investasi Nonfinansial	433		12.167		21.008		336.722		271.639
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	40.017		83.869		10.337		293.491		(64.936)
0400	Selisih Statistik = 0300-0500									
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	40.017		83.869		10.337		293.491		(64.936)
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	129.204		703.794		131.613		528.681		15.443
0700	Jumlah Sumber Finansial		89.187		619.925		121.276		235.190	
0800	Cadangan Valas Pemerintah	152.532	7.654							
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	361		12.084	13.086					640
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(32.274)	50.673	39.409	469.101	(1.696)		164.685		92.314
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(32.274)	(18.998)	16.744	195.878	(1.294)		2.583		74.891
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		69.671	22.665	273.223	(403)		161.213		17.423
1021	Uang Kertas dan Logam		60.300	22.677		1.406		10.397		1.881
1022	Giro		9.354	12	(145)	(881)		12.926		(15.059)
1023	Tabungan		17		115.322	(102)		72.988		772
1024	Deposito Berjangka			(27)	159.240	(741)		64.914		30.047
1025	Simpanan Rupiah lainnya			3	(1.194)	(84)		(11)		(217)
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							889		
1100	Surat Berharga Jangka Pendek			6.805	26.244	(4.740)	(9.145)	(1.832)		5
1200	Kredit (Jumlah)	1.652	(459)	595.362	54.829	74.375	(58.097)	(106.336)	104.131	1.213
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	1.652		436.735			20.669		73.530	
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				2.960	74.375	(90.384)	(106.336)	30.601	1.221
1230	Kredit dalam Valas		(459)	158.627	51.869		11.618			(8)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	6		(1.327)	24.135	25.997		23.416		1.860
1400	Surat Berharga Jk Panjang	2.984	(9.640)	61.010	(3.777)	14.839	835	(9.325)		
1410	Surat Berharga Pemerintah	2.984		41.982		(869)		(8.024)		
1420	Surat Berharga Lainnya		(9.640)	19.028	(3.777)	15.709	835	(1.301)		
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun						50.799	50.799		
1800	Kredit Dagang							238.755	(14.506)	
2000	Rekening Antar Bank	(646)	(68.042)	(54.633)	16.118					
9000	Rupa-rupa	4.590	109.001	45.084	20.190	22.838	136.884	168.521	145.565	(80.589)
	TOTAL	129.637	129.637	715.961	715.961	152.620	152.620	865.403	865.403	287.082

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

DANA INDONESIA, 2013*) (Miliar Rupiah)
OF INDONESIA, 2013*) (IN BILLION RUPIAHS)

UANGAN/ NON FINANCIAL SECTORS					LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
INTAH	PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
VERNMENT	GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
S	P	S	P	S	P	S	P	S		
S	U	S	U	S	U	S	U	S		
206.703		134.054		1.743.400		360.908		3.243.110	Gross Saving	0100
	360.427		2.240.714					3.243.110	Non Financial Investment	0200
	(226.372)		(497.314)		360.908				Net Lending/Borrowing	0300
									Statistical Discrepancy	0400
	(226.372)		(497.314)		360.908				Net Financial Investment	0500
	153.325		644.871		477.380			2.784.310	Total Financial Uses	0600
80.379		379.697		1.142.185		116.472		2.784.310	Total Financial Resources	0700
					7.654	152.532		160.186	Official Foreign Exchange Reserve	0800
(3.930)			(2.942)	(1.657)	(3.571)	(927)		6.572	Other Foreign Claims	0900
	16.294		199.292	889	38.393	(4.247)		516.416	Currency and Deposits	1000
	14.708		55.518		41.769	(4.235)		172.644	Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
	1.586		143.774		(3.376)	(12)		342.882	Rupiah Currency & Deposits	1020
	(41)		23.980					60.300	Currency & Coin	1021
	2.744		10.884		(1.404)	12		9.222	Demand Deposits	1022
			41.682					115.339	Saving Deposits	1023
	(1.117)		67.211		(1.074)	(27)		159.213	Time Deposits	1024
			17		(898)	2		(1.191)	Other Rupiah Deposits	1025
				889				889	Postal & Cooperation Deposits	1030
19.668	332		41.987	12.938	16.790	9.642		59.347	Short Term Securities	1100
(34.393)	1.028	79.542	12.381	556.070	125.967	4.019		705.643	Credit	1200
1.141		52.911		293.501	3.493	128		441.880	Bank Loans in Rupiah	1210
	1.026	30.052	12.381	9.695	256			(17.077)	Other Institutions Loan in Rupiah	1220
(35.534)	2	(3.421)		252.875	122.218	3.891		280.839	Loans in Foreign Currency	1230
(1)	2.052	7.203	85.598	151.683	135.795	90.378		273.398	Stock & Participation	1300
157.579	(6.359)	(306)	54.829	67.834	96.994	2.446		214.971	Long Term Securities	1400
157.579			39.502		82.005			157.579	Government Bonds	1410
	(6.359)	(306)	15.327	67.834	14.988	2.446		57.392	Other Bonds & Debentures	1420
								50.799	Life Insurance & Pension Reserve	1500
	(90.222)	(90.481)	(206.324)	179.425	10.164	(122.064)		(47.626)	Trade Credits	1800
					3.355			(51.924)	Interbank Claims	2000
(58.545)	230.199	383.739	460.050	175.003	45.839	(15.306)		896.531	Miscellaneous Accounts	9000
287.082	513.752	513.752	2.885.585	2.885.585	477.380	477.380	6.027.420	6.027.420	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

TABEL 2. RINGKASAN NERACA ARUS
TABLE 2. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	SEKTOR KEUANGAN/FINANCIAL SECTORS						SEKTOR BUKAN KE		
		BANK SENTRAL		PERBANKAN		BUKAN BANK		RUMAH TANGGA		PEMER
		CENTRAL BANK		BANKS		NON BANKS		HOUSEHOLD		GENERAL GO
		P	S	P	S	P	S	P	S	P
		U	S	U	S	U	S	U	S	U
0100	Tabungan Bruto		9.099		268.717		37.289		727.988	
0200	Investasi Nonfinansial	2.706		15.076		19.805		266.040		293.509
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	6.393		253.641		17.484		461.947		26.843
0400	Selisih Statistik = 0300-0500									
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	6.393		253.641		17.484		461.947		26.843
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	245.994		619.811		97.614		368.029		178.084
0700	Jumlah Sumber Finansial		239.601		366.170		80.130		(93.918)	
0800	Cadangan Valas Pemerintah	(1.784)	(2.278)							
0900	Klaim dalam Valas Lainnya									
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	26.208	151.852	39.929	435.577	43.929		220.424		(788)
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	22.418	(220.853)	64.775	26.368	(366)		(107.954)		78.907
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	3.790	372.705	(24.847)	409.210	44.295		327.981		(79.695)
1021	Uang Kertas dan Logam		209.560	(26.362)		758		30.222		(1.605)
1022	Giro	3.790	77.493	170.033	98.039	1.844		7.682		(53.544)
1023	Tabungan		85.653	(1)	210.247	131		179.663		28.859
1024	Deposito Berjangka			(136)	94.500	41.941		57.506		(55.998)
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(168.381)	6.424	(379)		52.907		2.593
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi							398		
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	58.991	(7.223)	48.974	(5.040)	5.444	(18.642)	15.681		7.671
1200	Kredit (Jumlah)	(190)	(137)	337.813	25.040	25.995	17.104	75	109.235	1.048
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(190)	(7)	270.360	(655)		(903)		98.371	(847)
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp				3.056	25.995	2.339	75	10.865	2.021
1230	Kredit dalam Valas		(130)	67.453	22.639		15.668			(127)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(35)	(4.228)	1.909	(1.805)	9.655	(42)	94.509		5.599
1400	Surat Berharga Jk Panjang	92.983	46.769	54.194	3.161	(1.074)	555	(1.371)		(107)
1410	Surat Berharga Pemerintah	92.983		15.259		3.842		(1.082)		(40)
1420	Surat Berharga Lainnya		46.769	38.934	3.161	(4.916)	555	(289)		(66)
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun						52.715	50.884		
1800	Kredit Dagang	494						39.665	(2.293)	
2000	Rekening Antar Bank	(908)	4.873	18.344	12.563					
9000	Rupa-rupa	70.235	49.974	118.649	(103.327)	13.665	28.440	(51.839)	(200.861)	164.660
	TOTAL	248.700	248.700	634.887	634.887	117.419	117.419	634.069	634.069	471.593

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
angka dalam kurung berarti negatif

DANA INDONESIA, 2014 (Miliar Rupiah)**
OF INDONESIA, 2014 (IN BILLION RUPIAHS)**

UANGAN/ NON FINANCIAL SECTORS					LUAR NEGERI		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
INTAH	PRSH PEMERINTAH		BISNIS							
VERNMENT	GOV'T ENTERPRISES		PRIVATE ENTERPRISES		REST OF THE WORLD		TOTAL			
S	P	S	P	S	P	S	P	S		
S	U	S	U	S	U	S	U	S		
320.352		161.031		1.803.386		325.266		3.653.129	Gross Saving	0100
	210.004		2.845.989						Non Financial Investment	0200
	(48.973)		(1.042.603)		325.266				Net Lending/Borrowing	0300
									Statistical Discrepancy	0400
	(48.973)		(1.042.603)		325.266				Net Financial Investment	0500
	(25.082)		659.615		663.347			2.807.412	Total Financial Uses	0600
151.241		23.891		1.702.218		338.080		2.807.412	Total Financial Sources	0700
					(2.278)	(1.784)		(4.062)	Official Foreign Exchange Reserve	0800
									Other Foreign Claims	0900
	(128.149)		429.185	398	18.025	60.935		648.763	Currency And Deposits	1000
	(128.802)		(96.864)		9.015	35.615		(158.870)	Foreign Exchange Currency And Deposits	1010
	652		526.049		9.009	25.320		807.235	Rupiah Currency And Deposits	1020
	277		202.167		4.102			209.560	Currency And Coin	1021
	1.013		64.831		(1.854)	18.265		193.796	Demand Deposits	1022
			87.823		(573)	1		295.902	Saving Deposits	1023
	(637)		43.157		8.663	(4)		94.496	Time Deposits	1024
			128.071		(1.329)	7.058		13.482	Other Rupiah Deposits	1025
				398				398	Postal And Cooperation Deposits	1030
147.761	1.053		(52.577)	129.525	212.720	51.576		297.957	Short Term Securities	1100
(53.361)	36.403	17.871	1.116	326.911	39.162	(1.242)		441.421	Credit	1200
1.833		43.848		130.870	2.840	(1.192)		272.164	Bank Loans In Rupiah	1210
	78	(13.210)	1.116	26.755	520			29.805	Other Institutions Loan In Rupiah	1220
(55.194)	36.325	(12.766)		169.286	35.801	(50)		139.452	Loans In Foreign Currency	1230
	3.914	172.899	381.786	550.605	309.881	89.790		807.218	Stock And Participation	1300
212.411	50.418		126.281	25.741	37.069	69.757		358.394	Long Term Securities	1400
214.709	22.383		52.227		29.137			214.709	Government Bonds	1410
(2.298)	28.035		74.054	25.741	7.932	69.757		143.685	Other Bonds And Debentures	1420
	(110)		1.941					52.715	Life Insurance And Pension Reserve	1500
	2.565	2.301	(12.990)	3.636	453	26.543		30.187	Trade Credits	1800
								17.435	Interbank Claims	2000
(155.570)	8.825	(169.180)	(215.128)	665.402	48.315	42.505		157.383	Miscellaneous Accounts	9000
471.593	184.923	184.923	3.505.604	3.505.604	663.347	663.347	6.460.541	6.460.541	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 4

**Matrik NAD Indonesia Menurut Sektor
2010-2014**

<http://www.bps.go.id>

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.bps.go.id>

TABEL 7. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 7. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2010		2011		2012	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		(29.736)		(9.535)		10.460
0200	Investasi Nonfinansial	384		135		9.596	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(30.121)		(9.670)		864	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(30.121)		(9.670)		864	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	260.048		187.972		151.005	
0700	Jumlah Sumber Finansial		290.169		197.642		150.141
0800	Cadangan Valas Pemerintah	227.485		113.565	62	123.904	2.037
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(665)		1.861		(1.697)	
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	14.344	76.620	20.314	52.842	(30.876)	28.091
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	14.344	5.353	20.314	4.215	(30.876)	(11.848)
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah		71.267		48.627		39.939
1021	Uang Kertas dan Logam		39.547		54.397		66.748
1022	Giro		31.731		(5.772)		(26.791)
1023	Tabungan		(11)		2		(18)
1024	Deposito Berjangka						
1025	Simpanan Rupiah lainnya						
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek						
1200	Kredit (Jumlah)	(247)	(527)	(481)	(748)	(5.568)	(1.056)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	(247)		(481)		(5.568)	
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp						
1230	Kredit dalam Valas		(527)		(748)		(1.056)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(224)				364	
1400	Surat Berharga Jk Panjang	(4.468)	(3.647)	(9.580)	19.233	20.625	13.545
1410	Surat Berharga Pemerintah	(4.468)		(9.580)		20.625	
1420	Surat Berharga Lainnya		(3.647)		19.233		13.545
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	(1.709)	196.188	(1.256)	56.122	(1.128)	(4.304)
9000	Rupa-rupa	25.530	21.535	63.551	70.131	45.381	111.828
	TOTAL	260.432	260.432	188.107	188.107	160.601	160.601

Keterangan:

U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

SEKTOR BANK SENTRAL, 2010-2014 (MILIAR RUPIAH)
CENTRAL BANK SECTOR, 2010-2014 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR				TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2013*		2014**			
P	S	P	S		
U	S	U	S		
	40.450		9.099	Gross Saving	0100
433		2.706		Non Financial Investment	0200
40.017		6.393		Net Lending/Borrowing	0300
				Statistical Discrepancy	0400
40.017		6.393		Net Financial Investment	0500
129.204		245.994		Total Financial Uses	0600
	89.187		239.601	Total Financial Resources	0700
152.532	7.654	(1.784)	(2.278)	Official Foreign Exchange Reserve	0800
361				Other Foreign Claims	0900
(32.274)	50.673	26.208	151.852	Currency and Deposits	1000
(32.274)	(18.998)	22.418	(220.853)	Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
	69.671	3.790	372.705	Rupiah Currency & Deposits	1020
	60.300		209.560	Currency & Coin	1021
	9.354	3.790	77.493	Demand Deposits	1022
	17		85.653	Saving Deposits	1023
				Time Deposits	1024
				Other Rupiah Deposits	1025
				Postal & Cooperation Deposits	1030
		58.991	(7.223)	Short Term Securities	1100
1.652	(459)	(190)	(137)	Credit	1200
1.652		(190)	(7)	Bank Loans in Rupiah	1210
				Other Institutions Loan in Rupiah	1220
	(459)		(130)	Loans in Foreign Currency	1230
6		(35)	(4.228)	Stock & Participation	1300
2.984	(9.640)	92.983	46.769	Long Term Securities	1400
2.984		92.983		Government Bonds	1410
	(9.640)		46.769	Other Bonds & Debentures	1420
				Life Insurance & Pension Reserve	1500
		494		Trade Credits	1800
(646)	(68.042)	(908)	4.873	Interbank Claims	2000
4.590	109.001	70.235	49.974	Miscellaneous Accounts	9000
129.637	129.637	248.700	248.700	TOTAL	

TABEL 8. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 8. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2010		2011		2012	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		38.842		55.741		76.274
0200	Investasi Nonfinansial	1.328		6.300		12.430	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	37.514		49.440		63.845	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	37.514		49.440		63.845	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	476.601		574.052		610.725	
0700	Jumlah Sumber Finansial		439.087		524.612		546.880
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(37)	(6.294)	(3.602)	(3.103)	(3.921)	308
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	(35.494)	388.209	(27.259)	457.123	7.434	455.537
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(41.507)	40.564	(32.872)	40.568	(5.112)	86.071
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	6.013	347.646	5.613	416.555	12.546	369.466
1021	Uang Kertas dan Logam	5.357		6.866		12.542	
1022	Giro	17	38.696	(29)	86.566	(25)	83.995
1023	Tabungan		120.962		159.337		172.562
1024	Deposito Berjangka		175.476		147.133	27	109.916
1025	Simpanan Rupiah lainnya	639	12.512	(1.225)	23.519	2	2.993
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	23.136	(327)	13.430	17.065	20.859	5.382
1200	Kredit (Jumlah)	330.185	4.693	442.796	26.945	530.531	13.441
1210	Kredit Bank dalam Rupiah	266.714		370.521		464.425	
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp		4.200		2.109		2.390
1230	Kredit dalam Valas	63.471	493	72.276	24.837	66.106	11.051
1300	Modal Saham dan Penyertaan	2.126	30.068	(1.387)	32.070	(1.574)	20.512
1400	Surat Berharga Jk Panjang	(28.105)	(1.034)	48.601	1.431	2.418	9.554
1410	Surat Berharga Pemerintah	(37.092)		47.757		6.798	
1420	Surat Berharga Lainnya	8.987	(1.034)	844	1.431	(4.380)	9.554
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank	201.849	15.619	139.361	28.973	32.292	26.528
9000	Rupa-rupa	(17.059)	8.153	(37.887)	(35.893)	22.686	15.618
	TOTAL	477.929	477.929	580.352	580.352	623.155	623.155

Keterangan:

U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Number in the brackets is negative

**) Preliminary Figures*

****) Very Preliminary Figures*

SEKTOR PERBANKAN, 2010-2014 (MILIAR RUPIAH)
BANKING SECTOR, 2010-2014 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR				TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2013*		2014**			
P	S	P	S		
U	S	U	S		
	96.036		268.717	Gross Saving	0100
12.167		15.076		Non Financial Investment	0200
83.869		253.641		Net Lending/Borrowing	0300
				Statistical Discrepancy	0400
83.869		253.641		Net Financial Investment	0500
703.794		619.811		Total Financial Uses	0600
	619.925		366.170	Total Financial Resources	0700
				Official Foreign Exchange Reserve	0800
12.084	13.086			Other Foreign Claims	0900
39.409	469.101	39.929	435.577	Currency and Deposits	1000
16.744	195.878	64.775	26.368	Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
22.665	273.223	(24.847)	409.210	Rupiah Currency & Deposits	1020
22.677		(26.362)		Currency & Coin	1021
12	(145)	170.033	98.039	Demand Deposits	1022
	115.322	(1)	210.247	Saving Deposits	1023
(27)	159.240	(136)	94.500	Time Deposits	1024
3	(1.194)	(168.381)	6.424	Other Rupiah Deposits	1025
				Postal & Cooperation Deposits	1030
6.805	26.244	48.974	(5.040)	Short Term Securities	1100
595.362	54.829	337.813	25.040	Credit	1200
436.735		270.360	(655)	Bank Loans in Rupiah	1210
	2.960		3.056	Other Institutions Loan in Rupiah	1220
158.627	51.869	67.453	22.639	Loans in Foreign Currency	1230
(1.327)	24.135	1.909	(1.805)	Stock & Participation	1300
61.010	(3.777)	54.194	3.161	Long Term Securities	1400
41.982		15.259		Government Bonds	1410
19.028	(3.777)	38.934	3.161	Other Bonds & Debentures	1420
				Life Insurance & Pension Reserve	1500
				Trade Credits	1800
(54.633)	16.118	18.344	12.563	Interbank Claims	2000
45.084	20.190	118.649	(103.327)	Miscellaneous Accounts	9000
715.961	715.961	634.887	634.887	TOTAL	

TABEL 9. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 9. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2010		2011		2012	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		24.408		16.286		35.957
0200	Investasi Nonfinansial	14.724		(4.538)		(3.510)	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	9.684		20.824		39.467	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	9.684		20.824		39.467	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	149.526		161.228		176.999	
0700	Jumlah Sumber Finansial		139.842		140.403		137.532
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(31)	2.819	787	(175)	1.341	1.996
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	31.302		47.951		(11.425)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	1.031		3.984		1.206	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	30.271		43.967		(12.631)	
1021	Uang Kertas dan Logam	2.465		2.554		2.870	
1022	Giro	4.877		6.368		(8.111)	
1023	Tabungan	944		1.478		(3.667)	
1024	Deposito Berjangka	21.934		29.148		821	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	51		4.419		(4.543)	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	5.757	1.560	7.393	2.460	722	45.782
1200	Kredit (Jumlah)	49.670	39.392	62.287	28.472	118.716	25.398
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		21.627		9.236		14.700
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp	47.419	178	64.538	3.087	60.564	4.597
1230	Kredit dalam Valas	2.251	17.587	(2.251)	16.149	58.152	6.101
1300	Modal Saham dan Penyertaan	47.840	9.185	31.066	25.872	33.643	19.298
1400	Surat Berharga Jk Panjang	22.087	(13.598)	25.100	1.980	21.028	47
1410	Surat Berharga Pemerintah	3.876		19.625		5.934	
1420	Surat Berharga Lainnya	18.211	(13.598)	5.475	1.980	15.094	47
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun	2	49.419	2	44.041	13	65.696
1800	Kredit Dagang		3		1		7
2000	Rekening Antar Bank	1.977		(5.073)		(1.550)	
9000	Rupa-rupa	(9.078)	51.062	(8.285)	37.752	14.510	(20.690)
	TOTAL	164.250	164.250	156.690	156.690	173.489	173.489

Keterangan:

U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

**SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK, 2010-2014 (MILIAR RUPIAH)
FOR NON BANK FINANCIAL SECTOR, 2010-2014 (IN BILLION RUPIAHS)**

TAHUN/YEAR				TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2013*		2014**			
P	S	P	S		
U	S	U	S		
	31.345		37.289	Gross Saving	0100
21.008		19.805		Non Financial Investment	0200
10.337		17.484		Net Lending/Borrowing	0300
				Statistical Discrepancy	0400
10.337		17.484		Net Financial Investment	0500
131.613		97.614		Total Financial Uses	0600
	121.276		80.130	Total Financial Resources	0700
				Official Foreign Exchange Reserve	0800
				Other Foreign Claims	0900
(1.696)		43.929		Currency and Deposits	1000
(1.294)		(366)		Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
(403)		44.295		Rupiah Currency & Deposits	1020
1.406		758		Currency & Coin	1021
(881)		1.844		Demand Deposits	1022
(102)		131		Saving Deposits	1023
(741)		41.941		Time Deposits	1024
(84)		(379)		Other Rupiah Deposits	1025
				Postal & Cooperation Deposits	1030
(4.740)	(9.145)	5.444	(18.642)	Short Term Securities	1100
74.375	(58.097)	25.995	17.104	Credit	1200
	20.669		(903)	Bank Loans in Rupiah	1210
74.375	(90.384)	25.995	2.339	Other Institutions Loan in Rupiah	1220
	11.618		15.668	Loans in Foreign Currency	1230
25.997		9.655	(42)	Stock & Participation	1300
14.839	835	(1.074)	555	Long Term Securities	1400
(869)		3.842		Government Bonds	1410
15.709	835	(4.916)	555	Other Bonds & Debentures	1420
	50.799		52.715	Life Insurance & Pension Reserve	1500
				Trade Credits	1800
				Interbank Claims	2000
22.838	136.884	13.665	28.440	Miscellaneous Accounts	9000
152.620	152.620	117.419	117.419	TOTAL	

TABEL 10. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 10. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2010		2011		2012	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		490.747		583.391		659.434
0200	Investasi Nonfinansial	236.001		240.570		302.437	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	254.746		342.820		356.997	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	254.746		342.820		356.997	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	373.035		599.781		801.135	
0700	Jumlah Sumber Finansial		118.289		256.961		444.138
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya		24		(34)	2.078	25
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	248.490		241.434		331.823	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	24.720		(5.276)		32.530	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	222.942		245.663		295.866	
1021	Uang Kertas dan Logam	13.676		19.013		21.683	
1022	Giro	22.152		2.508		28.073	
1023	Tabungan	113.055		152.961		173.272	
1024	Deposito Berjangka	66.840		77.130		74.430	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	7.220		(5.949)		(1.591)	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi	828		1.046		3.428	
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(736)		(2.714)		(985)	13
1200	Kredit (Jumlah)	5.589	92.642	45	287.681	7.383	528.904
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		75.720		243.070		445.623
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp	5.589	10.978	45	30.468	7.383	67.856
1230	Kredit dalam Valas		5.944		14.144		15.424
1300	Modal Saham dan Penyertaan	68.883	0	75.913		(69.800)	
1400	Surat Berharga Jk Panjang	846		66.081		20.264	
1410	Surat Berharga Pemerintah	(797)		66.055		10.022	
1420	Surat Berharga Lainnya	1.644		27		10.242	
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun	8.211		4.129		(10.411)	
1800	Kredit Dagang	(15.627)	(19.114)	(10.342)	(18.727)	(4.955)	7.500
2000	Rekening Antar Bank	(150)		(3)			
9000	Rupa-rupa	57.529	44.737	225.238	(11.959)	525.739	(92.303)
	TOTAL	609.036	609.036	840.352	840.352	1.103.572	1.103.572

Keterangan:

U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

SEKTOR RUMAH TANGGA, 2010-2014 (MILIAR RUPIAH)
HOUSEHOLD SECTOR, 2010-2014 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR				TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2013*		2014**			
P	S	P	S		
U	S	U	S		
	630.213		727.988	Gross Saving	0100
336.722		266.040		Non Financial Investment	0200
293.491		461.947		Net Lending/Borrowing	0300
				Statistical Discrepancy	0400
293.491		461.947		Net Financial Investment	0500
528.681		368.029		Total Financial Uses	0600
	235.190		(93.918)	Total Financial Resources	0700
				Official Foreign Exchange Reserve	0800
				Other Foreign Claims	0900
164.685		220.424		Currency and Deposits	1000
2.583		(107.954)		Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
161.213		327.981		Rupiah Currency & Deposits	1020
10.397		30.222		Currency & Coin	1021
12.926		7.682		Demand Deposits	1022
72.988		179.663		Saving Deposits	1023
64.914		57.506		Time Deposits	1024
(11)		52.907		Other Rupiah Deposits	1025
889		398		Postal & Cooperation Deposits	1030
(1.832)		15.681		Short Term Securities	1100
(106.336)	104.131	75	109.235	Credit	1200
	73.530		98.371	Bank Loans in Rupiah	1210
(106.336)	30.601	75	10.865	Other Institutions Loan in Rupiah	1220
				Loans in Foreign Currency	1230
23.416		94.509		Stock & Participation	1300
(9.325)		(1.371)		Long Term Securities	1400
(8.024)		(1.082)		Government Bonds	1410
(1.301)		(289)		Other Bonds & Debentures	1420
50.799		50.884		Life Insurance & Pension Reserve	1500
238.755	(14.506)	39.665	(2.293)	Trade Credits	1800
				Interbank Claims	2000
168.521	145.565	(51.839)	(200.861)	Miscellaneous Accounts	9000
865.403	865.403	634.069	634.069	TOTAL	

**TABEL 11. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 11. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR GENE**

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2010		2011		2012	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		189.698		215.876		255.251
0200	Investasi Nonfinansial	181.415		226.905		286.581	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	8.284		(11.029)		(31.330)	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	8.284		(11.029)		(31.330)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	21.132		44.985		25.731	
0700	Jumlah Sumber Finansial		12.848		56.014		57.061
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya					2	
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	13.572		40.217		(2.572)	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	5.042		5.073		(12.884)	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	8.531		35.144		10.312	
1021	Uang Kertas dan Logam	1.709		2.377		2.711	
1022	Giro	(41)		23.779		(7.296)	
1023	Tabungan	228		733		728	
1024	Deposito Berjangka	5.919		6.104		11.705	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	716		2.152		2.464	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(6)	81	(0)	(2.063)	(2)	(6.383)
1200	Kredit (Jumlah)	(899)	(10.346)	873	(15.219)	(725)	(44.644)
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		(324)		7.528		(2.184)
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp	(877)		881		(717)	
1230	Kredit dalam Valas	(22)	(10.023)	(7)	(22.746)	(8)	(42.460)
1300	Modal Saham dan Penyertaan	(4.792)		(53)		(19)	
1400	Surat Berharga Jk Panjang	2.954	87.436	30.230	123.813	25.545	161.881
1410	Surat Berharga Pemerintah	6.755	87.436	11.000	123.813	12.000	161.253
1420	Surat Berharga Lainnya	(3.801)		19.230		13.545	628
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun						
1800	Kredit Dagang						
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	10.303	(64.323)	(26.282)	(50.517)	3.502	(53.793)
	TOTAL	202.546	202.546	271.890	271.890	312.312	312.312

Keterangan:

U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Number in the brackets is negative

**) Preliminary Figures*

****) Very Preliminary Figures*

SEKTOR PEMERINTAH, 2010-2014 (MILIAR RUPIAH)
RAL GOVERNMENT SECTOR, 2010-2014 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR				TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2013*		2014**			
P	S	P	S		
U	S	U	S		
	206.703		320.352	Gross Saving	0100
271.639		293.509		Non Financial Investment	0200
(64.936)		26.843		Net Lending/Borrowing	0300
				Statistical Discrepancy	0400
(64.936)		26.843		Net Financial Investment	0500
15.443		178.084		Total Financial Uses	0600
	80.379		151.241	Total Financial Resources	0700
				Official Foreign Exchange Reserve	0800
640	(3.930)			Other Foreign Claims	0900
92.314		(788)		Currency and Deposits	1000
74.891		78.907		Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
17.423		(79.695)		Rupiah Currency & Deposits	1020
1.881		(1.605)		Currency & Coin	1021
(15.059)		(53.544)		Demand Deposits	1022
772		28.859		Saving Deposits	1023
30.047		(55.998)		Time Deposits	1024
(217)		2.593		Other Rupiah Deposits	1025
				Postal & Cooperation Deposits	1030
5	19.668	7.671	147.761	Short Term Securities	1100
1.213	(34.393)	1.048	(53.361)	Credit	1200
	1.141	(847)	1.833	Bank Loans in Rupiah	1210
1.221		2.021		Other Institutions Loan in Rupiah	1220
(8)	(35.534)	(127)	(55.194)	Loans in Foreign Currency	1230
1.860	(1)	5.599		Stock & Participation	1300
	157.579	(107)	212.411	Long Term Securities	1400
	157.579	(40)	214.709	Government Bonds	1410
		(66)	(2.298)	Other Bonds & Debentures	1420
				Life Insurance & Pension Reserve	1500
				Trade Credits	1800
				Interbank Claims	2000
(80.589)	(58.545)	164.660	(155.570)	Miscellaneous Accounts	9000
287.082	287.082	471.593	471.593	TOTAL	

TABEL 12. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 12. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2010		2011		2012	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		104.388		104.492		123.681
0200	Investasi Nonfinansial	252.615		138.240		303.703	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(148.227)		(33.748)		(180.022)	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(148.227)		(33.748)		(180.022)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	(119.593)		143.450		109.971	
0700	Jumlah Sumber Finansial		28.634		177.199		289.993
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya		28			(22)	20
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	26.173		6.041		29.093	
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(4.265)		3.987		19.773	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	30.439		2.054		9.321	
1021	Uang Kertas dan Logam	3.419		4.753		5.421	
1022	Giro	9.528		7.744		3.566	
1023	Tabungan	261		(111)		221	
1024	Deposito Berjangka	17.474		(12.497)		2.727	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	(244)		2.165		(2.613)	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	1.115	2.914	(280)	3.524	550	(1.403)
1200	Kredit (Jumlah)	(6.162)	22.850	4.283	4.029	6.874	73.266
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		12.178		(292)		49.203
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp	(6.162)	(350)	4.283	5.731	6.874	2.277
1230	Kredit dalam Valas		11.022		(1.409)		21.786
1300	Modal Saham dan Penyertaan		5	5.712	66.226	7.720	59.450
1400	Surat Berharga Jk Panjang	(2.737)	915	2.936	821	2.496	49.756
1410	Surat Berharga Pemerintah					(3)	
1420	Surat Berharga Lainnya	(2.737)	915	2.936	821	2.499	49.756
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun	(140)		31		62	
1800	Kredit Dagang	(751)	5.484	106.251	46.299	54.214	14.471
2000	Rekening Antar Bank						
9000	Rupa-rupa	(137.091)	(3.562)	18.476	56.300	8.984	94.433
	TOTAL	133.022	133.022	281.691	281.691	413.674	413.674

Keterangan:

U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

***) Very Preliminary Figures

SEKTOR PERUSAHAAN PEMERINTAH, 2010-2014 (MILIAR RUPIAH)
GOVERNMENT ENTERPRISES SECTOR, 2010-2014 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR				TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2013*		2014**			
P	S	P	S		
U	S	U	S		
	134.054		161.031	Gross Saving	0100
360.427		210.004		Non Financial Investment	0200
(226.372)		(48.973)		Net Lending/Borrowing	0300
				Statistical Discrepancy	0400
(226.372)		(48.973)		Net Financial Investment	0500
153.325		(25.082)		Total Financial Uses	0600
	379.697		23.891	Total Financial Resources	0700
				Official Foreign Exchange Reserve	0800
				Other Foreign Claims	0900
16.294		(128.149)		Currency and Deposits	1000
14.708		(128.802)		Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
1.586		652		Rupiah Currency & Deposits	1020
(41)		277		Currency & Coin	1021
2.744		1.013		Demand Deposits	1022
				Saving Deposits	1023
(1.117)		(637)		Time Deposits	1024
				Other Rupiah Deposits	1025
				Postal & Cooperation Deposits	1030
332		1.053		Short Term Securities	1100
1.028	79.542	36.403	17.871	Credit	1200
	52.911		43.848	Bank Loans in Rupiah	1210
1.026	30.052	78	(13.210)	Other Institutions Loan in Rupiah	1220
2	(3.421)	36.325	(12.766)	Loans in Foreign Currency	1230
2.052	7.203	3.914	172.899	Stock & Participation	1300
(6.359)	(306)	50.418		Long Term Securities	1400
		22.383		Government Bonds	1410
(6.359)	(306)	28.035		Other Bonds & Debentures	1420
		(110)		Life Insurance & Pension Reserve	1500
(90.222)	(90.481)	2.565	2.301	Trade Credits	1800
				Interbank Claims	2000
230.199	383.739	8.825	(169.180)	Miscellaneous Accounts	9000
513.752	513.752	184.923	184.923	TOTAL	

TABEL 13. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 13. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR PRIVATE

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2010		2011		2012	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		1.357.585		1.506.466		1.478.562
0200	Investasi Nonfinansial	1.570.468		1.975.630		2.110.428	
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	(212.883)		(469.165)		(631.865)	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	(212.883)		(469.165)		(631.865)	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	1.862.086		1.117.961		1.722.728	
0700	Jumlah Sumber Finansial		2.074.969		1.587.125		2.354.593
0800	Cadangan Valas Pemerintah						
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(19.530)	(6.089)	467	1.944	1.429	(9.944)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	108.890	828	188.107	1.046	125.276	3.428
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	(1.173)		55.832		37.729	
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	110.063		132.276		87.547	
1021	Uang Kertas dan Logam	12.920		18.833		21.524	
1022	Giro	27.286		39.709		36.943	
1023	Tabungan	5.853		4.203		2.046	
1024	Deposito Berjangka	61.754		46.186		19.037	
1025	Simpanan Rupiah lainnya	2.250		23.344		7.998	
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi		828		1.046		3.428
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(2.630)	22.512	9.168	13.003	37.526	11.757
1200	Kredit (Jumlah)	69.467	320.580	79.298	320.263	120.618	206.342
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		156.962		110.438		(47.703)
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp	11.986	44.323	27.530	55.981	15.123	13.614
1230	Kredit dalam Valas	57.481	119.295	51.767	153.845	105.494	240.431
1300	Modal Saham dan Penyertaan	901.794	1.366.950	281.465	377.867	1.481.755	1.632.016
1400	Surat Berharga Jk Panjang	8.165	40.190	(100.786)	(1.363)	(31.759)	(33.942)
1410	Surat Berharga Pemerintah	10.805		(68.567)		3.169	
1420	Surat Berharga Lainnya	(2.640)	40.190	(32.219)	(1.363)	(34.928)	(33.942)
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun	41.346		39.879		76.032	
1800	Kredit Dagang	53.618	45.021	(22.236)	56.863	67.649	75.768
2000	Rekening Antar Bank	(905)		(805)			
9000	Rupa-rupa	701.872	284.976	643.403	817.501	(155.798)	469.167
	TOTAL	3.432.554	3.432.554	3.093.591	3.093.591	3.833.155	3.833.155

Keterangan:

U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Number in the brackets is negative

**) Preliminary Figures*

****) Very Preliminary Figures*

SEKTOR BISNIS, 2010-2014 (MILIAR RUPIAH)
ENTERPRISES SECTOR, 2010-2014 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR				TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2013*		2014**			
P	S	P	S		
U	S	U	S		
	1.743.400		1.803.386	Gross Saving	0100
2.240.714		2.845.989		Non Financial Investment	0200
(497.314)		(1.042.603)		Net Lending/Borrowing	0300
				Statistical Discrepancy	0400
(497.314)		(1.042.603)		Net Financial Investment	0500
644.871		659.615		Total Financial Uses	0600
	1.142.185		1.702.218	Total Financial Resources	0700
				Official Foreign Exchange Reserve	0800
(2.942)	(1.657)			Other Foreign Claims	0900
199.292	889	429.185	398	Currency and Deposits	1000
55.518		(96.864)		Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
143.774		526.049		Rupiah Currency & Deposits	1020
23.980		202.167		Currency & Coin	1021
10.884		64.831		Demand Deposits	1022
41.682		87.823		Saving Deposits	1023
67.211		43.157		Time Deposits	1024
17		128.071		Other Rupiah Deposits	1025
	889		398	Postal & Cooperation Deposits	1030
41.987	12.938	(52.577)	129.525	Short Term Securities	1100
12.381	556.070	1.116	326.911	Credit	1200
	293.501		130.870	Bank Loans in Rupiah	1210
12.381	9.695	1.116	26.755	Other Institutions Loan in Rupiah	1220
	252.875		169.286	Loans in Foreign Currency	1230
85.598	151.683	381.786	550.605	Stock & Participation	1300
54.829	67.834	126.281	25.741	Long Term Securities	1400
39.502		52.227		Government Bonds	1410
15.327	67.834	74.054	25.741	Other Bonds & Debentures	1420
		1.941		Life Insurance & Pension Reserve	1500
(206.324)	179.425	(12.990)	3.636	Trade Credits	1800
				Interbank Claims	2000
460.050	175.003	(215.128)	665.402	Miscellaneous Accounts	9000
2.885.585	2.885.585	3.505.604	3.505.604	TOTAL	

TABEL 14. RINGKASAN NERACA ARUS DANA INDONESIA
TABLE 14. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR REST

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	TAHUN/YEAR					
		2010		2011		2012	
		P	S	P	S	P	S
		U	S	U	S	U	S
0100	Tabungan Bruto		81.004		110.527		382.046
0200	Investasi Nonfinansial						
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	81.004		110.527		382.046	
0400	Selisih Statistik = 0300-0500						
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	81.004		110.527		382.046	
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	283.907		297.883		580.052	
0700	Jumlah Sumber Finansial		202.903		187.356		198.006
0800	Cadangan Valas Pemerintah		227.485	62	113.565	2.037	123.904
0900	Klaim dalam Valas Lainnya	(8.996)	(19.749)	(2.216)	(1.336)	(7.314)	(508)
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	21.686	(36.694)	2.251	8.044	13.055	(25.255)
1010	Uang & Simpanan dalam Valas	10.376	(37.350)	3.038	9.298	6.600	(25.259)
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	11.310	656	(787)	(1.253)	6.455	4
1021	Uang Kertas dan Logam						
1022	Giro	6.625	17	687	(29)	4.031	(25)
1023	Tabungan	611		75		(51)	
1024	Deposito Berjangka	1.556		1.062		1.197	27
1025	Simpanan Rupiah lainnya	2.518	639	(2.612)	(1.225)	1.278	2
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi						
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	(5.697)	(5.800)	12.292	5.300	3.521	7.048
1200	Kredit (Jumlah)	29.822	8.141	108.293	45.968	41.875	18.054
1210	Kredit Bank dalam Rupiah		304		61		(782)
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp	1.375		99		1.507	
1230	Kredit dalam Valas	28.447	7.836	108.194	45.907	40.368	18.836
1300	Modal Saham dan Penyertaan	398.372	7.792	125.617	16.298	289.185	9.998
1400	Surat Berharga Jk Panjang	115.712	4.192	87.794	4.461	146.186	5.961
1410	Surat Berharga Pemerintah	108.357		57.524		102.708	
1420	Surat Berharga Lainnya	7.355	4.192	30.271	4.461	43.478	5.961
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun						
1800	Kredit Dagang	1.470	7.316	10.512	(250)	12.370	31.533
2000	Rekening Antar Bank	10.744		(47.129)		(7.389)	
9000	Rupa-rupa	(279.206)	10.221	407	(4.694)	86.526	27.271
	TOTAL	283.907	283.907	297.883	297.883	580.052	580.052

Keterangan:

U = Uses of Funds, S = Sources of Funds

Number in the brackets is negative

*) Preliminary Figures

**) Very Preliminary Figures

SEKTOR LUAR NEGERI, 2010-2014 (MILIAR RUPIAH)
OF THE WORLD SECTOR, 2010-2014 (IN BILLION RUPIAHS)

TAHUN/YEAR				TRANSACTION CATEGORIES	CODE
2013*		2014**			
P	S	P	S		
U	S	U	S		
	360.908		325.266	Gross Saving	0100
				Non Financial Investment	0200
360.908		325.266		Net Lending/Borrowing	0300
				Statistical Discrepancy	0400
360.908		325.266		Net Financial Investment	0500
477.380		663.347		Total Financial Uses	0600
	116.472		338.080	Total Financial Resources	0700
7.654	152.532	(2.278)	(1.784)	Official Foreign Exchange Reserve	0800
(3.571)	(927)			Other Foreign Claims	0900
38.393	(4.247)	18.025	60.935	Currency and Deposits	1000
41.769	(4.235)	9.015	35.615	Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
(3.376)	(12)	9.009	25.320	Rupiah Currency & Deposits	1020
		4.102		Currency & Coin	1021
(1.404)	12	(1.854)	18.265	Demand Deposits	1022
		(573)	1	Saving Deposits	1023
(1.074)	(27)	8.663	(4)	Time Deposits	1024
(898)	2	(1.329)	7.058	Other Rupiah Deposits	1025
				Postal & Cooperation Deposits	1030
16.790	9.642	212.720	51.576	Short Term Securities	1100
125.967	4.019	39.162	(1.242)	Credit	1200
3.493	128	2.840	(1.192)	Bank Loans in Rupiah	1210
256		520		Other Institutions Loan in Rupiah	1220
122.218	3.891	35.801	(50)	Loans in Foreign Currency	1230
135.795	90.378	309.881	89.790	Stock & Participation	1300
96.994	2.446	37.069	69.757	Long Term Securities	1400
82.005		29.137		Government Bonds	1410
14.988	2.446	7.932	69.757	Other Bonds & Debentures	1420
				Life Insurance & Pension Reserve	1500
10.164	(122.064)	453	26.543	Trade Credits	1800
3.355				Interbank Claims	2000
45.839	(15.306)	48.315	42.505	Miscellaneous Accounts	9000
477.380	477.380	663.347	663.347	TOTAL	

TABEL 15. NERACA ARUS DANA INDONESIA
TAHUN 2014
TABLE 15. FLOW OF FUNDS ACCOUNTS OF INDONESIA FOR

KODE	KATEGORI TRANSAKSI	ASURANSI		PRSH PEMBIAYAAN		PEGA
		INSURANCE		FINANCE COMPANIES		PAWN
		P	S	P	S	P
		U	S	U	S	U
0100	Tabungan Bruto		21.567		4.601	
0200	Investasi Nonfinansial	13.737		854		200
0300	Pinjaman Neto = 0100-0200	7.830		3.747		1.509
0400	Selisih Statistik = 0300-0500					
0500	Inv. Finansial Neto = 0600-0700	7.830		3.747		1.509
0600	Jumlah Penggunaan Finansial	48.311		18.955		1.675
0700	Jumlah Sumber Finansial		40.481		15.208	
0800	Cadangan Valas Pemerintah					
0900	Klaim dalam Valas Lainnya					
1000	Uang dan Simpanan (Jumlah)	24.735		1.625		(12)
1010	Uang & Simpanan dalam Valas			(366)		
1020	Uang & Simpanan dalam Rupiah	24.735		1.991		(12)
1021	Uang Kertas dan Logam	953		(216)		
1022	Giro			2.671		
1023	Tabungan			(53)		(12)
1024	Deposito Berjangka	23.782		(32)		
1025	Simpanan Rupiah lainnya			(379)		
1030	Tabungan Giro Pos & Koperasi					
1100	Surat Berharga Jangka Pendek	5.347	(18.591)	(15)	(51)	
1200	Kredit (Jumlah)	5.443	3.762	18.177	12.770	1.425
1210	Kredit Bank dalam Rupiah				(1.857)	
1220	Kredit Institusi Lain dlm Rp	5.443	3.762	18.177	(1.041)	1.425
1230	Kredit dalam Valas				15.668	
1300	Modal Saham dan Penyertaan	5.944		98		
1400	Surat Berharga Jk Panjang	1.134		(1)		
1410	Surat Berharga Pemerintah	4.388				
1420	Surat Berharga Lainnya	(3.254)		(1)		
1500	Cadangan Asuransi & Pensiun		28.666			
1800	Kredit Dagang					
2000	Rekening Antar Bank					
9000	Rupa-rupa	5.708	26.644	(929)	2.489	262
	TOTAL	62.048	62.048	19.809	19.809	1.875

Keterangan:

P = Penggunaan, S = Sumber
 angka dalam kurung berarti negatif

SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB)
(DALAM MILIAR RUPIAH)
NON BANKS FINANCIAL SECTORS, 2014 (IN BILLION RUPIAHS)

DAIAN	DANA PENSIUN		TOTAL		TRANSACTION CATEGORIES	CODE
SHOPS	PENSION FUNDS		TOTAL			
S	P	S	P	S		
S	U	S	U	S		
1.709		9.412		37.289	Gross Saving	0100
	5.014		19.805		Non Financial Investment	0200
	4.398		17.484		Net Lending/Borrowing	0300
	4.398		17.484		Statistical Discrepancy	0400
	28.673		97.614		Net Financial Investment	0500
					Total Financial Uses	0600
166		24.275		80.130	Total Financial Resources	0700
					Official Foreign Exchange Reserve	0800
					Other Foreign Claims	0900
	17.581		43.929		Currency and Deposits	1000
			(366)		Foreign Exchange Currency & Deposits	1010
	17.581		44.295		Rupiah Currency & Deposits	1020
	21		758		Currency & Coin	1021
	(827)		1.844		Demand Deposits	1022
	196		131		Saving Deposits	1023
	18.191		41.941		Time Deposits	1024
			(379)		Other Rupiah Deposits	1025
					Postal & Cooperation Deposits	1030
	112		5.444	(18.642)	Short Term Securities	1100
334	950	238	25.995	17.104	Credit	1200
954				(903)	Bank Loans in Rupiah	1210
(620)	950	238	25.995	2.339	Other Institutions Loan in Rupiah	1220
				15.668	Loans in Foreign Currency	1230
(42)	3.613		9.655	(42)	Stock & Participation	1300
555	(2.207)		(1.074)	555	Long Term Securities	1400
	(546)		3.842		Government Bonds	1410
555	(1.661)		(4.916)	555	Other Bonds & Debentures	1420
		24.049		52.715	Life Insurance & Pension Reserve	1500
					Trade Credits	1800
					Interbank Claims	2000
(681)	8.624	(12)	13.665	28.440	Miscellaneous Accounts	9000
1.875	33.687	33.687	117.419	117.419	TOTAL	

Note: U = Uses of Funds, S = Sources of Funds
Number in the brackets is negative

Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, W.I. *National Income and Economic Accounting*, Prentise Hall Inc., Englewood, New Jersey, 1969.

Badan Pusat Statistik, *Studi Neraca Arus Indonesia 1980*, Jakarta, 1987.

_____, *Neraca Arus Dana Indonesia Tahunan*, berbagai seri, Jakarta.

_____, *Pendapatan Nasional Indonesia Triwulanan*, Jakarta, berbagai seri.

Bank Indonesia, *Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank-Bank*, Jakarta, 2000.

_____, *Statistik Ekonomi-Kuangan Indonesia*, terbit bulanan.

_____, *Laporan Perekonomian Indonesia 2013*, Jakarta, 2013

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Laporan Kegiatan Usaha Peransuransian Indonesia 2013*, Jakarta, 2014.

_____, *Data Statistik Perusahaan Pembiayaan 2013*, Jakarta, 2014.

_____, *Laporan Tahunan Pegadaian 2013*, Jakarta, 2014.

_____, *Laporan Tahunan Dana Pensiun 2013*, Jakarta, 2014.

_____, *Statistik Pasar Modal, Minggu ke IV Januari 2014*, Jakarta, 2014.

The World Bank, *Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia Desember 2013*, 2014

Board of Governors of the Federal Reserve System, *Guide to the Flow of Funds Accounts*, Washington, D.C, 2000.

Central Bank of the Philippines, *The Flow of Funds of the Philippines 1980 - 1983*, Manila, 1985.

_____, *Flow of Funds Manual of Accounts*, Manila, 1983.

Commission of the European Communities, International Monetary Fund, Organization for Economic Co-operation and Development, United Nations, and World Bank, *System of National Accounts*, Brussels/Lexembourg, New York, Paris, Washington, D.C, 1993.

Copeland, M.A., *A study of Money of Flows in the United States*, New York, 1952.

Dawson, J.C., *Furthering the Development of Flow of Funds Analysis for Indonesia*, Final Report of a Mission Funded By USAID, Jakarta, 1991.

Geehan, Randy, *An Analysis of the Indonesia Flow of Funds*, Occasional Paper for the Seminar, Jakarta, Mei, 1990.

Geehan, Saldua, and Balances, *The Indonesian Flow of Funds*, Manual of Operation, Consultan Report, Jakarta, 1990.

Powelson, J.P., *National Income and Flow of Funds Analysis*, Mc.Graw Hillbook Company Inc., New York, 1960.

Ritter, Lawrence S. & Silber, William L., *Principles of money Banking and Financial Markets*, Harper Collins Publishers, 1991.

Samuelson, Paul A. & William D., *Ekonomi (Terjemahan)*, Edisi Kedua belas, Penerbit Erlangga, 1986.

United Nations , *Provisional International Guidelines on the National and Sectoral Balance Sheet and Reconciliation Accounts of the System of National Accounts*, Statistical Paper, Series M No. 60, New York, 1977.

_____, *Handbook of National Accounting, Public Sector*, Studies Methods, Series F No. 50, New York, 1988.

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

